



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025-2029



(0286) 591142



Jl. Dipayuda No. 30 A Banjarnegara



Baperlitbang@banjarnegarakab.go.id



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
21. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS dan RTRW.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- c. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD terdiri atas:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial;
 - d. goncangan politik;
 - e. krisis ekonomi;
 - f. konflik sosial budaya;
 - g. gangguan keamanan;
 - h. pemekaran daerah; dan/atau
 - i. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-8-2025

BUPATI BANJARNEGARA,


AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-8-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI
JAWA TENGAH (2-130/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom-up. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh *stakeholders*.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di Kabupaten Banjarnegara. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 317

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan maka perencanaan pembangunan dapat dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang mendatang. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJMN. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah yang terpilih dalam tujuan sasaran, strategis dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Sejak Pelantikan Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025, dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, telah dilaksanakan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis, dengan melibatkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya, serta penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.

Dokumen ini merupakan tahap akhir dari proses keseluruhan penyusunan RPJMD, yang tahapannya berawal dari penyusunan dokumen rancangan awal yang memuat visi dan misi Bupati, untuk difinalisasikan pada tahap berikutnya melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dan masukan dari Renstra-PD, menjadi dokumen rancangan akhir yang memuat kesepakatan untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjarnegara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

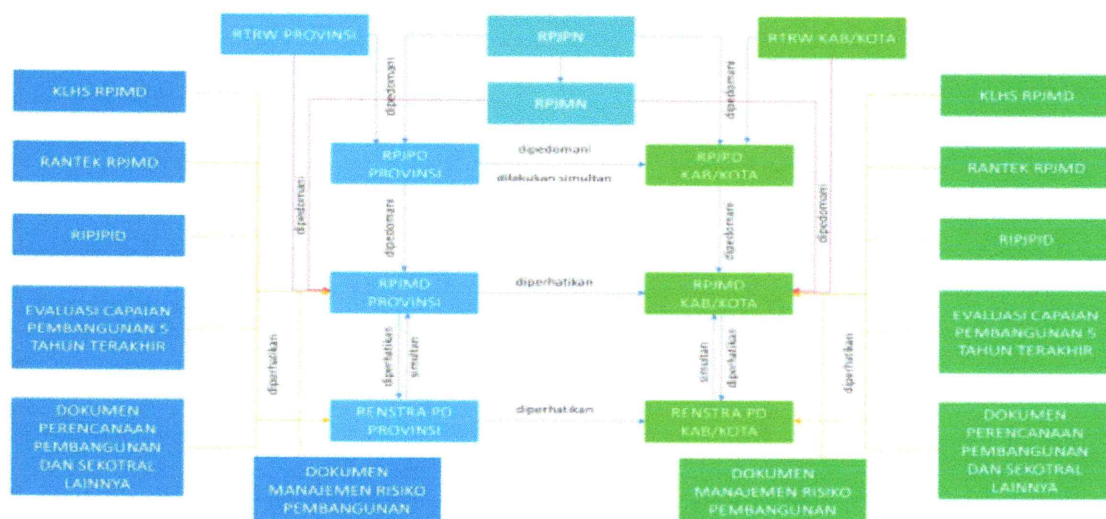
Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2025);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024, isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, dan dokumen sektoral lainnya. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Bupati Banjarnegara beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang: 1). Gambaran umum kondisi daerah yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum; 2). Gambaran keuangan daerah, yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2029; dan 3). Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

berisi penjelasan mengenai 1). Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan 2). Strategi dan arah kebijakan, serta program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

berisi tentang daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, beserta indikator program, target, dan pagu indikatif program, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) untuk periode tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

BAB V PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, RPD Tahun 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra PD, yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 akan dijabarkan menjadi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama RPJMD periode selanjutnya belum tersusun. Program prioritas daerah tahun transisi mengacu pada tujuan, sasaran, maupun program prioritas tahun terakhir pada RPJMD ini yaitu pada tahun 2030, dengan penyesuaian target capaian sesuai capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Bupati yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkada dalam menyusun RKPD maupun APBD.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berkewajiban untuk menyusun Renstra PD dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD.
3. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sampai tahun 2030.
5. Guna meningkatkan inklusivitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
6. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD, pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan berbasis risiko melalui manajemen risiko.

7. Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BUPATI BANJARNEGARA,


AMALIA PESIANA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

DAFTAR GRAFIK..... 3

DAFTAR GAMBAR..... 6

BAB I PENDAHULUAN 8

1.1. Latar Belakang..... 8

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 9

**1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya 10**

1.4. Maksud dan Tujuan..... 11

1.5. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH..... 13

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... 13

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....13

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah.....13

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....15

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup17

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan20

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas22

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim24

2.1.1.7. Demografi27

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat30

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah48

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....59

2.2 Gambaran Keuangan Daerah 97

2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-202497

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 111

2.3 Permasalahan dan isu Strategis 123

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 123

2.3.2. Isu Strategis 132

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ... 143

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 143

3.1.1. Visi dan Misi 143

3.1.2. Tujuan dan Sasaran..... 147

**3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
..... 152**

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... 152

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 156

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH.....210**



4.1. Program Perangkat Daerah 210

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkalitan dengan Pelayanan Dasar.. **210**

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
..... **214**

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 283

BAB V PENUTUP 310

5.1. Pedoman Transisi 310

5.2. Kaidah Pelaksanaan 310



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan ke Dalam Desa/Kelurahan14

Tabel 2. 2 Kondisi Daya Dukung Air Tiap Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.....17

Tabel 2. 3 Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2025-2029 sesuai *Business As Usual* (BAU) Kabupaten Banjarnegara18

Tabel 2. 4 Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.....19

Tabel 2. 5 Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2029 sesuai *Business As Usual* (BAU) Kabupaten Banjarnegara.....19

Tabel 2. 6 Rata-rata Daya VA per Pelanggan di Kabupaten Baanjarnegara Tahun 2020-2024.....21

Tabel 2. 7 Pengelolaan Sampah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202423

Tabel 2. 8 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Kabupaten Banjarnegara24

Tabel 2. 9 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Banjarnegara26

Tabel 2. 10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ...27

Tabel 2. 11 Sex Ratio Kkabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....28

Tabel 2. 12 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 202428

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024.....29

Tabel 2. 14 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025 dan 203030

Tabel 2. 15 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banjarnegara 2021-202432

Tabel 2. 16 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....33

Tabel 2. 17 Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 202435

Tabel 2. 18 Capaian Rata-Rata Kemampuan Literasi / Numerasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....44

Tabel 2. 19 Persentase Benda Cagar budaya dipelihara.....46

Tabel 2. 20 Rasio Ketergantungan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-202449

Tabel 2. 21 Kontribusi Setiap Sektor Penyusun PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202449

Tabel 2. 22 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202451

Tabel 2. 23 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202452

Tabel 2. 24 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara52

Tabel 2. 25 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202454

Tabel 2. 26 Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah dan persentase)56

Tabel 2. 27 Nilai Investasi Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)56

Tabel 2. 28 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....59

Tabel 2. 29 Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Banjarnegara60

Tabel 2. 30 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....61

Tabel 2. 31 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202464

Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-202466



Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024	67
Tabel 2. 34	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	68
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024.....	69
Tabel 2. 36	Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	70
Tabel 2. 37	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sosial Tahun 2020-2024.....	71
Tabel 2. 38	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	72
Tabel 2. 39	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....	72
Tabel 2. 40	Capaian Kinerja Pangan Tahun 2020-2024.....	73
Tabel 2. 41	Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024.....	74
Tabel 2. 42	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....	74
Tabel 2. 43	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024.....	75
Tabel 2. 44	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2024	76
Tabel 2. 45	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024	76
Tabel 2. 46	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024.....	77
Tabel 2. 47	Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2020-2024.....	78
Tabel 2. 48	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	78
Tabel 2. 49	Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	79
Tabel 2. 50	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Penanaman Modal Tahun 2020-2024	80
Tabel 2. 51	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024	81
Tabel 2. 52	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024	81
Tabel 2. 53	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024	82
Tabel 2. 54	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024	82
Tabel 2. 55	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024	83
Tabel 2. 56	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024.....	83
Tabel 2. 57	Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	84
Tabel 2. 58	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024	85
Tabel 2. 59	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024	86
Tabel 2. 60	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024	87
Tabel 2. 61	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024.....	88
Tabel 2. 62	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024	88
Tabel 2. 63	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024.....	89
Tabel 2. 64	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2020-2024.....	90
Tabel 2. 65	Capaian Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024.....	90
Tabel 2. 66	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024.....	91
Tabel 2. 67	Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2020-2024.....	91
Tabel 2. 68	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024	92
Tabel 2. 69	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	93
Tabel 2. 70	Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024.....	93
Tabel 2. 71	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	96
Tabel 2. 72	Perkembangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024....	102



Tabel 2. 73 Neraca Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 106

Tabel 2. 74 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara..... 110

Tabel 2. 75 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 112

Tabel 2. 76 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2026-2030..... 114

Tabel 2. 77 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030..... 120

Tabel 2. 78 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029..... 133

Tabel 3. 1 Penjelasan Pokok Visi 143

Tabel 3. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025–2030 150

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 155

Tabel 3. 4 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026–2030 157

Tabel 3. 5 Dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap Program Delegasi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 165

Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 228

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2030..... 283

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 284

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 .. 287



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202420

Grafik 2. 2 Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202421

Grafik 2. 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202422

Grafik 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....22

Grafik 2. 5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....23

Grafik 2. 6 Skenario Penurunan Emisi GRK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029.....25

Grafik 2. 7 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202427

Grafik 2. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara...28

Grafik 2. 9 Laju Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 31

Grafik 2. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202431

Grafik 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-202433

Grafik 2. 12 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....34

Grafik 2. 13 PDRB Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)34

Grafik 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....35

Grafik 2. 15 Gini Ratio Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202436

Grafik 2. 16 Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 202436

Grafik 2. 17 Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202437

Grafik 2. 18 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ..37

Grafik 2. 19 Grafik Distribusi Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Berdasarkan Urutan Tertinggi di Wilayah Kerja Puskesmas38

Grafik 2. 20 Prevalensi Stunting Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202438

Grafik 2. 21 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....39

Grafik 2. 22 Angka Kematian Balita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202439

Grafik 2. 23 Angka Kesakitan dan Kasus Kematian DBD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202440

Grafik 2. 24 *Succes Rate* TBC dan Kematian TBC di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....41

Grafik 2. 25 Jumlah Penderita HIV di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .42

Grafik 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 43

Grafik 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .43

Grafik 2. 28 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202447

Grafik 2. 29 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202447

Grafik 2. 30 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202448

Grafik 2. 31 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-202448

Grafik 2. 32 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)49



Grafik 2. 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....51

Grafik 2. 34 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202457

Grafik 2. 35 Indeks Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2022.....57

Grafik 2. 36 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....58

Grafik 2. 37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202458

Grafik 2. 38 Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....59

Grafik 2. 39 Nilai IRB & SAKIP Kaabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....60

Grafik 2. 40 Indeks SPBE Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....61

Grafik 2. 41 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.....62

Grafik 2. 42 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-202463

Grafik 2. 43 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....63

Grafik 2. 44 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023.....64

Grafik 2. 45 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-202465

Grafik 2. 46 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)98

Grafik 2. 47 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)99

Grafik 2. 48 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)100

Grafik 2. 49 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020-2024.....101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan pembangunan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan maka perencanaan pembangunan dapat dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang mendatang. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJMN. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah yang terpilih dalam tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, RPJMD diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



daerah menuju tercapainya visi “***Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera***”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2025);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043



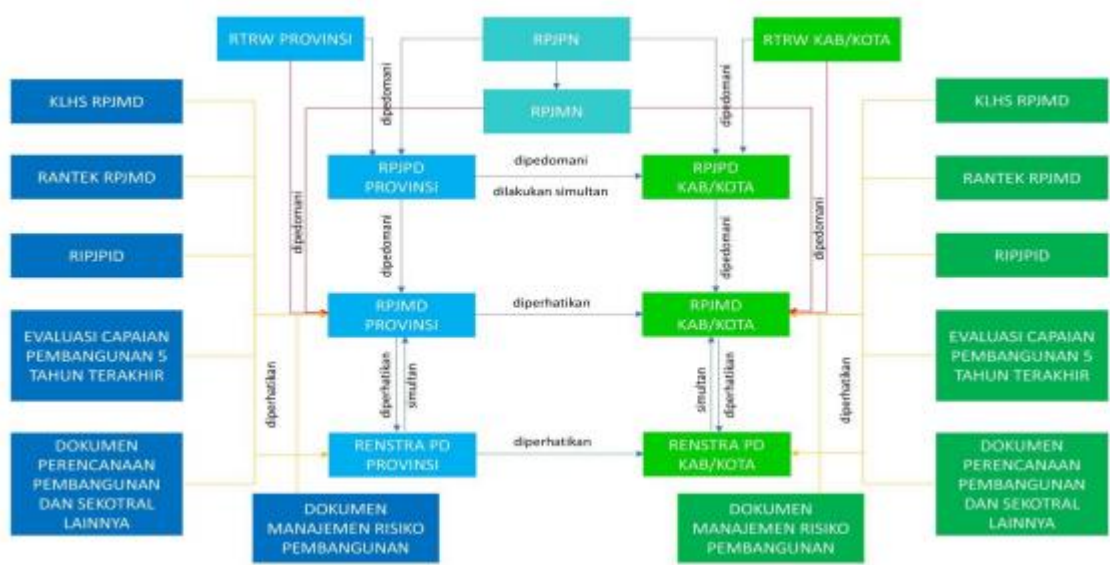
- (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan

mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024, isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, dan dokumen sektoral lainnya. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Bupati Banjarnegara beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.



1.5. **Sistematika Penulisan**

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang: 1). Gambaran umum kondisi daerah yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum; 2). Gambaran keuangan daerah, yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2029; dan 3). Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

berisi penjelasan mengenai 1). Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan 2). Strategi dan arah kebijakan, serta program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

berisi tentang daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, beserta indikator program, target, dan pagu indikatif program, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) untuk periode tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

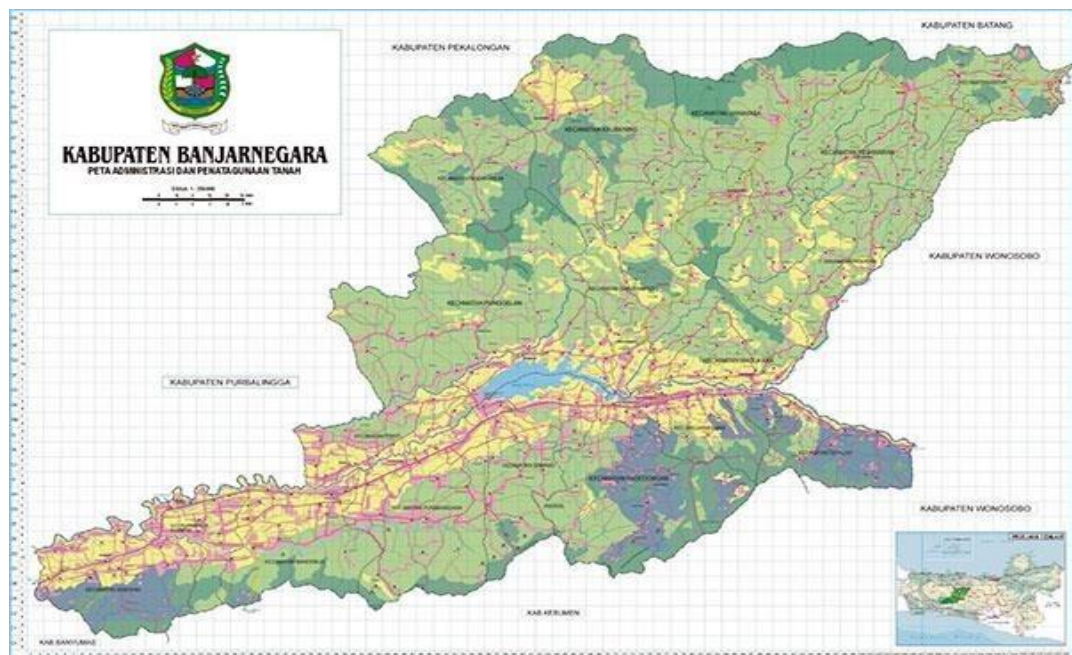
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Banjarnegara secara astronomis berada pada koordinat 7°12'–7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10"– 109°45'50" Bujur Timur. Luas Kabupaten Banjarnegara sebesar 1.144.896 km² atau sekitar 3,29 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa tengah (3,25 juta Ha). Kabupaten Banjarnegara berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- b. Sebelah timur : Kabupaten Wonosobo
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Kebumen
- d. Sebelah barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.



Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Banjarnegara

Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 266 Desa dengan pembagian wilayah administratif sebagai berikut:



Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan ke Dalam
Desa/Kelurahan

Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	RW	RT
Susukan	5.265,67	15	-	78	350
Purwareja Klampok	2.186,67	8	-	61	234
Mandiraja	5.261,58	16	-	72	386
Purwanegara	7.386,53	13	-	75	396
Bawang	5.520,64	18	-	115	405
Banjarnegara	2.624,20	4	9	84	318
Sigaluh	3.955,95	14	1	45	195
Madukara	4.820,15	18	2	74	246
Banjarmangu	4.635,61	17	-	60	279
Wanadadi	2.827,41	11	-	43	190
Rakit	3.244,62	11	-	51	277
Punggelan	10.284,01	17	-	101	427
Karangkobar	3.906,94	13	-	48	181
Pagentan	4.618,98	16	-	61	238
Pejawaran	5.224,97	17	-	71	257
Batur	4.717,10	8	-	42	176
Wanayasa	8.201,13	17		69	271
Kalibening	8.377,56	16	-	80	234
Pandanarum	5.856,05	8	-	45	133
Pagedongan	8.055,24	9	-	60	266
Total	106.971,01	266	12	1.335	5.459

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2025

Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam kawasan strategis provinsi yaitu Kawasan Wonobanjar, yang mana Kawasan Wonobanjar terdiri dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Rencana pengembangan Kawasan Wonobanjar diarahkan sebagai kawasan agropolitan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan pertanian hulu-hilir dan pertambahan nilai ekonomi komoditas pertanian. Selain itu, secara topografi Kabupaten Banjarnegara berada pada jalur pengunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100 -500 mdpl.

Sedangkan ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Banjarnegara dikelompokkan dalam tiga kelas yaitu:

1. Kelas lereng 1 (kemiringan 0-15%): 24,61% dari luas Kabupaten Banjarnegara, terdapat di daerah Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, dan Rakit.
2. Kelas lereng 2 (kemiringan di atas 15-40%): 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu daerah Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening.
3. Kelas lereng 3 (kemiringan lebih dari 40%): 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran, dan Batur.

Secara klimatologis wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sebanyak 161 mm per tahun. Kemudian secara hidrologi wilayah kabupaten Banjarnegara termasuk dalam wilayah aliran Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu, dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenil (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu.

Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Banjarnegara dan mempertimbangkan sector basis yang dilakukan dengan menganalisis PDRB menggunakan LQ dan tipologi klassen menunjukkan bahwa sector basis yang paling kuat untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Banjarnegara.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi **pengembangan tanaman Hortikultura** kurang lebih 13.779,8 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk potensi pengembangan **tanaman pangan padi sawah/padi ladang** seluas 23.452,80 hektar dengan total produksi 145.543,82 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Batur. Potensi pengembangan tanaman pangan jagung kurang lebih 9.117,30 hektar dengan total produksi 53.474 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Banjarmangu. Potensi pengembangan **tanaman pangan ubi kayu** kurang lebih 3.476 hektar dengan total produksi 90.200 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kalibening, Madukara, dan Batur. Sedangkan potensi pengembangan **tanaman pangan ubi jalar** kurang lebih 102 hektar dengan total produksi 2.138,98 Ton yang tersebar hanya di 6 kecamatan yaitu Purwanegara, Banjarnegara, Pagentan, Pejawaran, Wanayasa dan Kalibening. **Potensi pengembangan tanaman kacang tanah** seluas 534,10 hektar dengan total produksi sebesar 582,56 Ton yang tersebar di 13 kecamatan yaitu Purwareja Klampok,

Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Pagedongan, Sigaluh, Madukara, Wanadadi, Rakit, Punggelan, Karangobar, dan Pejawaran. Sedangkan potensi pengembangan **tanaman kedelai** seluas 589,10 hektar dengan total produksi sebesar 661,44 Ton yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Rakit dan Kalibening.

Potensi pengembangan **tanaman perkebunan** yang meliputi Kelapa seluas 11.085,59 hektar, Kopi seluas 1.589,53 hektar, Karet seluas 460,68 hektar, Teh seluas 1.713 hektar, Kakao seluas 208,08 hektar, Tembakau seluas 303 hektar dan Tebu seluas 15,03 hektar yang tersebar hanya di beberapa kecamatan saja untuk masing-masing jenis tanaman.

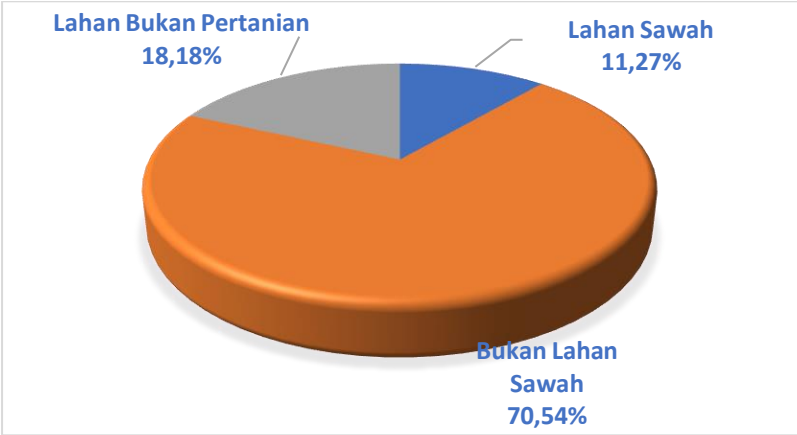
Potensi kawasan untuk **pertambangan** di Kabupaten Banjarnegara untuk kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Mineral logam terdapat di Kecamatan Banjarmangu, Pegentan, Karangobar, Batur, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, dan Susukan. Mineral bukan logam di Kabupaten Banjarnegara terdapat pula di seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara.

Potensi Kawasan peruntukan **industri** terdiri atas industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih 77,5 hektar. Industri kecil terdapat di seluruh wilayah yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara.

Potensi kawasan **pariwisata** di Kabupaten Banjarnegara meliputi kawasan wisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan wisata buatan. Kawasan pariwisata alam terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan wisata arung jeram Sungai Serayu, kawasan wisata Gunung Lawe, kawasan wisata alam Curug Pitu, kawasan wisata Curug Sikopel, kawasan wisata Gunung Mandala, kawasan wisata pemandian air panas, dan kawasan wisata hutan pinus di Kecamatan Pagedongan. Kawasan pariwisata budaya terletak di kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok, dan kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan. Kawasan pariwisata buatan terletak di kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan kawasan agrowisata hortikultura.

Dari sisi penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara menurut jenisnya pada 2024 dibagi menjadi 3 yaitu lahan sawah, bukan lahan sawah, dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah terdiri dari lahan irigasi, lahan tadah hujan, dan lahan pasang surut. Sedangkan bukan lahan sawah terdiri dari

tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lainnya, dan lahan yang tidak diusahakan dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Air

Status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Banjarnegara dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Perhitungan ketersediaan air mempertimbangkan debit andalan air permukaan yang ada di WAS Serayu Bogowonto yang mana WAS Serayu Bogowonto mempunyai debit andalan (80%) sebesar 9.209,66 juta m3/tahun, maka berdasarkan perbandingan luas WAS Serayu Bogowonto dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara maka jumlah debit air andalan yang berada di Kabupaten Banjarnegara adalah 1.430.208.276,07 m3/tahun. Berikut merupakan hasil analisis daya dukung air Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022.

Tabel 2. 2 Kondisi Daya Dukung Air Tiap Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m3/tahun)	Status DDA	Luasan Wilayah (%)	
					Surplus	Defisit
Banjarmangu	75.012.550,97	39.143.456,29	35.869.094,68	Surplus	90,43%	9,57%
Banjarnegara	48.477.135,49	20.467.024,16	28.010.111,33	Surplus	93,71%	6,29%
Batur	66.816.001,97	24.009.058,47	42.806.943,50	Surplus	99,14%	0,86%
Bawang	82.151.863,88	45.990.323,23	36.161.540,65	Surplus	86,87%	13,13%
Kalibening	122.788.535,29	49.140.529,51	73.648.005,78	Surplus	91,29%	8,71%
Karangkobar	48.368.106,45	22.479.993,03	25.888.113,43	Surplus	95,30%	4,70%
Madukara	56.043.519,83	26.444.706,07	29.598.813,76	Surplus	95,10%	4,90%
Mandiraja	74.028.076,56	52.182.479,39	21.845.597,17	Surplus	72,21%	27,79%
Pagedongan	91.606.391,11	32.814.912,42	58.791.478,69	Surplus	98,85%	1,15%
Pagentan	62.562.681,04	32.812.763,43	29.749.917,60	Surplus	95,70%	4,30%
Pandanarum	73.370.200,09	29.616.260,85	43.753.939,24	Surplus	90,46%	9,54%
Pejawaran	63.923.650,15	31.425.760,26	32.497.889,89	Surplus	97,90%	2,10%
Punggelan	137.271.826,94	63.590.316,76	73.681.510,17	Surplus	96,31%	3,69%
Purwanegara	99.783.310,81	55.596.830,76	44.186.480,05	Surplus	88,21%	11,79%
Purwareja klampok	30.543.566,24	21.742.147,37	8.801.418,88	Surplus	72,06%	27,94%
Rakit	38.988.690,89	26.047.052,41	12.941.638,49	Surplus	81,63%	18,37%



Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m3/tahun)	Status DDA	Luasan Wilayah (%)	
					Surplus	Defisit
Sigaluh	48.931.175,33	18.760.410,17	30.170.765,16	Surplus	96,91%	3,09%
Susukan	66.446.321,49	44.829.459,81	21.616.861,68	Surplus	76,44%	23,56%
Wanadadi	36.696.959,53	19.810.406,74	16.886.552,79	Surplus	82,93%	17,07%
Wanayasa	106.397.712,00	36.677.393,81	69.720.318,19	Surplus	97,81%	2,19%
Total	1.430.208.276,07	693.581.284,94	736.626.991,13	Surplus	91,21%	8,79%

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Banjarnegara, 2022

Jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan air di Kabupaten Banjarnegara pada 2021 mengindikasikan keadaan surplus dengan selisih positif 736.626.991,13 m³/tahun. Meski demikian, surplus ini tidak tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kabupaten. Jika dilihat berdasarkan luasannya maka terdapat 91,21% atau 104.396,61 Ha daya dukung air belum terlampaui dan 8,79% atau 10.064,13 Ha sudah terlampaui.

Berikut disajikan proyeksi daya dukung air selama 5 tahun ke depan:

Tabel 2. 3 Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2025-2029 sesuai *Business As Usual* (BAU) Kabupaten Banjarnegara

Uraian (m3/tahun)	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan Air Wilayah Sungai	1.391.881.439,63	1.379.105.827,48	1.366.330.215,33	1.350.554.603,18	1.340.778.991,03
Kebutuhan Air Toal (Domestik + Pertanian)	694.883.165,24	695.317.125,34	695.751.085,43	696.185.045,53	696.619.005,63
Selisih	696.998.274,39	683.788.702,14	670.579.130	654.369.558	644.159.985
DDA	2,00	1,98	1,96	1,94	1,92

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung air hingga tahun 2029, menghasilkan kondisi air masih dalam keadaan surplus atau belum terlampaui. Apabila daya dukung air berjalan sesuai dengan *business as usual* (BAU), maka dapat dipastikan daya dukung air akan mengalami penurunan dari 2,00 pada tahun 2025 menjadi 1,92 di tahun 2029. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan jumlah ketersediaan air permukaan dan juga peningkatan jumlah kebutuhan air untuk domestik. Untuk mempertahankan atau mengurangi penurunan daya dukung air di Kabupaten Banjarnegara, dapat dilakukan 2 (dua) skenario, yaitu dengan mempertahankan jasa lingkungan hidup pengatur tata air, dan dengan mempertahankan jasa lingkungan hidup pengatur tata air serta melakukan penghematan air untuk pertanian sebesar 20%.

2. **Daya Dukung Pangan**

Perhitungan daya dukung pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan utama berupa beras dan juga jumlah rata-rata konsumsi beras per kapita dimana nilai yang digunakan adalah 0,00754 ton/tahun/kapita sesuai



dengan perhitungan daya dukung pangan. jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan pangan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 menunjukkan kondisi surplus (+). Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan antara ketersediaan pangan yang lebih besar daripada dengan kebutuhannya. Berikut merupakan hasil analisis daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2022.

**Tabel 2. 4 Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan Pangan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022**

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton /tahun)	Status DDP	Luasan (%)	
					Surplus	Defisit
Banjarmangu	5.288,81	4.206,46	1.082,35	Surplus	80,48%	19,52%
Banjarnegara	3.374,69	3.207,20	167,49	Surplus	72,93%	27,07%
Batur	5.215,45	2.905,79	2.309,66	Surplus	91,66%	8,34%
Bawang	5.937,19	4.912,24	1.024,95	Surplus	77,93%	22,07%
Kalibening	8.434,16	4.756,59	3.677,57	Surplus	91,91%	8,09%
Karangkobor	3.652,13	2.590,54	1.061,60	Surplus	85,04%	14,96%
Madukara	4.241,16	3.402,52	838,64	Surplus	79,56%	20,44%
Mandiraja	5.112,30	5.166,61	-54,32	Defisit	68,21%	31,79%
Pagedongan	6.519,26	4.076,78	2.442,47	Surplus	87,15%	12,85%
Pagentan	4.980,50	3.348,69	1.631,81	Surplus	88,05%	11,95%
Pandanarum	4.822,56	2.629,40	2.193,16	Surplus	93,22%	6,78%
Pejawaran	5.609,35	3.515,61	2.093,74	Surplus	88,95%	11,05%
Punggeln	9.861,36	7.201,60	2.659,75	Surplus	83,38%	16,62%
Purwanegara	7.355,81	6.430,93	924,88	Surplus	75,37%	24,63%
Purwareja klampok	2.211,36	2.643,29	-431,94	Defisit	62,57%	37,43%
Rakit	3.009,37	3.078,20	-68,84	Defisit	64,47%	35,53%
Sigaluh	3.475,92	2.505,15	970,77	Surplus	83,84%	16,16%
Susukan	4.880,95	4.397,28	483,67	Surplus	74,59%	25,41%
Wanadadi	2.624,27	2.008,49	615,78	Surplus	77,70%	22,30%
Wanayasa	8.045,63	4.285,43	3.760,20	Surplus	92,55%	7,45%
Total	104.652,20	77.268,82	27.383,39	Surplus	82,71%	17,29%

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Banjarnegara, 2022

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata semua kecamatan di Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah dengan kondisi surplus (+) dengan persentase lebih dari 70%, namun terdapat kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami defisit (-) lebih dari 50% dari luas wilayah kecamatannya, yaitu Kecamatan Mandiraja (2.780,60 Ha atau 51,11%) dan Purwareja klampok (1.206,14 Ha atau 50,92%).

Berikut disajikan proyeksi daya dukung pangan selama 5 tahun ke depan:

**Tabel 2. 5 Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2029 sesuai
Business As Usual (BAU) Kabupaten Banjarnegara**

Uraian (m3/tahun)	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan Pangan	96.142,44	93.305,86	90.469,27	87.632,69	84.796,10
Kebutuhan Pangan	79.821,44	80.672,32	81.523,19	82.374,07	83.224,94
Selisih	16.321,00	12.633,54	8.946,08	5.258,62	1.571,16
DDP	1,20	1,16	1,11	1,08	1,02

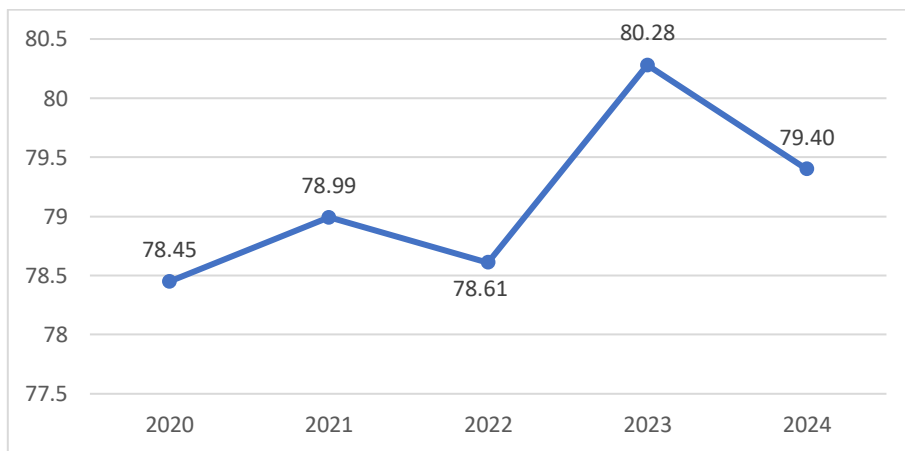
Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung pangan, secara keseluruhan wilayah Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun ke depan masih dalam keadaan surplus pangan atau daya dukung pangan masih belum terlampaui. Untuk mempertahankan atau meningkatkan daya dukung pangan pada tahun 2029 dapat dilakukan melalui pengendalian untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan tingkat rendeman dari gabah kering panen menjadi gabah kering giling, dan penurunan tingkat penyusutan saat penggilingan.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Meski pada tahun 2024 indeks ketahanan pangan kembali sedikit menurun menjadi 79,40, nilainya masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa ketahanan pangan tetap berada dalam kondisi yang baik. Secara keseluruhan, tren selama lima tahun ini mencerminkan bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki ketahanan pangan yang cukup stabil dan terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu.



Sumber: Badan Pangan Nasional

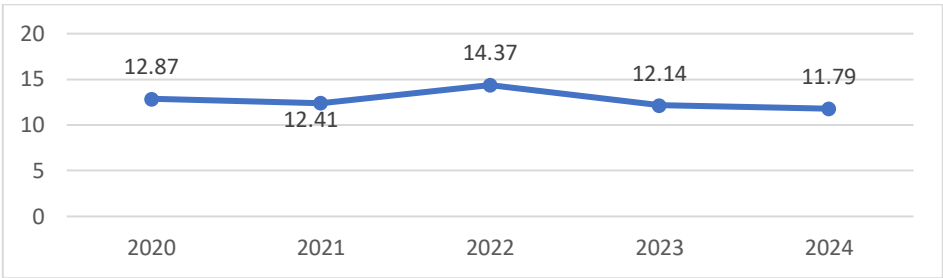
Grafik 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Banjarnegara mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 14,37 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2024, prevalensi kembali menurun menjadi 11,79 persen. Penurunan ini menunjukkan semakin terpenuhinya asupan energi harian yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan aktif masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang menurun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu adanya peningkatan produksi dan aksesibilitas pangan, penurunan penduduk miskin, dan intervensi pemerintah yang efektif dalam



bidang ketahanan pangan. Berikut grafik PoU selama 5 tahun terakhir Kabupaten Banjarnegara:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2. 2 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. **Konsumsi Listrik Per Kapita**

Kebutuhan energi Listrik Kabupaten Banjarnegara dilayani melalui PLN ULP Banjarnegara. Secara umum konsumsi listrik di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan daya terpasang maupun jumlah pelanggan PLN yang terdaftar.

Tabel 2. 6 Rata-rata Daya VA per Pelanggan di Kabupaten Baanjarnegara Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	capaian 2022	2023	2024
1	Jumlah pelanggan listrik	259.194	271.309	279.723	289.402	298.319
2	Daya terpasang	176.642	216.549.430	226.555.380	235.186.030	244.650.030
3	Rata-rata daya VA per pelanggan	0,682	798,17	809,93	812,66	820,10

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka

Secara umum konsumsi listrik di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan denan adanya peningkatan daya terpasang maupun jumlah pelanggan PLN yang terdaftar. Konsumsi Listrik di Kabupaten Banjarnegara jga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis penggunaannya sebagai berikut.

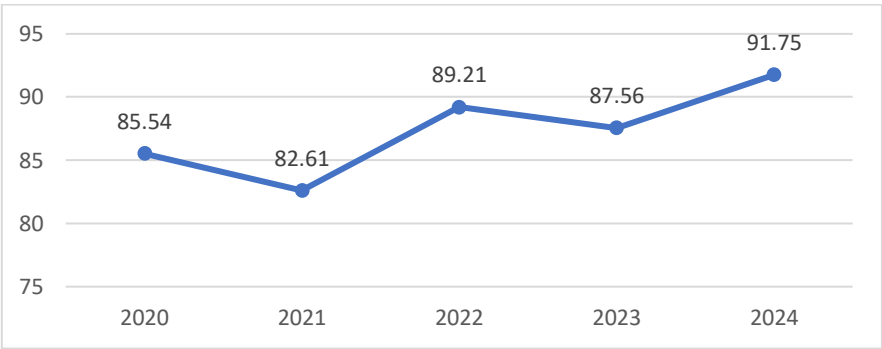
Tabel 2. 7 Jumlah Pelanggan dan Daya Terpasang Berdasarkan Kategori Penggunaan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2024

No	Kategori	2021		2022		2023		2024	
		Pelanggan	Daya Terpasang	Pelanggan	Daya Terpasang	Pelanggan	Daya Terpasang	Pelanggan	Daya Terpasang
1	Sosial	7.961	10.415.750	8.318	11.254.500	8.684	12.015.050	9.053	13.123.650
2	Rumah Tangga	251.214	165.936.150	258.193	170.433.250	266.300	175.776.600	273.626	180.921.900
3	Bisnis	9.660	25.444.500	10.707	29.407.300	11.879	32.656.300	13.026	35.828.150
4	Industri	103	9.601.400	118	10.228.500	125	9.392.900	134	9.246.400
5	Publik	2.361	5.096.630	2.377	5.176.830	2.404	5.290.180	2.470	5.474.930
6	Layanan Khusus	10	55.000	10	55.000	10	55.000	10	55.000
Kabupaten Banjarnegara		271.309	216.549.430	279.723	226.555.380	289.402	235.186.030	298.319	244.650.030

sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

4. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Banjarnegara secara umum mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya upaya dari pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan air minum bagi masyarakat.



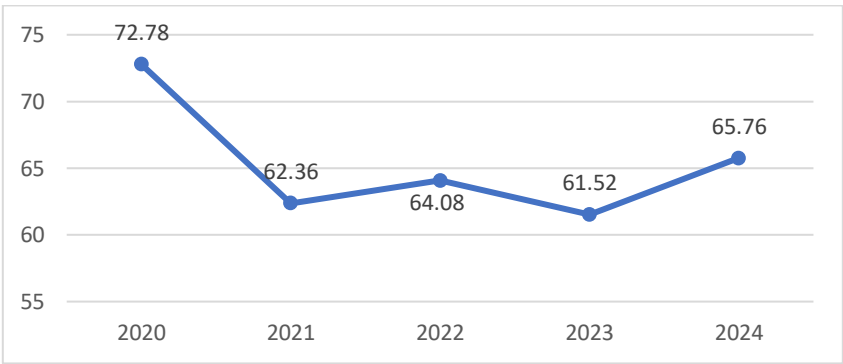
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 2. 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dikatakan dalam kondisi yang kurang baik, secara data menunjukkan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup, yang diantaranya dipengaruhi oleh sedimentasi pada dataran tinggi Dieng, kerusakan yang ditimbulkan akibat galian C, serta kerusakan lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap IKLH.



Sumber: DPKPLH Kab.Banjarnegara

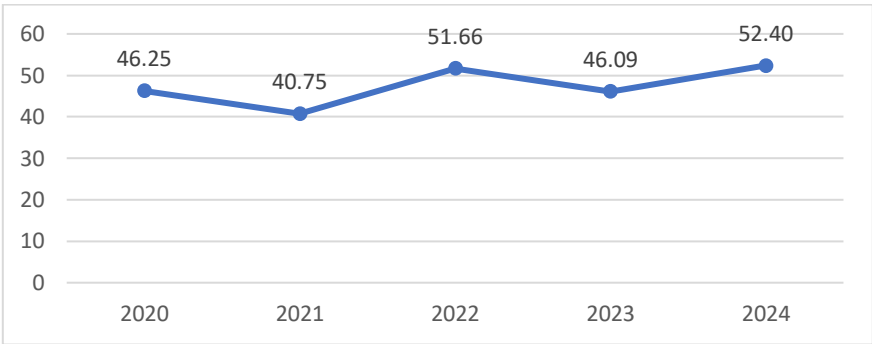
Grafik 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan fluktuasi selama tahun 2020–2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses terhadap sanitasi



layak di Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi berbagai dinamika. Meskipun secara umum terdapat kecenderungan peningkatan, terutama dari 2021 hingga 2024, kestabilan capaian ini masih perlu diperkuat. Akses sanitasi yang aman dan layak sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tentang sanitasi dan kebersihan untuk semua.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 2. 5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang belum sepenuhnya konsisten, baik dari sisi pengolahan, pengurangan, maupun penanganan sampah. Meskipun upaya penanganan sampah mengalami peningkatan, pengurangan sampah melalui 3R dan pemanfaatan fasilitas pengolahan masih menjadi tantangan besar. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, tidak hanya mengandalkan pengumpulan, tetapi juga memperkuat edukasi, infrastruktur 3R, serta sisem monitoring dan evaluasi pengolahan sampah.

Tabel 2. 8 Pengelolaan Sampah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	NA	NA	NA	35,09	NA
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	32,20	22,99	55,00	20,00	20,00
Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	11,22	76,33	77,00	77,64	72,32

Sumber: DPKPLH Kab. Banjarnegara

Berikut capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024:

Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Kinerja Pengelolaan Sampah	Capaian
Timbulan sampah tahunan (ton/tahun)	155.978,66
Pengurangan sampah tahunan (ton/tahun)	339,41



Kinerja Pengelolaan Sampah	Capaian
Pengurangan sampah (%)	0,22
Penanganan sampah tahunan (ton/tahun)	20.436,35
Penanganan sampah (%)	13,10
Sampah terkelola tahunan (ton/tahun)	20.775,76
Sampah terkelola (%)	13,32
Daur ulang sampah tahunan (ton/tahun)	24,64

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup

Data kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah tahunan yang sangat besar, tingkat pengurangan dan penanganannya masih tergolong rendah. Pengurangan sampah hanya mencapai 0,22% dari total timbulan, menandakan bahwa upaya preventif seperti pengurangan dari sumber, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, atau program 3R belum berjalan optimal. Penanganan sampah baru mencakup 13,10% dari total timbulan, dan sampah yang berhasil terkelola sebesar 13,32%, menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih belum tertangani secara memadai. Daur ulang juga sangat minim, hanya sebagian kecil dari sampah yang berhasil diolah kembali. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Jika tren ini berlanjut, potensi pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat dapat meningkat, sehingga dibutuhkan strategi terpadu yang menguatkan kapasitas pengelolaan dan memperluas edukasi serta keterlibatan publik.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Berdasarkan data AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon), Kabupaten Banjarnegara mencatat pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 454.030 Ton CO₂eq selama periode 2019-2023. Sektor energi memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan ini, khususnya melalui program pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor yang menyumbang pengurangan hingga 334.020 Ton CO₂eq. Berikut rincian kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2. 10 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Kabupaten Banjarnegara

Kegiatan	Potensi Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)	Kategori
Sektor Energi	454.020	
Car Free Day	-	Hari Bebas Kendaraan
Operasional Pengawasan Pengamanan, Penertiban, Pengendalian Lalu Lintas	-	Pendukung
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	334.020	Smart Driving

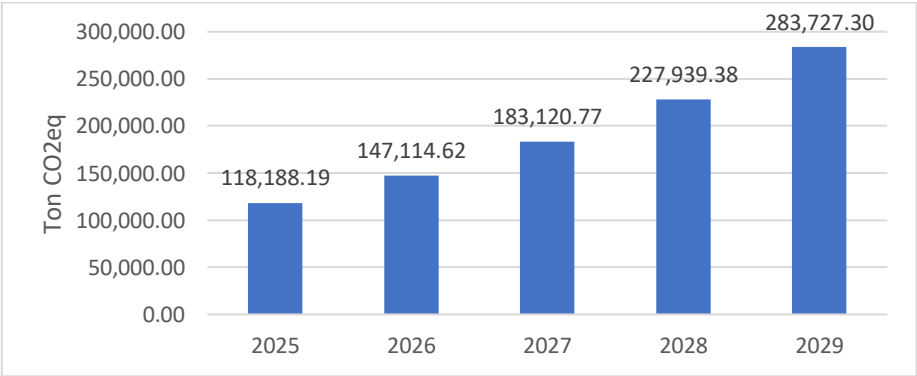


Kegiatan	Potensi Penurunan Emisi (Ton CO2eq)	Kategori
Penerapan Manajemen Parkir	-	Penerapan Manajemen Parkir
Pengujian Kendaraan Bermotor	120.000	Lain-lain
Sektor Lahan	10	
Penguatan Ekonomi Masyarakat	10	Penggunaan Pupuk Organik
Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya hutan	-	Prasyarat
Sektor Limbah	-	
Kajian Bank Sampah	-	Pendukung
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	-	TPA
Optimalisasi Pokja AMPL	-	Pendukung
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	-	Pendukung
Total Penurunan Emisi GRK	454.030	

Sumber: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon

Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang telah diterima pada platform AKSARA dari periode 2010-sekarang. Terdapat 26 total kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan. kemudian untuk total potensi penurunan emisi kumulatif Kabupaten Banjarnegara sebesar 113.667,85 ton CO2eg. Adapun persentase kontribusi pada capaian provinsi sebesar 0,77%.

Aktivitas manusia dan konversi lahan telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak serius terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Sebagai upaya mitigasi, Kabupaten Banjarnegara perlu mengimplementasikan berbagai tindakan penurunan emisi GRK di sektor energi, AFOLU, IPPU, dan limbah. Langkah-langkah mitigasi ini ditargetkan untuk mencapai komitmen yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 283.727,30 Ton CO2eq hingga tahun 2029. Berikut merupakan skenario target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif Kabupaten Banjarnegara periode 2025-2029.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029

Grafik 2. 6 Skenario Penurunan Emisi GRK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029



Terdapat beberapa aksi mitigasi yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca yaitu:

Tabel 2. 11 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Banjarnegara

Sektor	Aksi Mitigasi
Sektor Energi	• Upaya peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum • Percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai terutama pada fasilitas kendaraan pemerintah • Penyediaan jalur sepeda untuk dimanfaatkan publik dalam berkendara dengan menggunakan sepeda
Sektor IPPU (Industrial Proses dan Product Use)	• Efisiensi energi baik pada proses produksi maupun operasional industri • Audit energi secara berkala • Penerapan produksi bersih dari hulu sampai hilir
Sektor AFOLU (Agriculture Forestry and Other Land Use)	• Sistem pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan penggunaan material organik • Budidaya padi rendah emisi dengan memodifikasi jenis pengairan dan penggunaan bibit padi rendah emisi • Pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian • Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan • Meningkatkan RTH privat melalui Kerjasama dengan pengembang perumahan
Sektor Limbah	• Peningkatan upaya daur ulang sampah (recycling rate), serta penerapan metode sanitary landfill pada tempat pemrosesan akhir sampah. • Peningkatan layanan pengelolaan sampah untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan maupun dibakar • Mengoptimalkan septik tank plus dan IPAL untuk air limbah domestik • Pemanfaatan biogas • Sosialisasi pelaku usaha dengan standar tentang pengolahan limbah cair

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Banjarnegara Tahun 2025-2029

2. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks risiko bencana mengukur tingkat kebencanaan berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring dengan adanya perubahan pada komponen tersebut. Indeks risiko bencana Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan bertahan pada kelas risiko sedang. Kondisi ini menunjukkan kapasitas penanggulangan yang dilakukan Kabupaten Banjarnegara semakin baik, mengingat secara geografis Kabupaten Banjarnegara juga berada di daerah yang rawan terjadi bencana. Berikut disajikan nilai IRB Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020-2024.



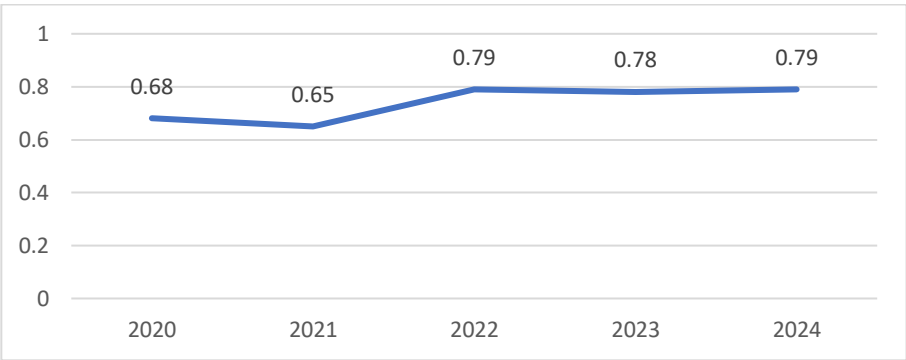
Tabel 2. 12 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
IRB	127,36	127,36	107,61	121,4	103,28
Kelas Risiko	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Banjarnegara

3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat untuk mengukur ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang dapat terjadi. Nilai IKD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 adalah sebesar 0,79 sehingga termasuk dalam kategori sedang sehingga perlu adanya upaya peningkatan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana di daerah. Berikut ini grafik perkembangan IKD selama tahun 2020-2024.



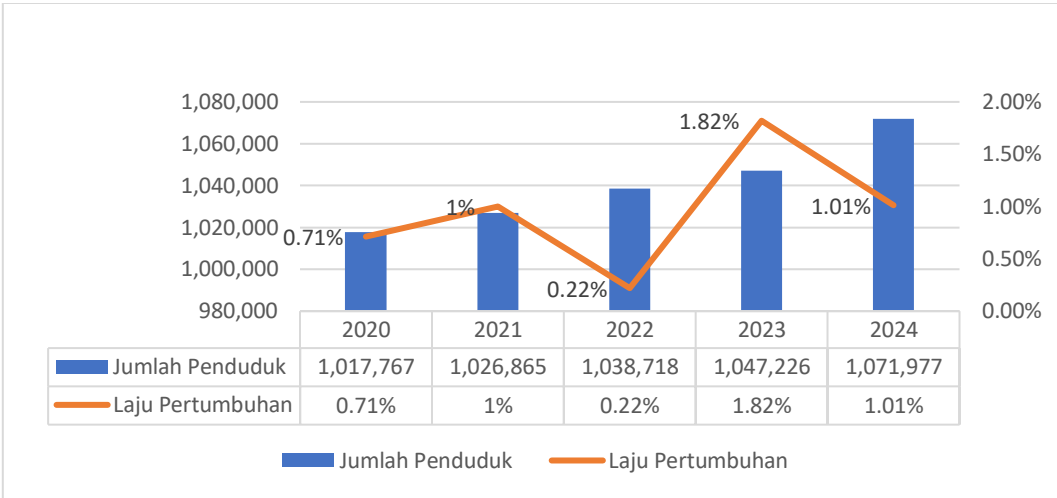
Sumber: BPBD Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 7 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.1.7. Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sejumlah 1.071.977 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,01% per tahun. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk yang masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Banjarnegara. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Data penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Sumber: Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara

2. Rasio Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 didominasi oleh laki-laki sehingga *Sex Ratio* (Rasio Jenis Kelamin) selalu di atas 100, dimana pada tahun 2024 sex ratio mencapai 103,62. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2. 13 Sex Ratio Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	517.056	521.576	521.576	531.338	545.513
Perempuan	500.711	505.289	517.142	515.888	526.464
Jumlah Penduduk	1.017.767	1.026.865	1.038.718	1.047.226	1.071.977
Sex Ratio	103,26	103,22	100,86	102,99	103,62

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
SUSUKAN	52,66	65.701	1.247,72
PURWAREJA KLAMPOK	21,87	49.433	2.260,65
MANDIRAJA	52,61	83.462	1.586,25
PURWANEGARA	73,86	86.779	1.174,83
BAWANG	55,25	66.749	1.209,08
BANJARNEGARA	26,24	71.458	2.723,04
SIGALUH	39,56	33.103	836,79
MADUKARA	48,2	47.308	981,46
BANJARMANGU	46,36	47.839	1.031,99
WANADADI	28,27	35.704	1.262,78
RAKIT	32,45	56.974	1.755,95
PUNGGELAN	102,84	92.945	903,78
KARANGKOBAR	39,07	33.174	849,10
PAGENTAN	46,19	40.649	880,04



Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
PEJAWARAN	52,25	46.830	896,27
BATUR	47,17	43.383	919,70
WANAYASA	82,01	52.542	640,67
KALIBENING	83,78	49.188	587,14
PANDANARUM	58,56	23.822	406,79
PAGEDONGAN	80,51	44.934	557,77
Jumlah	1.069,71	1.071.977	1.002,11

Sumber: Dindikcapil Kab. Banjarnegara

Secara umum tingkat kepadatan penduduk pada Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 1.002,11 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, rata-rata dihuni oleh sekitar 1.003 jiwa.

4. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Banjarnegara terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Total (jiwa)
	L	P	
0 - 4	31.280	29.407	60.687
5- 9	42.678	40.093	82.771
10-14	44.481	41.817	86.298
15 - 19	38.174	36.577	74.751
20 - 24	41.416	40.105	81.521
25 - 29	40.243	37.884	78.127
30 - 34	41.775	39.457	81.232
35 - 39	40.060	37.519	77.579
40 - 44	43.079	41.204	84.283
45 - 49	37.124	36.400	73.524
50 - 54	33.461	33.754	67.215
55 - 59	30.669	31.938	62.607
60 - 64	26.690	27.455	54.145
65 - 69	20.625	20.209	40.834
70 - 74	15.106	13.875	28.981
≥ 75	16.619	17.173	33.792
Jumlah	543.480	524.867	1.068.347

Sumber: Dindikcapil Kab. Banjarnegara

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjarnegara saat ini sebesar 46,25% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menunjukkan



bahwa struktur kependudukan di Kabupaten Banjarnegara memiliki proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar.

5. **Proyeksi Penduduk**

Pada tahun 2025 dan 2030 jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara diproyeksikan meningkat dengan jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada sebagian besar kelompok umur. Hal ini menunjukkan bahwa sex ratio hingga 5 tahun kedepan masih condong ke arah laki-laki. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara tahun 2030 sebanyak 1.113.012 jiwa yang diproyeksikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025 dan 2030

Kelompok Usia (tahun)	2025		2030	
	L	P	L	P
0 - 4	42.900	41.182	41.053	39.407
5 - 9	37.821	36.659	42.949	41.158
10 - 14	39.698	37.815	37.956	36.745
15 - 19	40.113	37.976	39.662	37.917
20 - 24	39.859	37.700	39.813	37.830
25 - 29	40.761	37.444	40.440	37.475
30 - 34	42.896	40.084	41.361	37.367
35 - 39	41.154	39.051	42.861	40.117
40 - 44	40.086	38.641	41.066	38.994
45 - 49	36.771	35.730	39.916	38.480
50 - 54	33.679	33.837	36.392	35.483
55 - 59	30.037	30.249	32.621	33.316
60 - 64	25.303	26.319	28.212	29.306
65 - 69	20.473	21.254	22.709	24.748
70 - 74	14.731	15.540	17.083	18.935
≥ 75	15.009	16.934	18.749	22.891
Jumlah	541.291	526.415	562.843	550.169

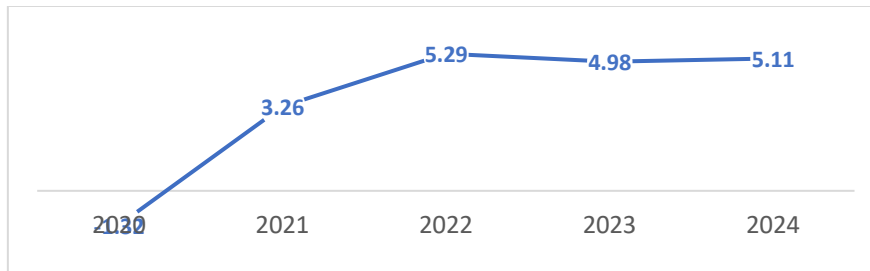
Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

2.1.2 **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

2.1.2.1 **Kesejahteraan Ekonomi**

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui **Pertumbuhan Ekonomi**. Pada tahun 2021-2024 Banjarnegara menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan pada tahun 2024 mencapai 5,11%, Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki daya tahan dan adaptasi ekonomi yang baik serta mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif stabil bahkan dalam konteks tantangan ekonomi nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir disajikan dalam grafik sebagai berikut.



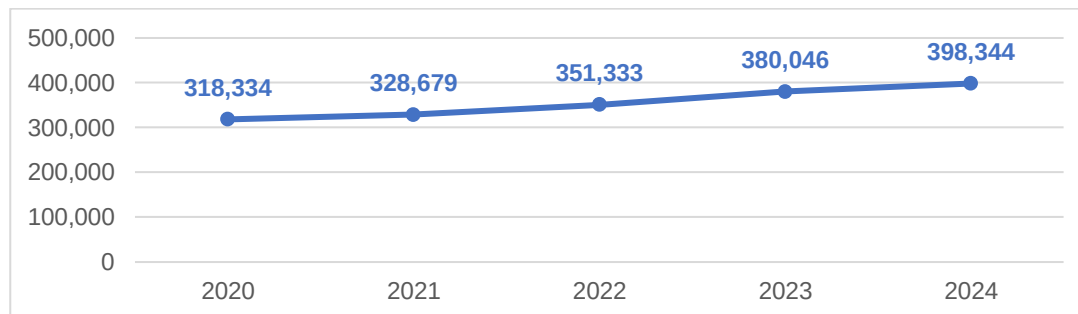
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 9 Laju Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Tingkat Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan (GK)

Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.



Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Garis kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 dari tahun 2020-2024 selalu mengalami kenaikan dimana pada tahun 2024 Garis Kemiskinan mencapai Rp.398.344. Kenaikan garis kemiskinan yang stabil dari tahun ke tahun ini mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam penentuan standar kehidupan minimal masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, terus mengalami peningkatan.

b. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Selama lima tahun terakhir angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Tabel 2. 17 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banjarnegara 2021-2024

Kemiskinan Ekstrem			Tahun			
			2021	2022	2023	2024
Persentase	Penduduk	Miskin Ekstrem	3,95%	1,53%	1,50%	NA
Jumlah	Keluarga	Miskin Ekstrem Desil 1	NA	44.323	46.020	45.768
Jumlah	Individu	Miskin Ekstrem Desil 1	NA	190.384	197.049	194.531

Sumber: SiPerindu BKKBN dan Baperlitbang Kab. Banjarnegara

Penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara dari 3,95% pada tahun 2021 menjadi 1,50% pada tahun 2023 menunjukkan tren positif. Meskipun secara statistik terjadi penurunan yang signifikan sebesar 2,45 poin persentase dalam dua tahun, angka 1,50% pada tahun 2023 masih merepresentasikan ribuan jiwa yang hidup dalam kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

Stagnasi angka kemiskinan ekstrem pada level 1,50% antara tahun 2022-2023 mengindikasikan bahwa kelompok ini merupakan masyarakat miskin kronis yang memerlukan intervensi khusus dan tidak dapat diatasi hanya melalui program-program konvensional. Kelompok ini kemungkinan terdiri dari lansia tanpa jaminan sosial, penyandang disabilitas, rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, dan keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis. Tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banjarnegara juga terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, keterbatasan keterampilan dan pendidikan, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.

Adapun untuk tahun 2024, terjadi sedikit penurunan baik dalam jumlah keluarga (menjadi 45.768) maupun individu (menjadi 194.531), namun belum signifikan untuk menyamai atau melampaui capaian 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan di Banjarnegara perlu evaluasi menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, mengingat fluktuasi angka ini dapat menunjukkan ketidakstabilan kondisi ekonomi rumah tangga miskin ekstrem.

c. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik, dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada awal periode yang kemudian diikuti dengan tren penurunan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020-2021 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan pendapatan masyarakat. Namun, penurunan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024 mengindikasikan keberhasilan program pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan



pemerintah daerah, seperti bantuan sosial tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, dan program padat karya. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2020-2024.

Tabel 2. 18 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

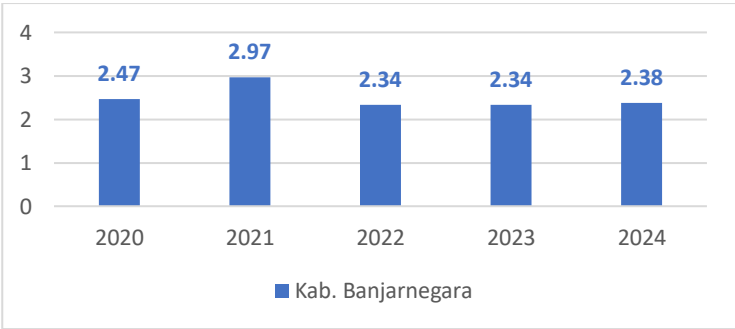
Tahun	Penduduk Miskin	
	Ribu Jiwa	(%)
2020	144,95	15,64
2021	150,19	16,23
2022	141,25	15,20
2023	138,99	14,90
2024	137,68	14,71

Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Pada tahun 2024 persentase kemiskinan Kabupaten Banjarnegara merupakan tertinggi kedua di kawasan Barlingmascakeb. Hal ini mencerminkan tantangan struktural yang kompleks. Faktor geografis yang didominasi pegunungan dan perbukitan membatasi produktivitas pertanian dan aksesibilitas ekonomi. Topografi yang sulit menyebabkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan distribusi, sehingga menghambat konektivitas ekonomi dengan pusat-pusat pertumbuhan.

d. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

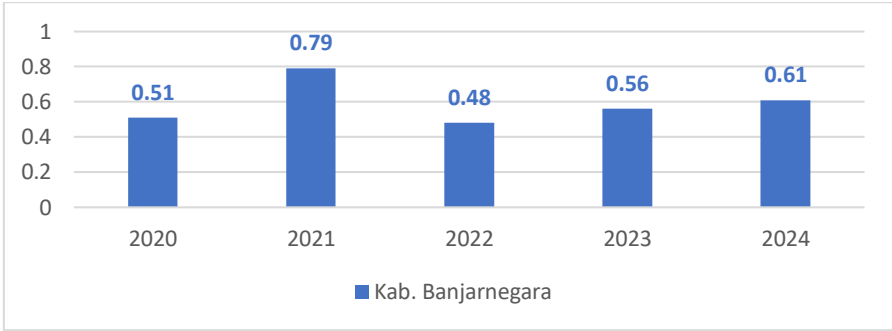
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)** Kabupaten Banjarnegara cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan peningkatan yang berarti semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat statistik

Grafik 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024 juga mempunyai trend fluktuatif, dimana pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,61 dan termasuk kategori indeks keparahan tinggi yang disajikan pada grafik berikut ini:

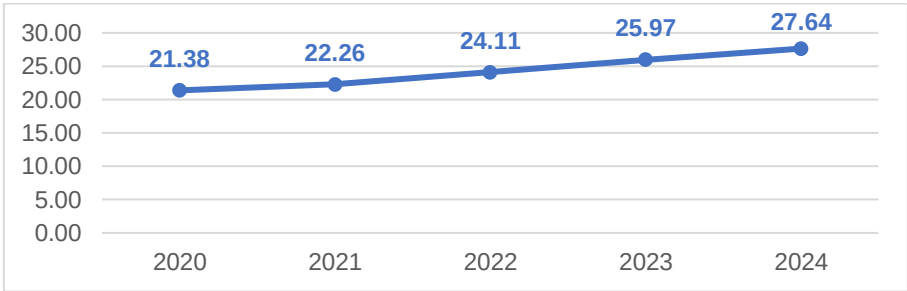


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2. 12 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat atau tingkat pendapatan meningkat selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah

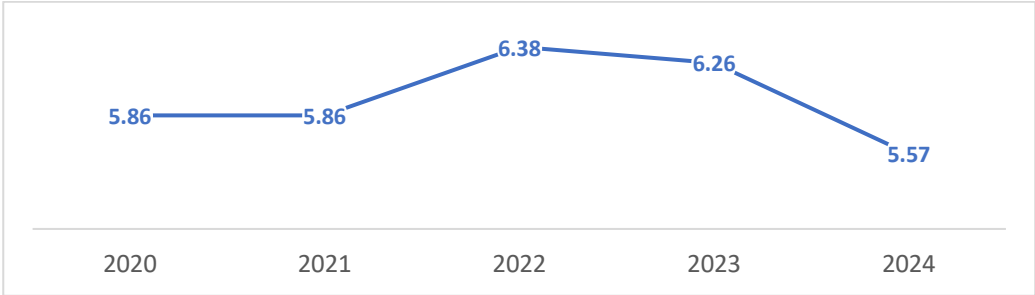
Grafik 2. 13 PDRB Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di



Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan yang paling menggembirakan terjadi pada tahun 2024, di mana TPT turun signifikan menjadi 5,57%, bahkan lebih rendah dari level pra-pandemi. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, keberhasilan program ketenagakerjaan, peningkatan investasi, dan diversifikasi ekonomi daerah yang mulai menunjukkan hasil positif. Meskipun tren menurun di tahun terakhir memberikan optimisme, tingkat pengangguran yang masih di atas 5% mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan keterampilan angkatan kerja untuk mengatasi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja Kabupaten Banjarnegara. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

5. **Partisipasi Angkatan Kerja**

Partisipasi Angkatan Kerja menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Indikator ini saling berkaitan dengan tingkat pengangguran memberikan gambaran tentang dinamika pasar tenaga kerja serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Berikut ini disajikan data jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024.

Tabel 2. 19 Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	364.832	239.946	604.778
	a. Bekerja	384.306	222.812	571.118
	b. Pengangguran terbuka	16.526	17.134	33.660
2	Bukan Angkatan Kerja	52.379	166.985	219.364
	a. Sekolah	22.396	24.439	46.835

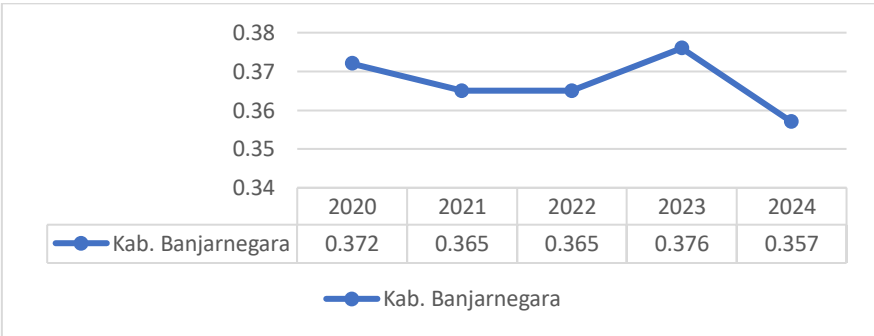


No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	b. Mengurus rumah tangga	6.108	132.017	138.125
	c. Lainnya	23.875	10.529	34.404

Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

6. Indeks Gini

Indeks Gini mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Jika semakin tinggi indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan pada suatu daerah. Indeks gini pada tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan akibat kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan sektor ekonomi berbasis desa, program bantuan sosial, dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Berikut disajikan perbandingan grafik rasio gini Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional.

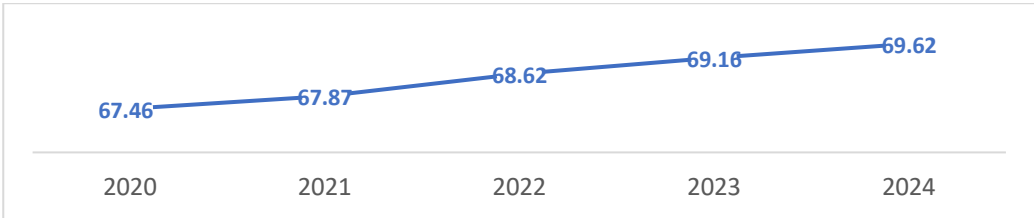


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2. 15 Gini Ratio Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024 mengalami trend kenaikan, dari posisi awal pada 2020 sebesar 67,48 dan pada tahun 2024 berada di angka 69,62, terjadi kenaikan 2,14 poin selama 5 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



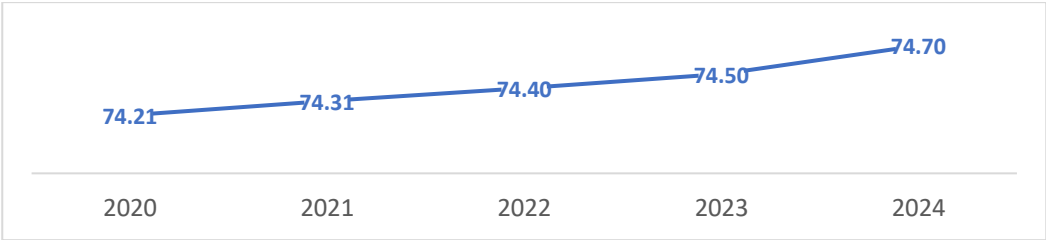
Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 16 Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2024

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Hal ini dapat diartikan pula sebagai banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. UHH ini merupakan salah satu komponen penyusun IPM. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2024 mencapai 74,70. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk terus membaik,

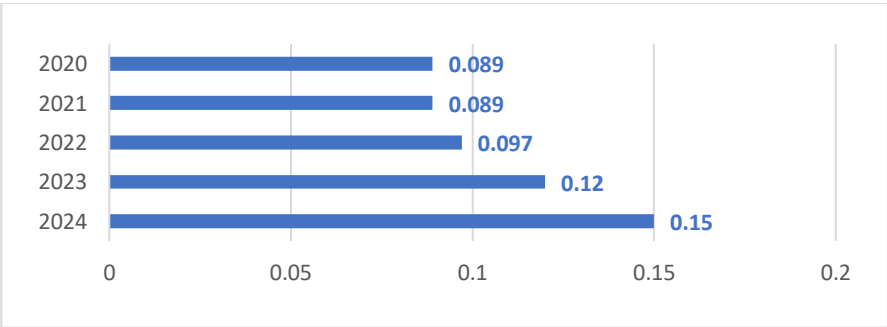


Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 17 Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

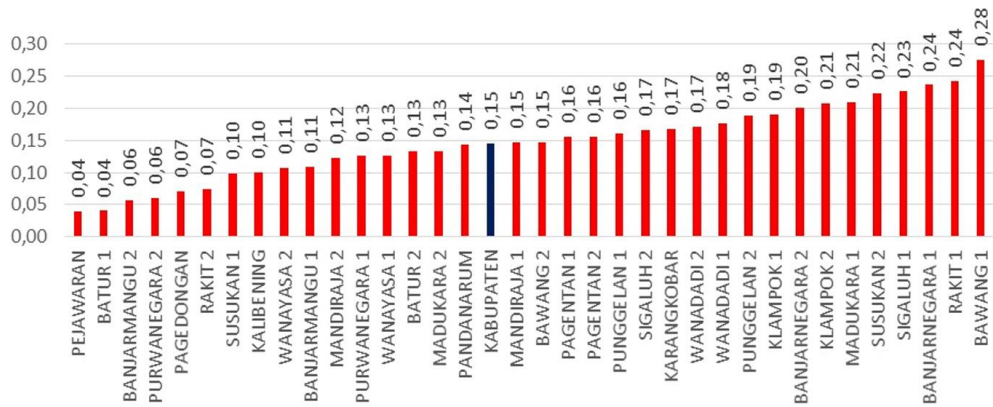
Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Indeks keluarga sehat kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kesehatan keluarga di Kabupaten Banjarnegara semakin membaik. Walaupun demikian, nilai IKS Kabupaten Banjarnegara masih sangat rendah sehingga perlu adanya upaya signifikan untuk mewujudkan keluarga sehat. Perkembangan Indeks Keluarga Sehat dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 18 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Adapun untuk distribusi Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 berdasarkan urutan tertinggi di wilayah kerja puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut:



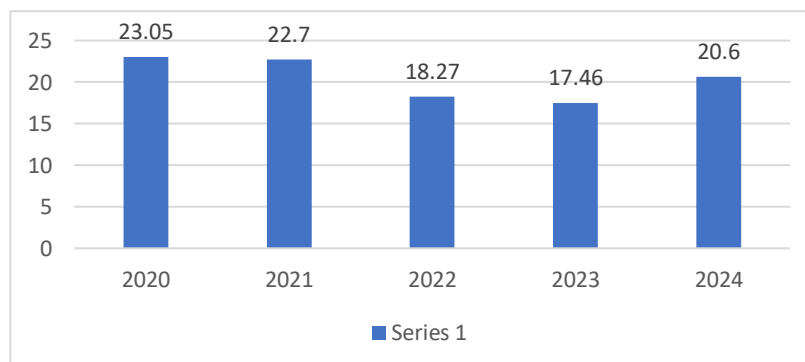
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 19 Grafik Distribusi Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Berdasarkan Urutan Tertinggi di Wilayah Kerja Puskesmas

Terdapat 5 puskesmas dari 35 puskesmas di Kabupaten Banjarnegara dengan Indeks Keluarga Sehat paling rendah yaitu, Puskesmas Pejawaran (0,04), Puskesmas Batur 1 (0,04), Puskesmas Banjarmangu 2 (0,06), Puskesmas Purwanegara 2 (0,06), Puskesmas Pagedongan (0,07). Adapun 5 puskesmas dengan Indeks Keluarga Sehat paling tinggi yaitu Puskesmas Bawang 1 (0,28), Puskesmas Rakit 1 (0,24), Puskesmas Banjarnegara 1 (0,24), Puskesmas Sigaluh 1 (0,23) dan Puskesmas Susukan 2 (0,22).

3. Prevalensi Stunting

Stunting terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada ibu hamil maupun bayi dan balita serta remaja. Terdapat tren penurunan yang positif menjadi 17,46% pada tahun 2023. Angka prevalensi yang masih di atas 20% mengindikasikan perlunya intensifikasi program pencegahan dan penanganan stunting, termasuk edukasi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

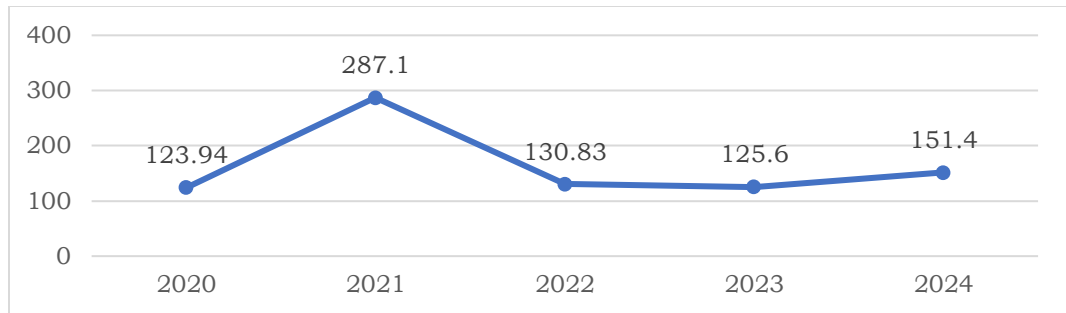


Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 20 Prevalensi Stunting Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) mencakup seluruh kematian wanita yang terjadi selama kehamilan, saat melahirkan, dan periode nifas yang diakibatkan oleh kondisi kehamilan, proses persalinan, masa nifas, atau penanganan yang diberikan, bukan dari penyebab eksternal seperti kecelakaan atau insiden.



Sumber: Badan Pusat Statistik

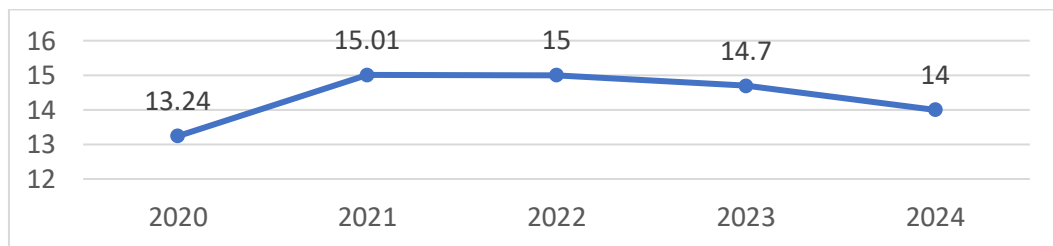
Grafik 2. 21 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Angka kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sejumlah 151,4 per 100.000 kelahiran hidup (KH), itu menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih tergolong tinggi. Hal ini dapat menjadi indikator adanya tantangan serius dalam sistem kesehatan, khususnya terkait kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebanyak 16 (enam belas) kasus (151,4 per 100.000 KH), dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu sebanyak 15 (lima belas) kasus (125,63 per 100.000 KH). Jumlah kematian ibu tahun 2024 adalah sebanyak 16 (enam belas) kasus, dengan rincian 2 (dua) orang fase kehamilan, 1 (satu) orang pada fase persalinan, dan 13 (tiga belas) orang pada saat masa nifas.

5. Angka Kematian Balita (AKBA)

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Banjarnegara hingga tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yang didukung dengan adanya peningkatan standar hidup, kontrol sanitasi dan kesehatan serta adanya intervensi kesehatan yang efektif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini disajikan grafik Angka Kematian Balita (AKBA) tahun 2020-2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2. 22 Angka Kematian Balita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

6. Penyakit Menular dan Tidak menular

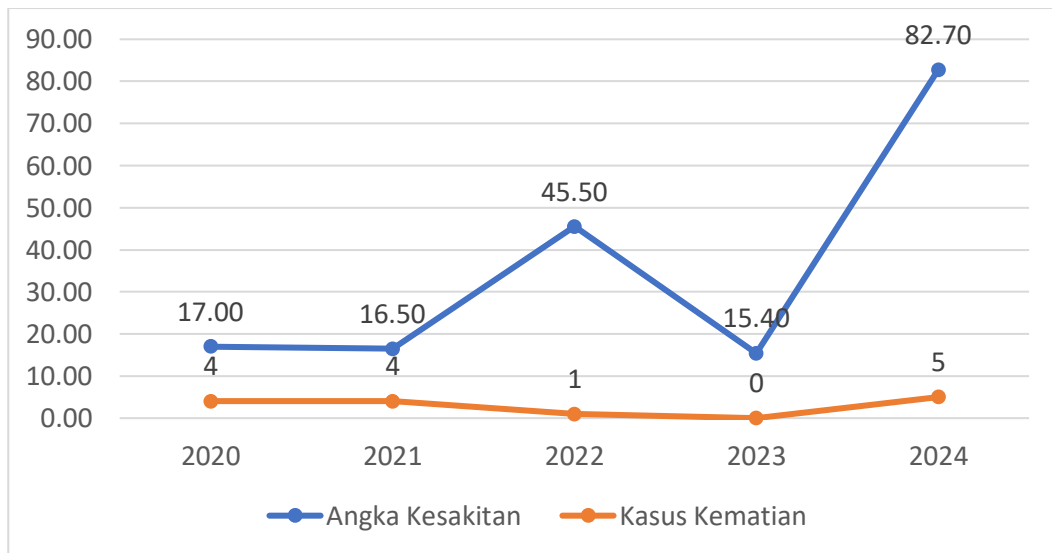
Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis (TB), dan HIV/AIDS adalah penyakit menular yang menjadi sasaran program Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi penyakit menular yang ada di Kabupaten Banjarnegara dijelaskan sebagai berikut:

1) Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit BDB masih menjadi permasalahan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Banyaknya kasus DBD di Kabupaten Banjarnegara ini disebabkan karena adanya iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang cukup tinggi pada musim penghujan yang merupakan sarana perkembangbiakan Nyamuk Aedes Aegypti yang cukup potensial, juga didukung dengan belum maksimalnya kegiatan PSN di masyarakat.

Angka kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 82,7/100.000 penduduk dengan jumlah kasus sebanyak 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) kasus. Angka kematian/Case Fatality Rate (CFR) pada tahun 2024 sebesar 0,6%, dengan jumlah kematian sebanyak 5 (lima) kasus, hal ini meningkat bila dibanding tahun 2023 CFR sebesar 0% atau tidak ada kematian disebabkan oleh DBD.



Sumber: Profil Kesehatan 2024 Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 23 Angka Kesakitan dan Kasus Kematian DBD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

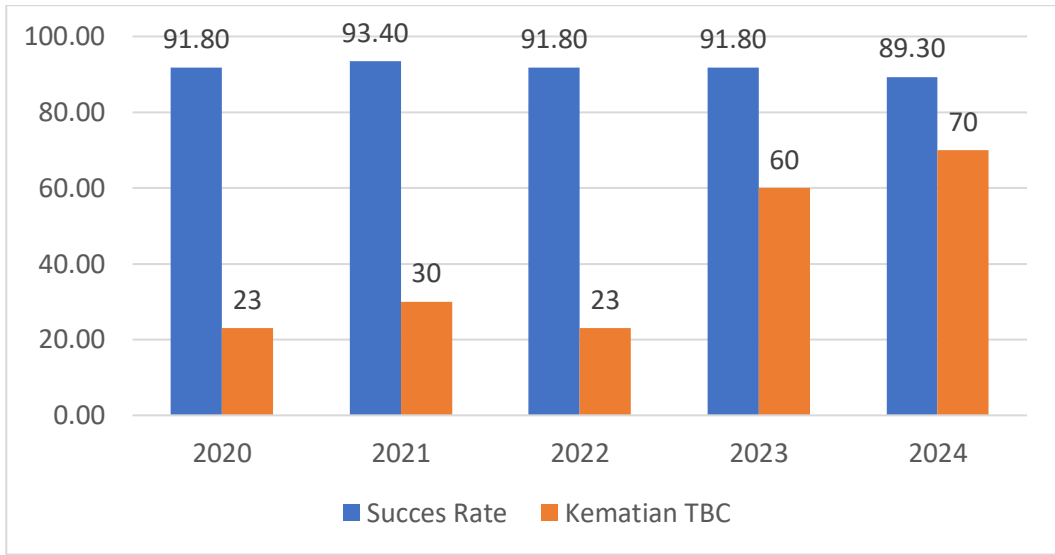
Upaya pengendalian penyakit BDB secara umum terdiri dari:

1. Peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vektor;
2. Diagnosis dini dan pengobatan dini;
3. Peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD dengan lebih menggiatkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).
4. Melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk setiap kasus dan kegiatan fogging yang selektif dilakukan dengan 2x siklus.

2) Tuberkulosis (TBC)

Penemuan pasien TBC di Kabupaten Banjarnegara merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TBC. Penemuan dan penyembuhan pasien TBC secara bermakna dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC. Jumlah terduga TBC di Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 13.568 orang terduga tuberkulosis, yang mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar sebesar 10.782 atau sebesar 79,5%. Jumlah semua kasus Tuberkulosis tahun 2024 sebanyak 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kasus terdiri dari 55,7% lakilaki dan 44,3% perempuan, dan kasus Tuberkulosis anak usia 0-14 sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) kasus.



Sumber: Profil Kesehatan 2024 Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 24 Succes Rate TBC dan Kematian TBC di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

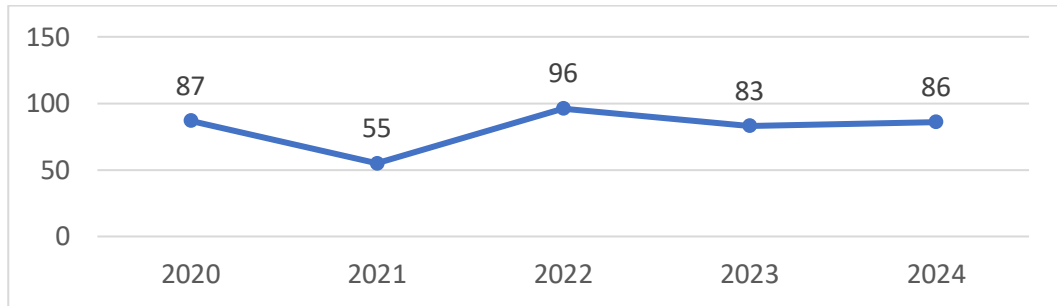
Angka Kesembuhan Penderita TBC dievaluasi dengan melakukan pemeriksaan dahak mikroskopis pada akhir fase intensif, satu bulan sebelum akhir pengobatan dan akhir pengobatan dengan hasil pemeriksaan negatif. Penderita dinyatakan sembuh bila hasil pemeriksaan dahak pada akhir pengobatan ditambah minimal satu kali pemeriksaan sebelumnya (sesudah fase awal atau satu bulan sebelum akhir pengobatan) hasilnya negatif. Bila pemeriksaan *follow up* tidak dilaksanakan namun pasien telah menyelesaikan pengobatan, maka evaluasi pengobatan pasien dinyatakan sebagai pengobatan lengkap.

3) HIV/AIDS

Jumlah kasus baru HIV positif di Kabupaten Banjarnegara yang dilaporkan pada tahun 2024 sebanyak 86 kasus. Kasus HIV paling banyak ditemukan pada kelompok usia 25-49 tahun sebanyak 60 kasus, disusul 20-24 tahun sebanyak 14 kasus, usia diatas 50 tahun sebanyak 11 kasus dan 15-19 tahun sebanyak 1 kasus.

Jumlah estimasi orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten Banjarnegara tahun 2024 adalah sebanyak 18.819 (delapan belas ribu delapan ratus sembilan belas) kasus, yang terdiri dari 8 (delapan) populasi, yaitu ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual, LSL (Laki Seks Laki), WPS (Wanita Pekerja Seks), Penasun (Pengguna Narkotika Jarum Suntik), waria, WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Dari jumlah

estimasi tersebut, sebanyak 18.819 (delapan belas ribu delapan ratus sembilan belas) kasus mendapatkan pelayanan sesuai standar berupa pemeriksaan HIV di fasilitas layanan kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara atau sebesar 100% sehingga target SPM sudah terpenuhi.



Sumber: Profil Kesehatan 2024 Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 25 Jumlah Penderita HIV di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Kemudian mengenai Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Banjarnegara beberapa diantaranya berupa penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan kanker. Kondisi penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Banjarnegara dijelaskan sebagai berikut:

1) Hipertensi

Pengukuran tekanan darah merupakan salah satu kegiatan deteksi dini terhadap faktor resiko penyakit tidak menular. kegiatan ini bisa dilakukan di setiap fasilitas Kesehatan seperti: puskesmas, klinik dan posbindu penyakit tidak menular. Pengendalian hipertensi dilakukan dengan perubahan perilaku antara lain dengan cara menghindari asap rokok/tidak merokok, diet sehat, rajin aktifitas fisik, dan tidak mengkonsumsi alkohol.

Data jumlah estimasi penderita hipertensi berusia > 15 tahun pada tahun 2024 sebanyak 241.061 jiwa dan yang mendapat pelayanan Kesehatan sebanyak 241.061 jiwa atau sebesar 100%.

2) Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan oleh gangguan pengaturan gula darah, sering juga disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Jumlah penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sebanyak 15.765 orang atau sebesar 100%.

3) Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

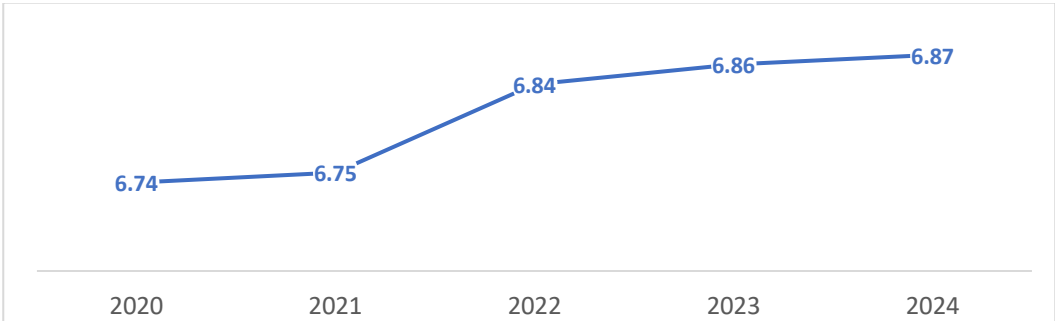
Seluruh Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara (35 Puskesmas) semuanya melakukan deteksi dini IVA dan SADANIS dengan hasil bahwa perempuan usia 30-50 tahun di tahun 2024 sebanyak 147.920 orang yang diperiksa IVA sebanyak 3.300 atau sebesar 2,2% dengan hasil IVA positif sejumlah 77 orang atau sebesar 2,3%, diperiksa SADANIS 3.965

orang atau sebesar 2,7% dengan hasil curiga kanker leher Rahim sebanyak 8 orang atau sebesar 0,2%, diperiksa tumor benjolan sebanyak 64 orang atau sebesar 1,6% dengan curiga kanker payudara sebanyak 12 orang atau sebesar 0,3%.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2024 capaian RLS di angka 6,87 tahun (tertinggi selama 5 tahun terakhir). Angka tersebut mengartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Banjarnegara yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,87 tahun. Secara umum terjadi peningkatan sebesar 0,13 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

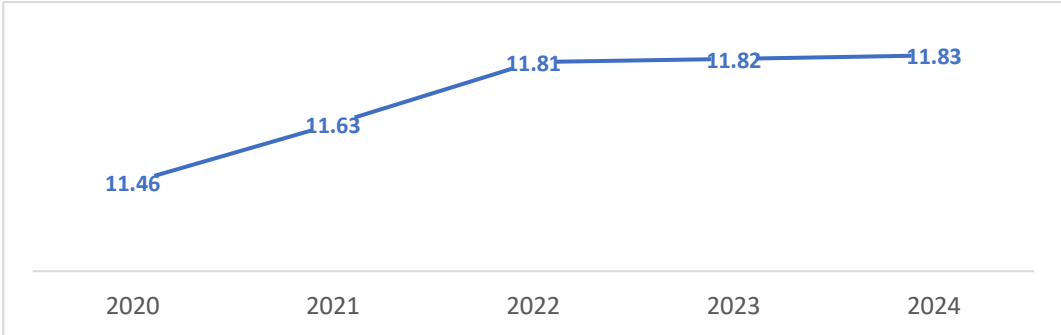


Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024



Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan, Angka HLS Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 naik 0,01 tahun dari tahun 2023 sehingga diperkirakan pada tahun 2024 rata-rata anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah masuk jenjang pendidikan formal dapat memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 11,83 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menyelesaikan Pendidikan hingga kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA.

3. **Angka Literasi/Numerasi**

Teknologi informasi yang semakin berkembang dalam pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan mutu yang dapat dilihat dari kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sebagai sebuah kecakapan dasar. Pada Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi dan numerasi baik di tingkat SD maupun SMP berdasarkan asesmen nasional yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah siswa menurun, kualitas pembelajaran bagi mereka yang tetap bersekolah justru meningkat. Kenaikan kemampuan numerasi SMP yang sangat drastis dari 56,74 menjadi 88,45 mengindikasikan keberhasilan program intervensi pembelajaran matematika yang diterapkan, sementara peningkatan kemampuan literasi juga menunjukkan efektivitas program peningkatan kemampuan membaca dan menulis. Berikut capaian literasi dan numerasi Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024.

Tabel 2. 20 Skor Kemampuan Literasi / Numerasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD/ Sederajat	NA	NA	NA	66,95	67,77
Literasi SMP/Sederajat	NA	NA	NA	78,02	78,70
Numerasi SD/ Sederajat	NA	NA	NA	50,98	56,41
Numerasi SMP/ Sederajat	NA	NA	NA	67,61	67,30

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

4. **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan dan membina budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 15,35.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dapat meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dengan memberikan berbagai jaminan dan perlindungan terhadap berbagai risiko dalam bekerja seperti kecelakaan kerja dan kematian.

Selain itu, terdapat jaminan kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) sebagai konsep pembangunan kesehatan global yang bertujuan agar setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu sebagai perlindungan kesejahteraan masyarakat Indonesia. UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Capaian kepesertaan UHC Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 meningkat 99,17 % atau hampir seluruh penduduk Kabupaten Banjarnegara telah tercatat kepesertaan dalam JKN. Namun, status kepesertaan aktif Kabupaten Banjarnegara per tanggal 1 Mei 2025 baru mencapai 71,32%. Hal ini perlu dilakukan upaya peningkatan status aktif melalui peran serta masyarakat dan pemerintah daerah.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkelanjutan

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama menjelaskan tingkat kerukunan umat berada pada suatu daerah. Indeks ini diukur dengan tiga indikator utama dalam kerukunan umat beragama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. IKUB ini dilakukan pada level provinsi, dimana provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan pada indeks kerukunan umat beragama. Pada tahun 2024 IKUB Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 78,98 yang menunjukkan tingginya nilai toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama yang berada pada wilayah provinsi Jawa Tengah termasuk pada Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator yang menggambarkan pembangunan kebudayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. IPK digunakan sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan. Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah, terbagi dalam 5 sub bab urusan meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman.

Unsur kebudayaan dan kesenian tradisional Kabupaten Banjarnegara tergambar dalam persentase kelompok seni yang melakukan registrasi, dimana pada tahun 2024 terdapat 171 kelompok kesenian yang teregistrasi di Kabupaten Banjarnegara dengan 47,8% fasilitas event seni dan budaya yang dilaksanakan atau terdapat 22 event budaya yang terfasilitasi oleh pemerintah daerah.

Cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, situ, dan Kawasan yang perlu dilestarikan. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Perkembangan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 tercatat mencapai 94 objek cagar budaya dan 1 objek WBTB. Objek cagar budaya tersebut juga diperlukan perawatan dan pemeliharaan agar tetap lestari. Berikut disajikan tabel persentase benda cagar budaya yang dipelihara selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 21 Persentase Benda Cagar budaya dipelihara

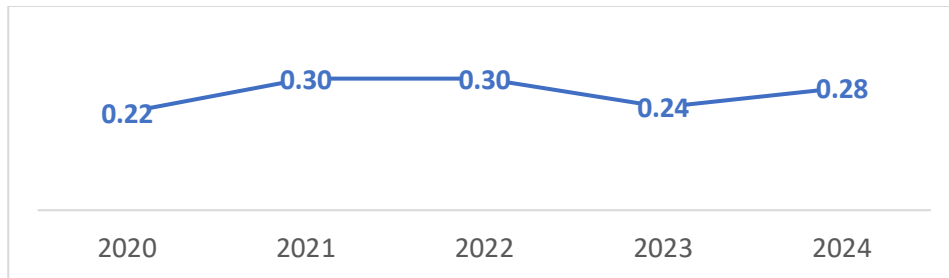
Benda Cagar alam yang dipelihara	
Tabun	%
2020	24
2021	46
2022	47,95
2023	54
2024	62,06

Sumber: Disparbud Kabupaten Banjarnegara

2.1.2.6 Keluarga Berkualias, Kesenaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara selama rentang tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2024 IKG kembali meningkat menjadi 0,28. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender Kabupaten Banjarnegara berfluktuasi dan telah menunjukkan perbaikan kesetaraan gender. Berikut disajikan Indeks Ketimpangan gender selama 5 tahun terakhir:



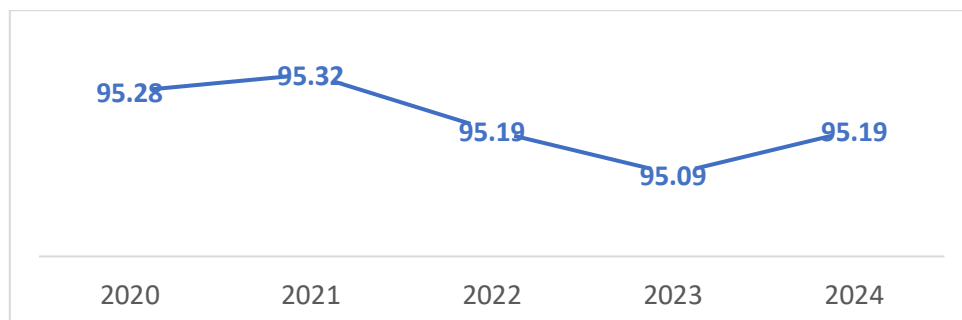
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara 2024

Grafik 2. 28 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Capaian IPG Kabupaten Banjarnegara dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan pada tahun 2024 capaian IPG mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan arah yang lebih baik. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek pembangunan.



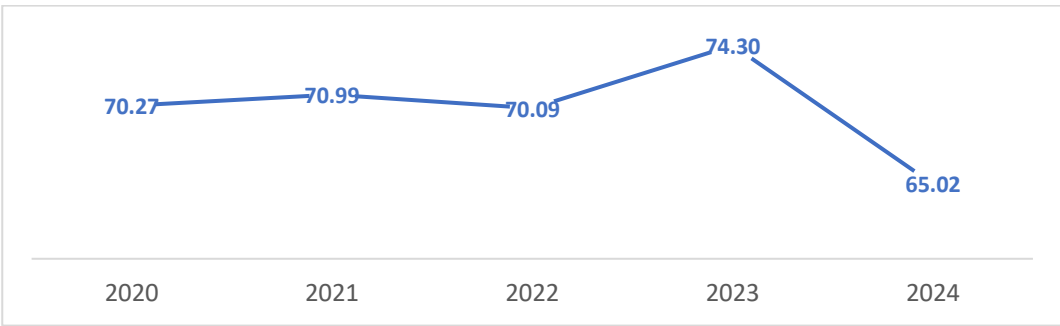
Sumber: SiPerindu BKKBN

Grafik 2. 29 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Nilai IDG mengalami penurunan tajam menjadi 65,02 di tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan menurunnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, atau pengambilan keputusan, yang

merupakan aspek utama dalam IDG. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, rendahnya perlindungan terhadap pekerja perempuan, atau minimnya program pemberdayaan lanjutan di tingkat lokal.

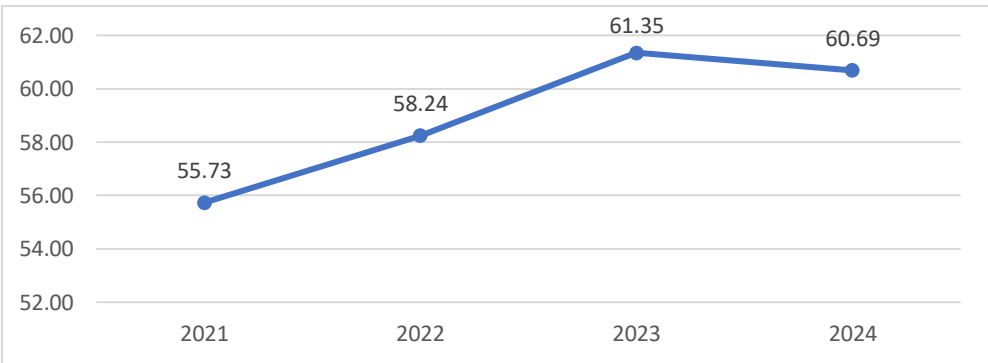


Sumber: SiPerindu BKKBN

Grafik 2. 30 Indeks Pemberdayaan Gender Kapaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

4. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komprehensif yang mengukur kualitas dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai dimensi pembangunan, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial psikologi keluarga. Angka iBangga di tahun 2024 (60,69) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar (61,35). Target nasional iBangga untuk tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 61,0, sehingga Banjarnegara berada hanya 0,31 poin di bawah target nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah berhasil mencapai level yang hampir optimal dalam pembangunan keluarga, dengan kategori "cukup baik (berkembang)" karena nilainya berada dalam rentang 40-70.



Sumber: SiPerindu BKKBN

Grafik 2. 31 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2024

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan sebesar 45,36%. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang



penduduk usia produktif di Kabupaten Banjarnegara harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Kondisi tahun 2024 jauh lebih baik karena semakin rendah kelompok non produktif yang yang ditanggung dibanding pada tahun sebelumnya. Tanggungan ini dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif. Berikut ini disajikan rasio ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Rasio Ketergantungan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-2024

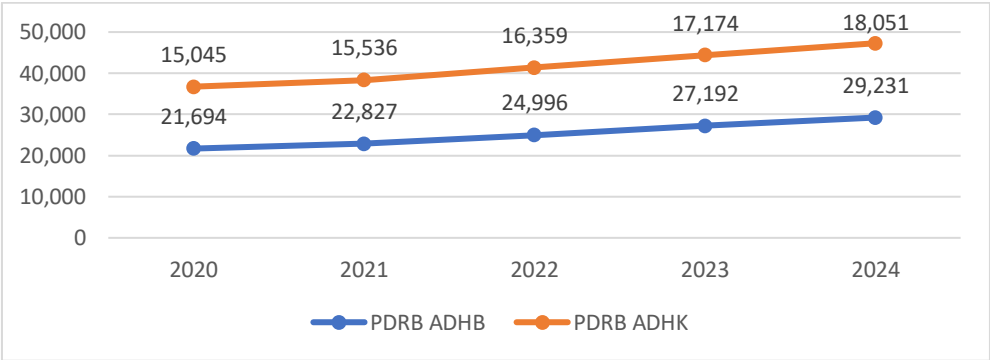
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Ketergantungan	%	49,41	45,52	45,74	46,43	45,36

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam kurun waktu 2020-2024, nilai PDRB Kabupaten Baanjarnegara baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan. ADHK yang terus meningkat mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang riil di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan peningkatan ADHB menunjukkan peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan Kabupaten Banjarnegara. Berikut disajikan grafik perkembangan ADHK dan ADHB selama tahun 2020-2024 di Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 32 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui komposisi dan peranan masing-masing sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Besar kecilnya kontribusi tiap sektor penyusun PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23 Kontribusi Setiap Sektor Penyusun PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,58	29,88	29,61	28,62	28,48



Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
B	Pertambangan dan Penggalian	5,99	6	5,29	5,1	5,02
C	Industri Pengolahan	15,16	15,56	15,73	16,4	16,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,2	7,63	7,58	7,86	7,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,47	14,84	14,7	14,64	14,54
H	Transportasi dan Pergudangan	2,72	2,75	4,39	4,7	4,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	1,92	2,04	2,16	2,17
J	Informasi dan Komunikasi	3,23	3,26	3,05	3,13	3,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,94	2,94	2,82	2,7
L	Real Estate	1,53	1,5	1,46	1,44	1,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,4	0,39	0,4	0,4	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,38	3,16	3,03	2,97	3,05
P	Jasa Pendidikan	6,82	6,56	6,14	6,07	6,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,42	1,34	1,33	1,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,19	2,12	2,24	2,28	2,31
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sektor utama yang membentuk struktur perekonomian di Kabupaten Banjarnegara adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor lainnya, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Banjarnegara masih didominasi oleh aktivitas di bidang agraris. Selanjutnya, sektor industri pengolahan menempati posisi kedua sebagai penyumbang PDRB terbesar, yang mencerminkan mulai adanya perkembangan aktivitas pengolahan hasil pertanian maupun industri kecil dan menengah di daerah tersebut.

Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada di urutan ketiga, menandakan adanya perputaran ekonomi melalui aktivitas jual beli barang dan jasa di masyarakat. Selain itu, sektor konstruksi dan sektor pendidikan juga memberikan kontribusi cukup signifikan, meskipun belum sebesar tiga sektor utama sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan layanan pendidikan mulai berkembang dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara, namun sektor-sektor tersebut masih perlu terus

ditingkatkan agar perekonomian daerah menjadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian saja.

Tabel 2. 24 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

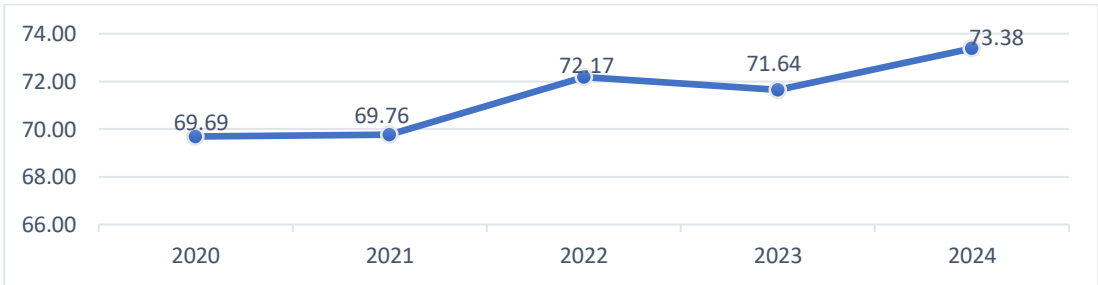
No	Komponen PDRB Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	76,74	76,00	76,43	77,42	78,01
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,93	1,91	1,97	2,03	2,24
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,16	7,96	7,36	7,08	6,89
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,14	22,68	22,03	21,53	21,47
5	Perubahan Inventori	0,37	0,32	0,38	0,39	0,22
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-9,35	-8,87	-8,17	-8,44	-8,84

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Struktur perekonomian Kabupaten Banjarnegara berdasarkan PDRB Pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 78,01%. Sementara itu, kontribusi Pengeluaran Pemerintah hanya 6,89%, dan investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 21,47%. Ke depan, peningkatan investasi khususnya di sektor jasa, akomodasi, perdagangan, dan industri pengolahan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Banjarnegara kembali naik hingga mencapai angka tertinggi sebesar 73,38%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja di Kabupaten Banjarnegara yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Berikut perkembangan TPAK di Kabupaten Banjarnegara:



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

4. **Indeks Inovasi Daerah**

Untuk mendorong inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) berdasarkan skor Indeks Inovasi Daerah (IID). Pada tahun 2020, penilaian IID masih menggunakan skala yang berbeda, sehingga hasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan seterusnya (IID Tahun 2020 mencapai 539



dengan kategori inovatif). Mulai tahun 2021, penilaian IID menggunakan skala 0,01-100. Pada periode 2021-2024, capaian IID mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kategori inovatif.

Tabel 2. 25 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks	Keterangan
2020	539	Inovatif
2021	41,91	Inovatif
2022	41,77	Inovatif
2023	42,90	Inovatif
2024	46	Inovatif

Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

Pengembangan energi baru dan terbarukan di Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu komponen krusial dalam implementasi ekonomi hijau. Pemanfaatan energi alternatif ini bertujuan meminimalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, menurunkan tingkat polusi, serta menekan emisi karbon. Sumber daya energi terbarukan yang potensial di wilayah tersebut meliputi tenaga panas bumi dan energi surya yang semuanya dapat dikonversi menjadi pembangkit tenaga listrik. Keberadaan potensi energi dan panas bumi surya tidak terlepas dari adanya Kawasan vulkanik Dieng dan Candradimuka dan juga Savana yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

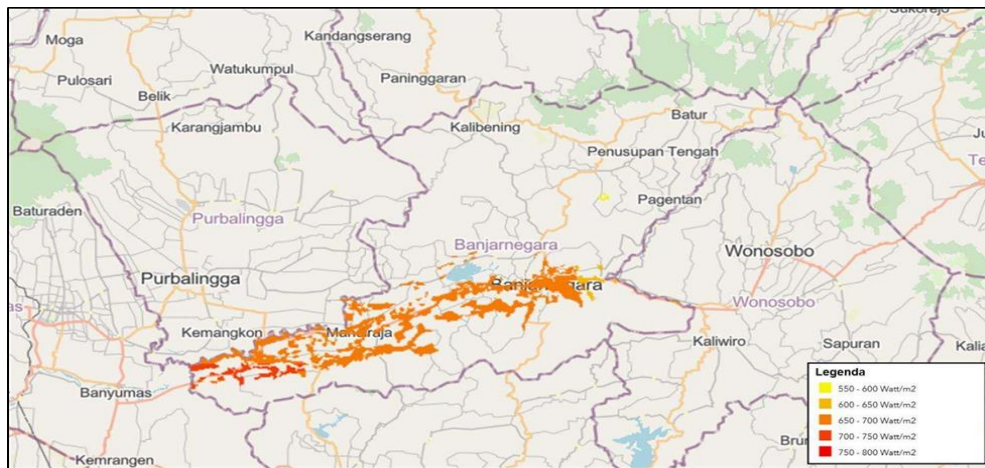
Tabel 2. 26 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara

No	Kecamatan	Lapangan Panas Bumi	Cadangan Mungkin	Cadangan Terbukti	Total Cadangan	Kapasitas Terpasang
1	Wanayasa	Panas Bumi Mangunan-Wanayasa	92	-	92	-
2	Batur	Panas Bumi Candradimuka	20	-	20	-
3	Batur	Panas Bumi Dieng	-	240	240	60

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Banjarnegara 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi sumber daya energi panas bumi yang cukup besar dan tersebar di tiga wilayah, yaitu Dieng, Kawah Candradimuka, serta kawasan antara Mangunan dan Wanayasa. Total cadangan panas bumi yang dimiliki mencapai 352 MW, namun sejauh ini yang telah dimanfaatkan baru sebesar 60 MW melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Dieng.

Selain energi panas bumi, Kabupaten Banjarnegara juga memiliki potensi energi terbarukan lainnya, yaitu energi surya. Keberadaan area savana di wilayah ini memberikan peluang besar untuk pengembangan energi surya. Tercatat, luas savana yang berpotensi dimanfaatkan mencapai 114,68 km² dengan estimasi potensi energi sekitar 4,70 GWp. Berikut ini ditampilkan peta sebaran potensi energi surya di Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: Kementrian ESDM

Gambar 2. 3 Peta Potensi Energi Surya di Kabupaten Banjarnegara

Penerapan ekonomi hijau tercermin dalam berbagai program lintas sektor yang saling mendukung. Pada aspek pengelolaan limbah, pemerintah daerah mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pengurangan sampah rumah tangga berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pengembangan bank sampah dan TPS3R, serta pemanfaatan limbah organik menjadi kompos dan limbah pertanian atau peternakan menjadi biogas. Data tahun 2024 menunjukkan timbulan sampah tahunan mencapai sekitar 155.978,66 ton/hari, dengan target pengurangan minimal 30% pada 2029 melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali.

Di sektor pertanian, peningkatan produktivitas dilakukan dengan praktik-praktik ramah lingkungan, seperti pemakaian pupuk organik dan pupuk hayati, penerapan konservasi lahan di wilayah rawan longsor, serta pengembangan sistem pertanian terpadu dan *agroforestry* di kawasan perbukitan.

Sementara itu, pengembangan pariwisata diarahkan pada konsep berbasis kelestarian alam dan budaya melalui penguatan destinasi ekowisata di kawasan pegunungan, air terjun, geopark, dan desa wisata yang dikelola sesuai prinsip daya dukung lingkungan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam dan identitas budaya lokal.

Di sisi lain, Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi EBT yang signifikan, antara lain pemanfaatan potensi mikrohidro, pemanfaatan biogas dari limbah peternakan, serta rencana pengembangan PLTS untuk daerah terpencil. Pemanfaatan EBT ini diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, pariwisata, dan pengelolaan limbah.

2.1.3.4 Transformasi Digital

1. Penduduk Mengakses Internet

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan *baseline* sebesar 62,69% pada tahun 2025 sebagai langkah awal untuk meningkatkan



akses internet secara bertahap di tahun-tahun mendatang. Target persentase rumah tangga yang memiliki akses internet yang telah ditetapkan di tahun 2025-2029 sebesar 72,02%. Kenaikan secara bertahap ini menggambarkan tekad pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menguatkan jangkauan layanan internet untuk mendorong perkembangan berbagai sektor. Berdasarkan target yang telah dicanangkan, Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat menjamin pemerataan akses internet di semua kawasan, tidak terkecuali wilayah-wilayah yang masih menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur digital.

Transformasi digital di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan kondisi positif yang tercermin dari peningkatan konsisten akses internet penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam periode 2020-2024. Laki-laki menunjukkan konsistensi peningkatan akses internet dari 50,66% menjadi 70,81% dengan pertumbuhan rata-rata 5% per tahun, sementara perempuan mengalami fluktuasi yang signifikan dengan penurunan pada 2023 dari 60,38% menjadi 59,56% sebelum kembali naik ke 65,40% pada 2024. Pola fluktuatif ini mengindikasikan bahwa akses internet perempuan masih dianggap sebagai prioritas sekunder dalam alokasi sumber daya keluarga, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi. Gap konsisten 5-10 poin persentase antara laki-laki dan perempuan sepanjang periode ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum inklusif dan berpotensi memperdalam ketimpangan gender dalam akses informasi dan peluang ekonomi digital. Berikut disajikan tabel persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2. 27 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
2020	50,66	44,29	47,48
2021	56,38	50,69	53,54
2022	64,44	60,38	62,44
2023	65,80	59,56	62,69
2024	70,81	65,40	68,11

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Target pemerintah daerah untuk mencapai 72,02% pada periode 2025-2029 menunjukkan proyeksi yang dapat dicapai berdasarkan tren peningkatan yang telah terjadi, namun realisasi target tersebut memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasi kesenjangan gender dan meningkatkan kualitas akses internet. Diperlukan intervensi kebijakan yang sensitif gender, program literasi digital khusus perempuan, dan perubahan persepsi masyarakat tentang pentingnya akses internet yang setara.

2. Layanan Publik Berbasis Online

Pelayanan publik adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi sebagian cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan yang berkualitas harus mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, memberi ruang bagi publik menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi mereka, serta memperoleh respons tanggap dari otoritas terkait atas setiap masukan yang diberikan.

Salah satu bentuk transformasi digital yang paling terbaru yaitu di tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara telah melaunching kanal aduan Masyarakat Bernama “Lapor Mba’e dan Gus’e”.



Sumber: Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara
Gambar 2. 4 Kanal Aduan Lapor Mba’e dan Gus’e

Kanal aduan ini merupakan komitmen Bupati dan wakil Bupati Banjarnegara untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya kanal tersebut, Masyarakat bisa menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah melalui wadah yang resmi. Kanal aduan tersebut dapat diakses melalui nomor *whatsapp* maupun media sosial seperti Tik Tok dan Instagram. Hal ini sejalan dengan transformasi digital yang telah dilakukan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banjarnegara yang kini menyediakan layanan publik secara online, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administratif tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Dampak yang dirasakan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari adanya transformasi digital yaitu dalam efisiensi waktu dan biaya, di mana proses yang sebelumnya membutuhkan beberapa kali kunjungan ke kantor pemerintahan kini dapat diselesaikan dari rumah melalui aplikasi dan *platform online*. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital rendah. Sebagian masyarakat, khususnya generasi yang lebih tua dan masyarakat di daerah dengan sinyal internet terbatas, masih mengalami



kesulitan dalam mengadaptasi sistem pelayanan digital dan memerlukan pendampingan khusus.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator penting dalam bidang ekonomi yang mencerminkan besarnya total investasi di suatu daerah dalam periode tertentu terhadap PDRB. Pada tahun 2024, nilai PMTB di Kabupaten Banjarnegara tercatat sebesar 6.277,33 juta rupiah. Secara umum, nilai dan kontribusi PMTB terhadap PDRB selama periode 2020 hingga 2024 mengalami tren peningkatan. Bahkan, pada tahun 2024, laju pertumbuhan PMTB mencapai angka 7,20%.

Tabel 2. 28 Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah dan persentase)

Pembentukan Modal Tetap Bruto		2020	2021	2022	2023	2024
	Juta rupiah	4.804,14	5.176,75	5.507,09	5.855,86	6.277,33
	Persentase	22,14	22,68	22,03	21,53	21,47

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

2. Nilai Investasi Penanaman Modal

Memasuki tahun 2024, nilai investasi baik pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat menggambarkan adanya tantangan tertentu, seperti kondisi ekonomi yang belum stabil, kendala perizinan, atau berkurangnya daya tarik investasi di daerah tersebut. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa meskipun Banjarnegara sempat menjadi daerah yang potensial bagi investasi PMDN dan PMA, namun upaya menjaga keberlanjutan investasi masih perlu diperkuat berikut disajikan

Tabel 2. 29 Nilai Investasi Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

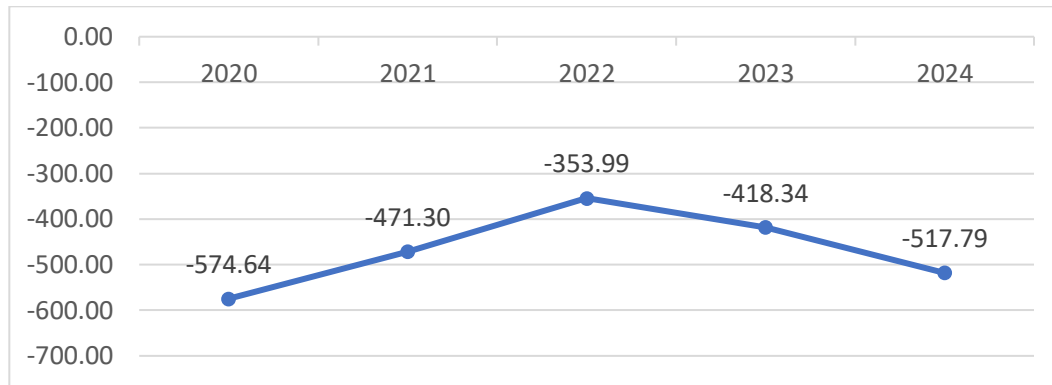
Tahun	Nilai Investasi	
	PMDN	PMA
2020	68.582,90	66,60
2021	114.381,10	1.004,20
2022	492.561,10	43.550,83
2023	498.759,30	153.884,31
2024	309.271,20	24.457,59

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

3. Net Ekspor Impor Barang dan Jasa

Di Kabupaten Banjarnegara, net ekspor barang dan jasa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan nilai negatif. Hal ini mngeratkan bahwa

nilai keseluruhan impor Kabupaten Banjarnegara lebih besar daripada nilai keseluruhan eksportnya.



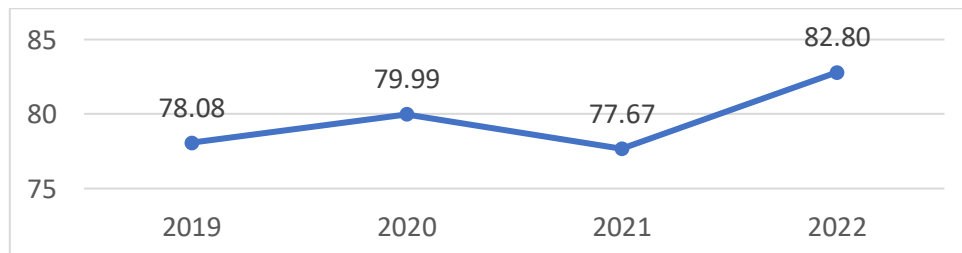
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 34 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Infrastruktur

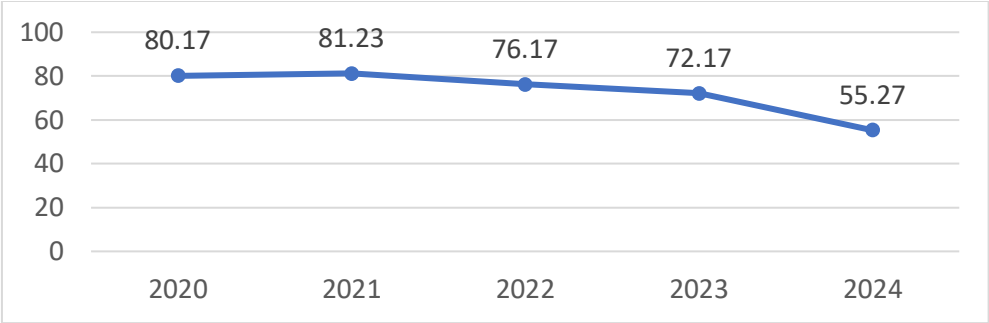
Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja Kabupaten/kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya memperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Untuk tahun 2019, indeks infrastruktur yang dicapai sebesar 78,08 dan meningkat secara signifikan sebanyak 4,72 poin pada tahun 2022 menjadi sebesar 82,80. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat Pembangunan di Kabupaten Banjarnegara semakin baik.



Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 35 Indeks Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2022

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung menurun dari sebesar 80,17% pada tahun 2020 menjadi 55,27% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan pada jaringan jalan yang telah rusak sehingga jaringan jalan dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan dan mempermudah akses bagi masyarakat Banjarnegara. Berikut disajikan grafik perkembangan jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara.

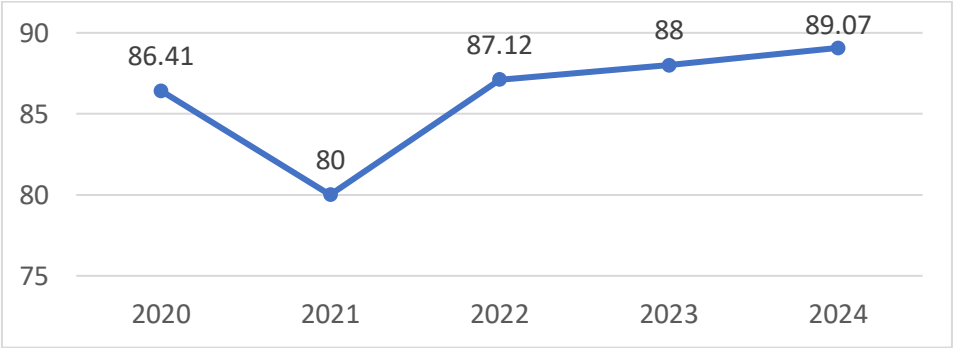


Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 36 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dalam periode 5 tahun, cakupan ketersediaan rumah layak huni terjadi peningkatan sebesar 2,66% dari 2020 ke 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Peningkatan berkelanjutan sejak 2021 menunjukkan upaya positif pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan ketersediaan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum, dan kesehatan penghuninya. Berikut ini grafik perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024:



Sumber: DPKPLH Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

3. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Pada tahun 2024, jumlah desa dalam kategori maju dan mandiri semakin meningkat yang berarti semakin banyak desa yang berhasil dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Berikut disajikan tabel IDM Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024.

Tabel 2. 30 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2024

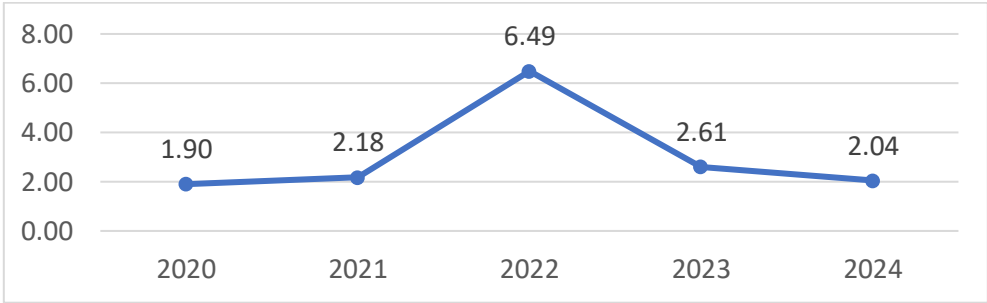
Klasifikasi Desa	Jumlah Desa				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	2	2	2	6	13
Maju	33	44	64	73	87
Berkembang	209	207	199	187	166
Tertinggal	22	13	1	0	0
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Banjarnegara pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi, sempat mencapai angka 6,49 di tahun 2022, namun dua tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Inflasi yang rendah ini dapat ditinjau dari dua perspektif berbeda. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan bahwa indeks harga konsumen relatif stabil tanpa kenaikan signifikan, yang menunjukkan ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai sehingga mencegah terjadinya kelangkaan di pasar. Di sisi lain, rendahnya tingkat inflasi juga dapat mencerminkan melemahnya kemampuan beli masyarakat, di mana jumlah barang yang tersedia di pasar melebihi permintaan konsumen karena daya beli yang menurun.



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 38 Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

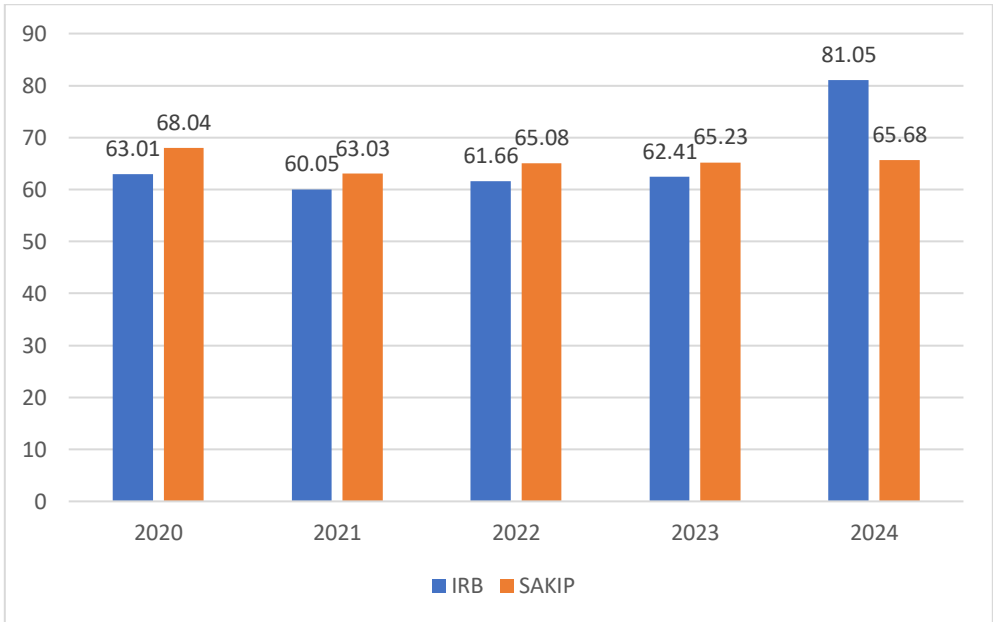
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nilai IRB Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 tercatat sebesar 81,05, meningkat dari capaian tahun 2023 yang sebesar 62,41. Peningkatan ini menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan upaya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan, namun masih diperlukan akselerasi dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi agar hasilnya lebih signifikan.

Sementara itu, capaian nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 65,68. Peningkatan nilai

SAKIP ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Meski peningkatannya tidak terlalu besar, tren positif ini memperlihatkan bahwa komitmen dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja sudah berjalan ke arah yang lebih baik.



Sumber: Setda Bagian Organisasi Kabupaten Banjarnegara

Grafik 2. 39 Nilai IRB & SAKIP Kaupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. **Indeks Reformasi Hukum (IRH)**

IRH merupakan salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi di bidang hukum di suatu daerah atau instansi pemerintah. Berikut disajikan data perolehan IRH Kabupaten Banjarnegara selama 3 tahun terakhir:

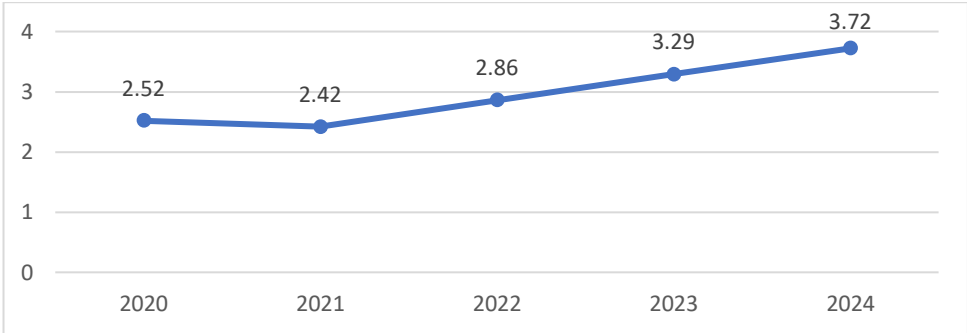
Tabel 2. 31 Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Banjarnegara

Tahun	Nilai	Kategori
2022	51,55	CC (Cukup)
2023	54,47	CC (Cukup)
2024	96,76	AA (Istimewa)

Dari data di atas, terlihat bahwa terjadi Peningkatan nilai IRH yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Banjarnegara, khususnya terkait proses monitoring, evaluasi, dan penataan regulasi agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pada tahun 2024, nilai IRH mengalami peningkatan signifikan dimana telah mencapai nilai 96,76 dengan kategori “Istimewa”, yang berarti telah mencapai tingkat reformasi hokum yang sangat baik, bahkan di atas rata-rata. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Banjarnegara memiliki system hokum yang kuat, efisiensi, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung jalannya birokrasi yang efektif.

3. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Berdasarkan data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024, diketahui bahwa nilai SPBE berada pada angka 3,72. Dengan capaian nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan SPBE di Kabupaten Banjarnegara sudah berada dalam kategori baik, namun masih memerlukan penguatan dan optimalisasi dalam beberapa aspek, terutama dalam inovasi layanan digital, keamanan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.



Sumber: Dinkominfo Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 40 Indeks SPBE Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

Perlu adanya strategi lanjutan dan perbaikan berkelanjutan agar implementasi SPBE di tahun-tahun berikutnya tidak hanya mengalami peningkatan angka, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam kemudahan akses layanan publik dan transparansi pemerintahan berbasis teknologi di Kabupaten Banjarnegara.

4. **Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabpaten Banjarnegara cenderung mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Kenaikan nilai IPP setiap tahunnya menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan layanan, seperti peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan proses layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik mulai memberikan dampak positif. Dengan predikat "Sangat Baik" dengan kategori “A” yang berhasil dipertahankan sejak tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara semakin optimal dan mampu memberikan layanan public yang berkualitas dan memuaskan masyarakat.

Tabel 2. 32 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

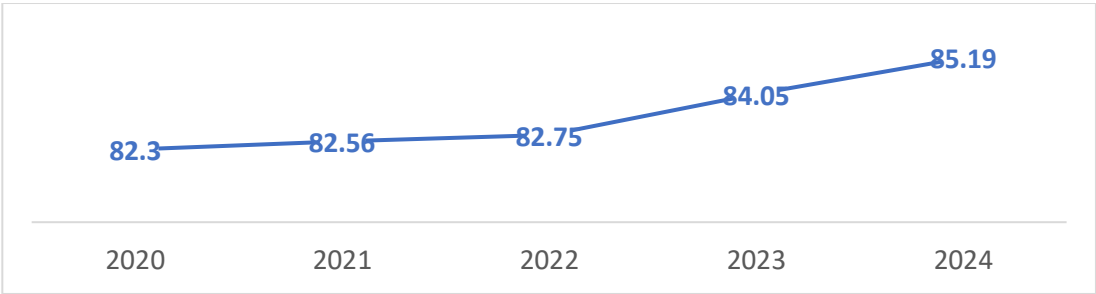
Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Banjarnegara	3,79	4,05	4,06	4,12	4,56
Keterangan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Kementrian PANRB

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menilai mutu layanan publik dan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Berdasarkan data IKM Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024, terlihat adanya peningkatan yang stabil dan berkelanjutan, yaitu dari angka 82,3 di tahun 2020 yang kemudian naik menjadi 85,19 pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan keberhasilan berbagai inisiatif peningkatan pelayanan publik yang telah dijalankan oleh pemerintah setempat.

Walaupun perkembangan yang terjadi cukup menggembirakan, pemerintah daerah tetap harus melakukan penilaian rutin dan mengembangkan berbagai terobosan dalam pelayanan guna memelihara serta meningkatkan standar pelayanan publik. Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi, ditambah dengan keterlibatan aktif warga dalam proses pengembangan layanan, merupakan elemen penting untuk menjaga kesinambungan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di wilayah Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: Setda Bagian Organisasi Kab. Banjarnegara

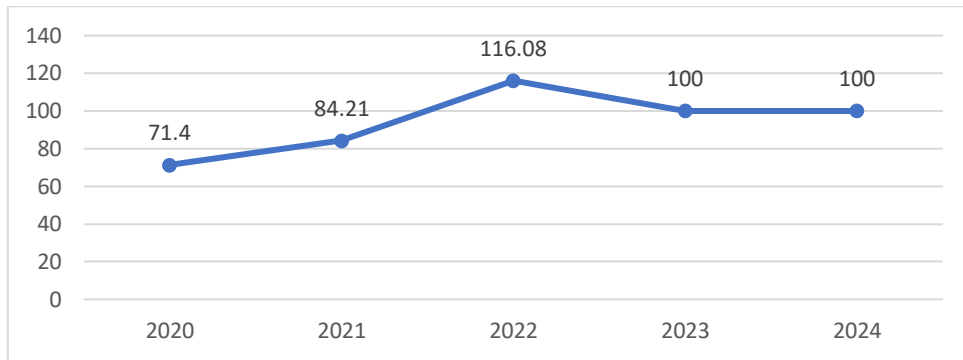
Grafik 2. 41 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakkan Perda

Peningkatan persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun mencerminkan adanya kemajuan yang sangat berarti dalam penerapan hukum dan kebijakan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan yang berlaku di masyarakat. Di tahun 2024 keseluruhan yang ditegakan meliputi 12 Perda dan 6 Perkada. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah yang memuat sanksi, 2) Keterbatasan jumlah PPNS dan belum optimalnya pelaksanaan tugas PPNS Penegak undang-undang di OPD. Keberadaan sekretariat PPNS belum dioptimalkan, 3) Kurangnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan 4) Pelaksanaan tugas PPNS memiliki

resiko hukum dan resiko ancaman keselamatan jiwa yang tinggi namun dukungan sarana dan prasarana operasional belum memadai.

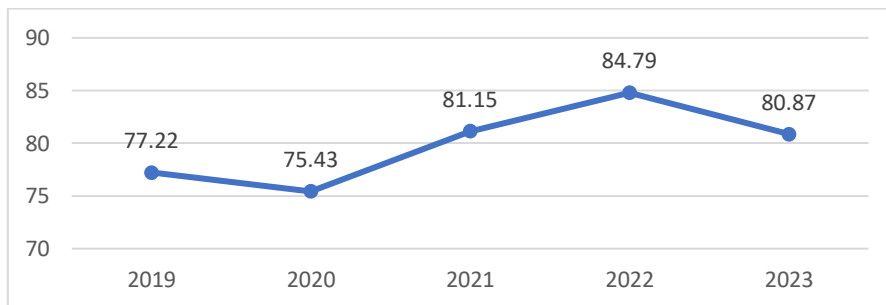


Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 42 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan sebuah alat ukur secara kuantitatif yang berfungsi untuk mengevaluasi tingkat perkembangan serta implementasi prinsip-prinsip demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Puncak capaian IDI terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 84,79, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan perbaikan situasi demokrasi di Provinsi Jawa Tengah semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, IDI kembali mengalami penurunan menjadi 80,87. Meskipun masih tergolong tinggi, penurunan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dalam menjamin kebebasan sipil, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat peran lembaga demokrasi.



Grafik 2. 43 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

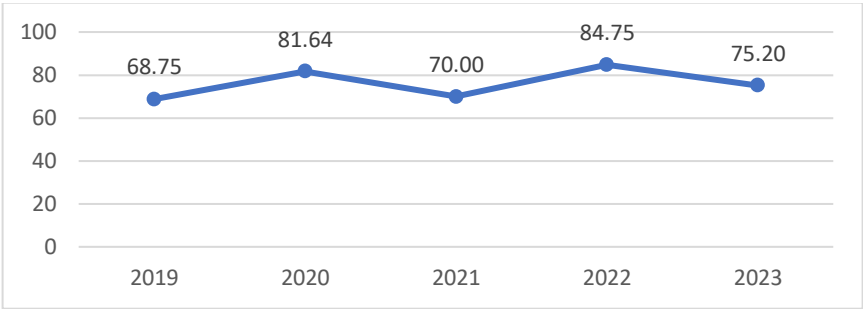
3. Indeks Rasa Aman (IRA)

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap individu yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, karena hal ini berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya alat ukur yang mampu merepresentasikan kondisi keamanan yang dirasakan oleh warga. Untuk itu, dibuatlah sebuah indikator yang berfungsi untuk mengukur tingkat keamanan manusia, yaitu Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks ini disusun untuk

memberikan gambaran mengenai situasi keamanan di lingkungan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pengambilan kebijakan. Namun demikian, hingga saat ini data secara lengkap terkait Indeks Rasa Aman untuk Kabupaten Banjarnegara masih belum tersedia.

4. **Indeks Ketentraman dan Ketertiban**

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2019-2023 memiliki kecenderungan fluktuatif, sejatinya indeks ketentraman dan ketertiban seharusnya mengalami peningkatan dan posisi yang stabil, jika terjadi fluktuasi mengindikasikan terdapat gejolak pada daerah tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama beberapa tahun kedepan tentunya memiliki tugas yang berat untuk memastikan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Banjarnegara tetap terjaga dengan baik, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik.



Grafik 2. 44 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

2.1.4.3. **Ketangguhan Diplomasi dan Pertanahan Berdaya Gantar Kawasan**

1. **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**

Indeks daya saing daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banjarnegara selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi nilai dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, indeks daya saing daerah Kabupaten Banjarnegara berhasil mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,46. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah berhasil memperbaiki dan meningkatkan berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti kualitas SDM, infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.

Tabel 2. 33 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

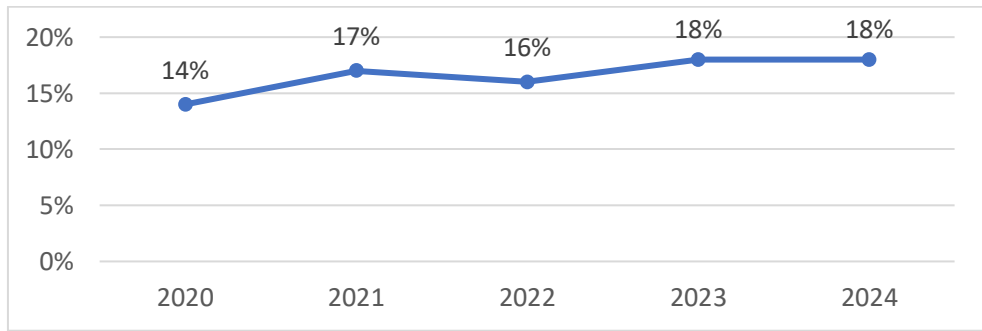
Tahun	Indeks
2020	3,06

Tahun	Indeks
2021	3,00
2022	2,83
2023	3,06
2024	3,46

Sumber: BRIN, 2020-2024

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perkembangan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi, namun secara umum mengalami tren peningkatan. Rasio PAD sebesar 18% di tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong rendah karena idealnya suatu daerah dikatakan memiliki kemandirian fiskal yang kuat jika rasio PAD terhadap pendapatan daerah berada di atas 20%-30%. Dengan rasio PAD yang masih di bawah 20%, maka Kabupaten Banjarnegara masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 45 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

2.1.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintahn Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan, terjadi kenaikan sebesar 0,13 selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2024 capaiannya sebesar 6,87. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Banjarnegara secara rata-rata telah menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 7 (SMP kelas 1). Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan standar pendidikan dasar 9 tahun, menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Peningkatan Harapan Lama Sekolah menjadi 11,83 tahun menandakan ekspektasi bahwa anak-anak Banjarnegara diperkirakan akan menyelesaikan pendidikan hingga setara kelas 12 (tamat SMA), yang merupakan indikator positif untuk prospek pendidikan jangka panjang di daerah ini.



Namun, terdapat tren yang mengkhawatirkan pada angka partisipasi pendidikan. Penurunan drastis APK untuk semua jenjang pendidikan, terutama di tingkat SD/MI/Paket A yang turun dari 107,07 menjadi 93,68, dan SMP/MTS/Paket B dari 96,69 menjadi 85,50, mengindikasikan berkurangnya jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan formal. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan demografis, migrasi penduduk ke daerah lain, atau tantangan ekonomi yang mendorong anak-anak meninggalkan pendidikan untuk bekerja. Penurunan APM yang cukup signifikan, terutama di tingkat SD (dari 97,48 menjadi 87,18), menggarisbawahi bahwa semakin banyak anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah sesuai jenjang usianya.

Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	6,74	6,75	6,84	6,86	6,87
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	11,46	11,63	11,81	11,82	11,83
3	APS 7-12 Tahun	%	99,45	98,87	99,96	99,48	NA
4	APS 13-15 Tahun	%	89,32	93,49	91,81	93,45	NA
5	APK PAUD	%	74.79	74.84	102.46	159,49	104,68
6	APK SD/MI/Paket A	%	107.07	92.24	92.61	99,07	93,68
7	APK SMP/MTS/Paket B	%	96.69	90.78	87.03	81,66	85,50
8	APM SD/MI/Paket A	%	97.48	86.76	87.92	85,12	87,18
9	APM SMP/MTS/Paket B	%	74.57	79.42	71,08	69,71	72,05
10	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0.03	0.47	0.44	0,16	0,28
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	%	0.16	3.15	3,08	0,82	0,74
12	Angka Lulus Sekolah SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Angka Lulus Sekolah SMP/MTS/Paket B	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Angka Lanjut Sekolah SD/MI/Paket A ke SMP	%	94.3	85.04	86.32	90,59	91,86
15	Rasio Ketersediaan SD		69.91	0.80	0.80	81,14	81,89
16	Rasio ketersediaan SMP		22.66	0.29	0.28	27,66	27,26
17	Persentase Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	%	NA	NA	68,00	91,10	92,55
18	Persentase Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	NA	NA	75,00	94,26	97,05

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

b. Kesehatan

Kinerja kesehatan dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu, AKI di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penanganan kesehatan maternal, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti



akses terhadap fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan antenatal, dan penanganan komplikasi persalinan. Peningkatan tajam pada tahun 2021 mungkin berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan kesehatan ibu.

Kemudian, angka kematian bayi menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Dari 11,68 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi 12,81 pada tahun 2021 dan mencapai 13,01 pada tahun 2022. Angka ini relatif stabil pada 13,1 di tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 12,1 pada tahun 2024. Peningkatan AKB ini mengindikasikan perlunya penguatan program kesehatan bayi dan neonatal, termasuk peningkatan kualitas pelayanan persalinan, penanganan kegawatdaruratan neonatal, serta program imunisasi dan gizi bayi. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Neonatal	Per 1000 KH	9,2	9,45	7,5	10,2	9,3
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	123,94	287,1	130,83	125,63	151,4
3	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	11,67	12,81	13,01	13,10	12,10
4	Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	13,24	15,1	15,0	16,7	NA
5	Prevalensi Stunting	%	23,05	22,7	18,27	17,46	20,6
6	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	88,6	87	87,2	90,4	96,4
7	Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	98,1	97,70	97,70	99,5	98,6
8	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	98,3	99,1	98,80	99,1	92,6
9	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	55,4	79,1	79,30	96,40	95,7
10	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	41,6	56,25	86,70	97,7	100,00
11	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	18,75	31	70,00	90,00	95,00
12	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	25,86	35,17	76,00	100,00	100,00
13	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang	%	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)						
14	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	65,23	65,2	90,00	100,00	100,00
15	Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	60,71	51,9	100,00	100,00	72
16	Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	93,83	69,2	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

c. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara menunjukkan keberhasilan di beberapa sektor utama seperti akses air minum dan pengelolaan air limbah, namun masih menghadapi tantangan serius dalam pemeliharaan infrastruktur jalan dan konsistensi penataan ruang.

Persentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang pada tahun 2023 mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 71,01% (2022) menjadi 33,33% (2023). Penurunan ini disebabkan oleh belum selesainya sebagian kegiatan yang direncanakan karena keterlambatan proses pengadaan jasa perencanaan dan konsultasi, serta perlunya penyesuaian dokumen penataan ruang agar selaras dengan kebijakan tata ruang provinsi dan nasional. Hambatan teknis di lapangan, termasuk keterbatasan data spasial terkini dan kondisi cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan survei, turut memperlambat realisasi capaian pada tahun 2023. Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	68,3	70,21	73,63	76,07	76,27
2	Persentase jalan yang memiliki sistem drainase yang memadai	%	3,19	3,36	3,36	3,34	3,34
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas	%	80,17	81,229	76,17	72,17	55,275
4	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	88,26	89,59	90,31	85,34	NA



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang	%	70	71	71,01	33,33	40
6	Persentase penduduk berakses air minum	%	92,24	95,29	95,73	96,76	96,86
7	Persentase Kepala Keluarga Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	%	62,5	63,75	71,99	76,86	77,23
8	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	68,30	70,21	73,63	76,07	76,27
9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	92,24	95,29	95,73	96,76	98,86
10	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	11,22	76,33	77	77,64	72,32
11	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		14,56	17,2	17,2	17,8	20

Sumber: DPUPR dan DPKPLH Kab. Banjarnegara

d. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Terdapat kemajuan dalam penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman, meskipun masih terdapat tantangan dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan yang memerlukan pendekatan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan bertahap dari 86,41 persen pada tahun 2020 menjadi 89,07 persen pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 2,66 persen ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan dan perbaikan perumahan yang dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk pembangunan rumah subsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan program bedah rumah. Meskipun peningkatannya tidak drastis, capaian ini menunjukkan upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah layak Huni	%	1,1	1,24	1,38	2,26	NA
2	Rasio Permukiman Layak Huni	%	86.41	80	87.12	88	89.07
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	86,41	80	87,12	88	89.07
4	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	23.65	65.65	56	43.02	NA



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan		100	85	90	100	NA
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	100	100	100	100
7	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	%	NA	NA	42,98	47,6	55

Sumber: DPKPLH Kab. Banjarnegara

e. **Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum, capaian penanganan gangguan trantibum linmas yang konsisten mencapai 100 persen selama lima tahun terakhir mencerminkan komitmen kuat dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengatasi setiap gangguan keamanan yang terjadi. Pencapaian ini mengindikasikan adanya sistem penanganan yang responsif dan terkoordinasi dengan baik antara berbagai elemen keamanan di daerah.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate* atau 15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2024 sebesar 12,69 menit. Penurunan waktu tanggap hingga hampir 50% dalam kurun waktu lima tahun (dari 24,65 menit menjadi 12,69 menit) mencerminkan upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan keselamatan publik dari ancaman kebakaran.

Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penanganan gangguan trantibum linmas	%	100	100	100	100	100
2	Persentase penanganan pelanggaran perda/perkada	%	71,40	84,21	86,36	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	24,65	17,60	17,21	14,05	12,69
4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	127,36 (sedang)	127,36 (sedang)	107,61 (sedang)	121,40 (sedang)	103,28 (sedang)
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	%	60,71	42,31	66,10	89,66	100
6	Persentase penegakan perda	%	71,4	84,21	116,08	100	100

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara



f. Sosial

Aspek yang paling menonjol pada capaian kinerja sosial terlihat pada indikator rehabilitasi sosial, khususnya rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang mengalami peningkatan sangat signifikan dari 42,20% pada tahun 2021 menjadi 165,74% pada tahun 2024. Pencapaian melebihi 100% ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berhasil memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak anak terlantar yang membutuhkan bantuan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas pelayanan, perluasan jangkauan program, dan mungkin juga perbaikan dalam sistem pendataan dan identifikasi penerima manfaat.

Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	%	NA	NA	27,79	13,76	24,83
2	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	NA	68,79	100,00	102,55	119,47
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	NA	42,20	100,00	115,55	165,74
4	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	NA	8,98	100,00	111,58	89,05
5	Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	NA	0,00	100,00	117,95	123,86
6	Persentase keluarga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial	%	43,80	50,85	49,57	48,31	44,78
7	Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	57,59	59,05	58,60	48,60	57,73
8	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	-6,00	-7,55	5,64	8,33	NA

Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan menunjukkan peningkatan signifikan dari 41,74% pada tahun 2022 menjadi 55,96% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas program penempatan kerja dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia.

Sementara itu, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan tantangan dalam konsistensi dan keberlanjutan



program pelatihan kerja berbasis kompetensi, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan anggaran, prioritas program, atau dampak faktor eksternal seperti pandemi Covid-19.

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	%	100	100	100	100	NA
2	Persentase perusahaan yang menerapkan K3	%	100	100	100	100	NA
3	Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan	%	69.91	79.81	80.16	79.76	73,3 4
4	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	2.76	0.86	36.65	33.66	14,6
5	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	NA	NA	41,74	33,01	55,9 6
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS Ketenagakerjaan)	%	NA	NA	100	81,82	66,6 7

Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara

b. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara cenderung mengalami peningkatan dari 73,2 pada tahun 2020 menjadi 74,3 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender yang didukung oleh peningkatan signifikan pada Anggaran Responsif Gender dalam APBD, yang naik dari 0,35 persen menjadi 1,89 persen pada periode yang sama. Peningkatan alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan program-program yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan mendukung kesetaraan gender.

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,2	73,79	73,8	74,3	74,3
2	Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD	%	0,35	0,37	1,64	2,287	1,89
3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
4	Ratio KDRT (Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO))		0,043	0,078	NA	0,0031	0,00620



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Perempuan KDRT dan TPPO yang terlayani sesuai standar	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk	%	7,40	23,70	23,74	27,34	30,94
7	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	NA	NA	0,72	27,76	31,29
8	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
9	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,434	0,224	0,301	0,301	0,28

Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara

c. **Pangan**

Kinerja urusan pangan salah satunya dapat dilihat melalui indikator Persentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 26,16 persen menjadi 100 persen pada tahun 2024. Peningkatan drastis ini menunjukkan keberhasilan program diversifikasi pangan, peningkatan produksi pertanian lokal, dan optimalisasi rantai pasok pangan yang telah diimplementasikan selama lima tahun terakhir. Pencapaian kecukupan pangan 100 persen ini merupakan indikator ketahanan pangan yang kuat dan menunjukkan bahwa daerah telah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri.

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah	%	26,16	21,79	130,00	100,00	100,00
2	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	%	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4	Ketersediaan pangan utama		179.364	169.853	171.559	227.501,31	NA
5	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/per kapita/hari	161,13	3.339	3.499	3.404	NA
6	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/per kapita/hari	127,52	73,44	73,63	81,46	NA
7	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		89,04	84,21	94,51	89,33	97,67

Sumber: Dintankan KP Kab. Banjarnegara

d. **Pertanahan**

Persentase luas tanah pemkab yang bersertifikat di Kabupaten Banjarnegara pada kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 36,63 persen menjadi 71,30 persen di tahun 2024 atau sekitar 6.931.120 m² dari total luas tanah Pemkab seluas 9.720.339 m². Saat ini, proses persertifikatan tanah masih terus dilakukan dan dianggarkan



setiap tahunnya. Secara rinci, capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas tanah pemkab yang bersertifikat	%	36,63	51,11	58,78	68,08	71,30

Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

e. Lingkungan Hidup

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di sebuah wilayah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, jika pada tahun 2020 adalah sebesar 72,78 maka pada tahun 2024 menjadi 65,76. Capaian tersebut didukung oleh capaian pembentuk IKLH, meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir dari 11,22 persen pada tahun 2020 menjadi 72,32 persen pada tahun 2024. Peningkatan lebih dari enam kali lipat ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur pengelolaan sampah, meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah, serta mengoptimalkan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Investasi pada armada pengangkut sampah, penambahan titik pengumpulan, dan peningkatan kapasitas TPA kemungkinan menjadi faktor pendorong utama peningkatan ini.

Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	72,78	62,36	64,08	61,52	65,76
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	89,39	88,62	87,91	89,36	92
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	59,31	47,5	52,86	42,68	51,24
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	65,16	39,3	39,3	42,39	42,18
5	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	32.197	22.99	55	20	20
6	Persentase cakupan area pelayanan sampah	%	19.94	22.99	55	77.64	72.32
7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	11,22	76,33	77	77,64	72,32
8	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	%	40	46,67	76,30	100	100



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemerintah Daerah Kabupaten						

Sumber: DPKPLH Kab.Banjaregara

f. Administrasi Kependudukan dan Penataan Sipil

Dari empat indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan seluruh indikator mencapai atau melampaui target. Capaian ini mencerrminkan keberhasilan implementasi sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, dimana cakupan penerbitan KTP (99,982%) berkaitan dengan peningkatan signifikan dalam penerbitan KIA (75,246%). Keberhasilan ini didukung oleh inovasi jemput bola perekaman KTP dan Kerjasama dengan rumah sakit untuk penerbitan KIA bagi bayi baru lahir, serta penggunaan aplikasi Aksi Pandusaluring untuk pembuatan akta kelahiran di tingkat desa.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,47	99,84	99,06	98,34	99,982
2	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	43,04	38,92	49,01	58,73	75,246
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	92	94,09	96,93	98,68	99,610
4	Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	NA	NA	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Selain itu, terdapat pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang menjadi salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri. Kabupaten Banjarnegara baru mengadakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital ini pada tahun 2022. Hingga tahun 2023, capaian IKD baru sebesar 14.257 ribu orang yang terdaftar dalam IKD. Kemudian, pada tahun 2024, capaian total IKD meningkat menjadi 56.590 ribu orang dari total penduduk Kabupaten Banjarnegara. Capaian tersebut masih cukup rendah sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait adanya indentitas kependudukan digital ini.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, indikator yang mengalami capaian paling signifikan terlihat pada pertumbuhan jumlah BUMDes yang berkembang, dengan peningkatan dari 0 pada tahun 2020 menjadi 45 unit pada tahun 2024. Perkembangan ini merupakan indikator keberhasilan kebijakan pengembangan ekonomi desa dan diversifikasi sumber pendapatan desa. BUMDes yang berkembang



mengindikasikan adanya pengelolaan usaha yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan, serta berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi desa. Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		13,5	13,5	13,5	13,5	NA
2	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	NA
3	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	NA
4	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	27,81	36,95	36,96	37,02	38,65
5	Jumlah kerjasama antar desa	Kerja sama	NA	NA	3	4	5
6	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah BUMDes yang berkembang	Unit	0	0	5	18	45

Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Selain itu, terdapat Indeks Desa Mandiri (IDM) sebagai alat ukur untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Berikut disajikan data terkait persentase desa mandiri Kabupaten Banjarnegara:

**Tabel 2. 47 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun
2020-2024**

Tahun	Jumlah Desa Mandiri	Persentase
2020	2	0,75
2021	2	0,75
2022	2	0,75
2023	6	2,26
2024	13	4,89

Sumber: Dispermades Kabupaten Banjarnegara

Pada tahun 2025 Indeks Desa Mandiri bertransformasi menjadi Indeks Desa guna menyederhanakan indikator dan dimensi yang digunakan dalam pengukuran pembangunan desa, dimana pada ID melakukan pengukuran kualitas tata kelola desa melalui enam dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Presentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mengalami peningkatan konsisten selama periode lima tahun, menandakan



keberhasilan edukasi masyarakat tentang efektivitas metode kontrasepsi yang lebih *sustainable*. Kemudian, terjadi penurunan angka fertilitas total dan angka kelahiran remaja yang signifikan. Keberhasilan menurunkan kelahiran pada remaja menunjukkan efektivitas program pendidikan kesehatan reproduksi dan pendampingan remaja, yang didukung oleh program Bina Keluarga Remaja meskipun cakupannya mengalami fluktuasi. Penurunan persentase pasangan dengan istri di bawah 20 tahun juga memperkuat indikasi keberhasilan upaya penundaan usia perkawinan dan kampanye anti pernikahan dini.

Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,91	6,98	6,99	6,37	6,34
2	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	31,64	32,08	32,42	35,1	36
3	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Per 1000 orang	33,49	22,66	23,24	9,09	9,51
4	Total Fertility Rate (TFR)		2,108	1,94	1,75	1,65	1,3
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,742	1,59	1,45	1,25	NA
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79,36	54,99	58,42	86,58	80,69
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	81,38	32,65	33,84	82,17	73,14
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	78,22	39,45	41,67	84,1	43,7
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	NA	55,73	58,24	61,35	60,69

Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

i. Perhubungan

Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari 27,83 persen pada tahun 2020 menjadi 46,94 pada tahun 2024. Pemenuhan Sarpras jalan di jalan Kabupaten cenderung mengalami penigkatan dari tahun ke tahun, karena adanya pengadaan perlengkapan jalan serta adanya hibah LPJU dari Kementrian ESDM di tiga tahun terakhir (2022-2024).

Sementara itu Persentase layanan angkutan darat mengalami penurunan dari 0,266 di tahun 2020 menjadi 0,084 pada 2024, kondisi ini terjadi karena jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum menurun karena kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi.



Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten	%	27,83	36,40	38,31	40,01	46,94
2	Persentase pertumbuhan jalur trayek	%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
3	Persentase kelayakan kendaraan bermotor	%	71,89	88,64	88,7	88,37	84,83
4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	498.425	349.284	439.954	602.676	575.535
5	Rasio Ijin Trayek	%	0,00136	0,0463	0,0565	0,0512	0,0533
6	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	kendaraan	9.285	9.482	9.274	8.196	7.430
7	Persentase layanan angkutan darat	%	0,266	0,273	0,217	0,158	0,084
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	88,64	92,88	97,80	88,37	84,86

Sumber: Dinhub Kab. Banjarnegara

j. **Komunikasi dan Informatika**

Capaian indikator pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat melalui capaian indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mengalami peningkatan di mana tahun 2020-2023 senilai 90,91 persen dan di tahun 2024 meningkat menjadi 100 persen dimana 11 dari 53 layanan telah terintegrasi secara online, didukung dengan penguatan keamanan melalui pemasangan antivirus dan *firewall* pada server aplikasi dan data *center*. Keberhasilan ini bersinergi dengan tercapainya 100% organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo. Walaupun begitu, masih terdapat permasalahan terkait kapasitas bandwidth yang belum optimal, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas jaringan dari kabel STP ke *Fiber Optic* dan peningkatan kapasitas dari 100Mbps menjadi 1Gb pada 7 OPD dengan penggantian converter. Diseminasi informasi publik juga mencapai kinerja optimal 100% dengan pengelolaan 16 media informasi pemerintah, meliputi media sosial (IG, FB, Twitter, Tiktok, Youtube), media aduan (LaporGub, LaporBup, WhatsApp Gateway, Lapor SP4N), Radio, Website, Media Luar Ruang (Baliho), Papan Informasi, Majalah Derap Serayu dan ditambah dengan akun Tiktok Kabupaten Banjarnegaratermasuk berbagai platform media sosial dan media konvensional.

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	90,91	90,91	90,91	90,91	100



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo	%	100	100	100	100	100
3	Persentase diseminasi informasi publik	%	100	100	100	100	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,52	2,42	2,86	3,29	3,72

Sumber: Dinkominfo Kab.Banjarnegara

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi di Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan di mana terjadi peningkatan jumlah koperasi dari 399 unit pada 2020 menjadi 443 unit pada 2024, namun persentase koperasi aktif justru menurun dari 47,11% di 2020 menjadi hanya 39,05% di 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan keberlanjutan operasional koperasi yang sudah terbentuk, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pendampingan berkelanjutan atau kesulitan adaptasi terhadap perubahan ekonomi.

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi Aktif	%	47,11	46,31	39,14	39,59	39,05
	Jumlah Koperasi	Koperasi	399	421	442	445	443
	Jumlah koperasi aktif		188	195	173	171	173
2	Persentase KSP/USP Sehat	%	NA	5,00	12,50	16,66	NA
	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam		NA	80	80 80	90	NA
3	Persentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	%	NA	NA	NA	26,85	37,57
4	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	89	89,29	89,53	89,81	90,03
5	Jumlah UMKM	unit	27.948	28.218	28.913	29.706	NA

Sumber: Disperindagkop UKM Kab.Banjarnegara

1. Penanaman Modal

Persentase peningkatan nilai investasi menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode lima tahun. Tahun 2020 menjadi titik terendah dengan kontraksi investasi sebesar -58,86%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Terjadi pemulihan signifikan pada tahun-tahun berikutnya dengan pertumbuhan positif, meskipun dengan intensitas



yang bervariasi. Pola ini mencerminkan resiliensi ekonomi daerah dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan investasi pasca-pandemi.

Jumlah investor berskala nasional mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari 59 investor di tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi ribuan pada tahun-tahun berikutnya, dengan puncaknya mencapai 10.769 investor di tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Banjarnegara dalam mempromosikan potensi daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Faktor pendukung kemungkinan meliputi kebijakan insentif yang menarik, perbaikan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang memudahkan proses investasi.

Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan nilai investasi	%	-58,86	40,3	45,84	14,77	48,04
2	Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	385,14	-12,88	211,89	191,27	NA
3	Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	-58,86	40,3	45,84	14,77	48,04
4	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	59	1.792	5.589	16.279	10.769
5	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	rupiah	270.307.861.092	500.337.653.044	729.675.573.562	837.473.768.941	1.239.806.201.884
6	Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan	%	NA	NA	267,2	2576	139

Sumber: Disnaker PMPTSP Kab.Banjarnegara

m. Kepemudaan dan Olahraga

Persentase wirausaha muda pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan menjadi 54%. Hal ini menunjukkan minat pemuda Kabupaten Banjarnegara untuk berwirausaha mandiri semakin tinggi. Kondisi ini didukung dengan kemudahan dalam memulai berwirausaha terutama secara online tanpa harus memiliki tempat usaha yang menetap.

Cakupan pembinaan olahraga untuk warga masyarakat yang memiliki potensi prestasi olahraga menunjukkan peningkatan karena pada tahun 2024 terjadi penambahan jenjang dan nomor olahraga yang diperlombakan. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah atlet yang dibina menjadi bertambah banyak sehingga peluang untuk memperoleh medali menjadi lebih banyak yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi.



Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase wirausaha muda	%	NA	NA	12,12	18,04	54
2	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	%	NA	NA	100	100	100
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	NA	NA	28	28	55
4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	NA	NA	136	36	37
5	Persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi	%	NA	NA	15	71,43	32

Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara

n. Statistik

Kabupaten Banjarnegara telah tersedia dokumen Kabupaten Dalam Angka yang berisi kumpulan data statistik yang membantu dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Data PDRB dari tahun 2022-2024 telah menggunakan data yang dirilis oleh BPS melalui web yang disediakan oleh BPS. Pada tahun 2024, Kabupaten Banjarnegara belum tersedia sistem data dan statistik yang terintegrasi dan baru akan dilaksanakan mulai tahun 2025.

Persentase ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir adalah 100%, dimana Kabupaten Banjarnegara mendapat peringkat 6 Nasioanal dengan nilai capaian 2,98 dari target 2,10. Tercapainya indikator Presentase Ketersediaan data Statistik sektoral ini disebabkan adanya kesadaran OPD dalam melaporkan pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Satistik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dikominfo dan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

o. Persandian

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah pada tahun 2024 meningkat hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan sandi



dalam komunikasi perangkat daerah guna meningkatkan keamanan. Persentase Aplikasi yang diasesmen Indeks KAMI selama kurun waktu lima tahun terakhir capaiannya adalah 4,26 persen. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan *assessment* pada aplikasi Satu Data, dimana terdapat 2 aplikasi yang sudah di *assessment*. Kemudian, telah dilaksanakan sosialisasi keamanan informasi ke semua OPD.

Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Aplikasi yang diasesmen Indeks KAMI	%	23,41	23,41	23,41	23,41	4,26
2.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	25	25	25	100	100

Sumber: Dikominfo Kabupaten Banjarnegara

p. **Kebudayaan**

Persentase kelompok seni yang melakukan registrasi pada tahun 2024 turun menjadi 15,09%, dimana jumlah kelompok kesenian yang melakukan registrasi sebanyak 171 kelompok dari total 1.133 kelompok yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sementara Persentase Fasilitasi *Event* Seni dan Budaya yang dilaksanakan cenderung mengalami peningkatan, dimana terdapat 22 event budaya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kelompok seni yang melakukan registrasi	%	NA	NA	12	22,76	15,09
2	Persentase Fasilitasi Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan	%	13	100	100	37,14	47,8
3	Persentase benda cagar budaya dipelihara	%	24	46	47,95	54	62,06
4	Penyelenggaraan festival seni budaya	Kegiatan	2	8	34	35	40
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	40	99	99	523	495
6	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	49	49	50	162	247
7	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	24	46	46	46	46

Sumber: Disparbud Kabupaten Banjarnegara

q. **Perpustakaan**

Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah selama kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari sebesar 6,84 persen pada tahun 2020



menjadi 8,51 pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat penambahan koleksi buku sejumlah 3.547 eksemplar yang bersumber dari dana aspirasi DPRD, dimana terdiri dari 2.729 eksemplar buku konvensional dan 818 eksemplar buku digital. Sementara Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan mengalami kenaikan selama kurun 5 tahun terakhir, dari 1,33 persen pada tahun 2020 menjadi 6,55 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi dari 39 perpustakaan pada ahun 2022 menjadi 53 perpustakaan pada tahun 2024. Peningkatan tersebut diimbangi dengan meningkatnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2024 sejumlah 43.478 orang.

Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah	%	6,84	6,84	7	8,06	8,51
2	Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	%	1,33	1,33	3,8	6,3	6,55
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,88	2,24	4,2	4,46	6,41
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	47,88	48,06	49,12	49,95	52,76
5	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	11.233	13.421	31.000	33.000	43.478

Sumber: Disarpus Kabupaten Banjarnegara

r. Kearsipan

Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Cakupan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin banyak Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku yang dapat memudahkan pengambilan keputusan pemerintah. Persentase tata kelola kearsipan yang baik pada tahun 2024 meningkat menjadi 100% yang sebelumnya pada tahun 2020 nilainya hanya sebesar 8,33%. Peningkatan ini terjadi dengan adanya kegiatan penataan arsip dinas, penyusutan arsip, pemberdayaan kearsipan dan pengelolaan arsip pada JIKN dan SIKN.

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip secara Baku	%	8,33	8,33	8,33	9,09	NA
3	Persentase tata kelola kearsipan yang baik	%	8,33	8,33	100	80	100



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	-	-	32,33	9,09	9,09
5	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	-	-	0	0	50

Sumber: Disarpus Kabupaten Banjarnegara

3. **Urusan Pilihan**

a. **Kelautan dan Perikanan**

Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu Perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya di perairan darat tersebar di kecamatan Purwanegara yang memiliki potensi alaminya, desa Gumiwang memfokuskan perhatiannya pada budidaya. Produksi perikanan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2024 produksi perikanan mengalami penurunan menjadi 39.810,28 ton/tahun. Selain produksi perikanan yang menurun, konsumsi ikan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 juga menurun. Kondisi ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	%	NA	100,00	100	100	100
2	Persentase produksi perikanan tangkap	%	NA	100,00	67	91,88	100
3	Persentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil.	%	100	100,00	118	100	100
4	Persentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan	%	100	100,00	100	100	100
5	Produksi Perikanan	ton	36.361	39.541	41.699	41.830,26	39.810,28
6	Konsumsi Ikan	ton/th	27.377	29,542	29,542	31.161,54	27,76
7	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	20	17	18	32,56	18,7

Sumber: Dintanken KP Kabupaten Banjarnegara

b. **Pariwisata**

Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024 tercatat jumlah kunjungan wisata mencapai 2.158.718 orang dengan persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 1,14%. Angka peningkatan ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 5,23%. Hal ini tidak terlepas dari adanya pembangunan obyek wisata yang mengalami



penurunan pada tahun 2024, dimana baru terdapat 3 wisata yang dilakukan pembangunan dari 7 destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pembangunan obyek wisata	%	25	25	54,55	50	42,85
2	Persentase Peningkatan kunjungan wisata	%	0	14	66.30	5,23	1,14
3	Persentase peningkatan lama tinggal	%	0	14	9,45	1,1	1,1
4	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata	%	NA	NA	36,36	18	23
5	Kunjungan Wisata	Orang	1.070.556	1.219.951	2.028.951	2.134.281	2.158.718
6	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	8.997.750.000	13.864.283.000	20.100.348.000	21.499.715.000	22.924.652.924

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara

c. Pertanian

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dimana pada tahun 2024 produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal mencapai 6,89%. Guna mendukung adanya peningkatan produktifitas dan memperoleh posisi daya saing tinggi diperlukan adanya dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai. Persentase penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan, dan bidang peternakan telah mencapai angka 100% hingga tahun 2024. Pencapaian ini didukung dengan adanya bantuan bibit buah-buahan, benih tanaman pangan, bantuan ternak, pembangunan RJIT, JUT, dan jalan produksi.

Data 2020–2024 menunjukkan produksi daging sapi dan kambing cenderung meningkat, dengan lonjakan signifikan pada 2024 terutama untuk kambing. Produksi telur ayam kampung mengalami kenaikan tajam hingga 2022, namun tidak ada data pada 2023–2024 sehingga tren selanjutnya belum dapat dinilai. Produksi susu sapi perah relatif kecil dan sempat menurun di 2023 sebelum sedikit naik di 2024. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika pada sektor peternakan, seperti peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan manajemen budidaya.

Data populasi ternak di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan adanya tren penurunan signifikan pada hampir semua jenis ternak dari periode awal hingga periode akhir yang tercatat. Penurunan tajam terlihat pada sapi potong yang awalnya berjumlah 29.049 ekor menjadi hanya 18.184 ekor, serta kambing yang turun dari 197.169 ekor menjadi 188.069 ekor. Populasi domba



juga menurun drastis dari 68.402 ekor menjadi 29.497 ekor. Penurunan yang sangat ekstrem terlihat pada sapi perah dan kerbau, masing-masing turun dari ratusan ekor menjadi hanya puluhan, mengindikasikan adanya tantangan besar dalam pemeliharaan ternak tersebut. Ternak non-ruminansia seperti kuda dan babi relatif lebih stabil, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan ternak ruminansia. Tren penurunan ini dapat mencerminkan dampak dari faktor eksternal seperti perubahan lahan, ketersediaan pakan, penyakit ternak, maupun pergeseran minat peternak, dan jika berlanjut, dapat memengaruhi ketahanan pangan hewani di wilayah tersebut.

Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	NA	86,60	92	60,8	100
2	Persentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan penganggulan bencana pertanian	%	NA	100,00	90	100	100
3	Persentase pembinaan kelembagaan kelompok tani	%	NA	90	60,83	142,4	92,74
4	Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	30,58	29,88	29,61	28,62	28,48
5	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal	%	6,33	6,73	6,85	6,74	6,89
6	Produksi daging sapi	kg	1.604.960	1.963.248	1.947.809,04	3.899.172	3.683.522
7	Produksi daging kambing	kg	114.220	122.114	123,446,25	92.587	268.667,98
8	Produksi telur unggas (ayam kampung)	kg	422.799	1.284.253,10	3.754.861,92	NA	NA
9	Produksi susu sapi perah	kg	43.896	49.382,55	NA	36.165,04	39.782
10	Ternak Ruminansia						
	1. Populasi ternak sapi perah	Ekor	391	397	322	76	78
	2. Populasi ternak sapi potong	Ekor	29.049	31.008	27.723	17.323	18.184
	3. Populasi ternak kerbau	Ekor	489	491	484	180	172
	4. Populasi ternak kambing	Ekor	197.169	209.483	210.478	171.237	188.069



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	5. Populasi ternak domba	Ekor	68.402	70.114	70.829	24.511	29.497
11	Ternak Non Ruminansia						
	1. Populasi ternak Kuda	Ekor	76	76	84	23	24
	2. Populasi ernak babi	Ekor	264	265	256	69	69

Sumber: Dintankan KP Kabupaten Banjarnegara

d. Perindustrian

Persentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari tahun 2020 sebesar 1,75%, pada tahun 2024 pesentasenya sebesar 4,07% meningkat sebanyak 2,32%. Peningkatan persentase tercapai dengan melakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas dengan pelatihan dan fasilitasi kepada 275 IKM, meliputi IKM olahan pangan, rajut, dan animasi yang didanai dari anggaran APBD II.

Persentase PDRB Industri Pengolahan di tahun 2020 nilainya sebesar 15,16% dan meningkat menjadi 16,57% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kontribusi pada sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	%	1,75	2,24	2,24	3,13	4,07
2	Persentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi	%	NA	NA	0,43	0,15	NA
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai	80	95	95	95	95
4	Persentase PDRB Industri Pengolahan	%	15,16	15,56	15,73	16,4	16,57

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

e. Perdagangan

Perekonomian Kabupaten Banjarnegara banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara yang menduduki urutan ketiga terbesar. Kinerja Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia tercapai karena stok



kebutuhan pokok dan bahan penting relatif stabil dengan persentase di tahun 2024 sebesar 80%. Hal ini terjadi karena Disperindagkop UKM melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok melalaui Aplikasi SiPINTER APIK di 3 pasar yaitu Pasar Kota Banjarnegara, Pasar Karangobar dan Pasar Mandiraja.

Pertumbuhan ekspor Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 menunjukkan knerja yang sangat baik dari tahun sebelumnya yait mencapai 5,05%. Keberhasilan ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam langkah perbaikan yang diambil. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi strategi pemasaran, peningkatan daya saing produk, dan pembukaan akses pasar baru. Di Kabupaten Banjarnegara tercatat terdapat 25 pasar yang terdiri dari 21 pasar umum, 3 pasar hewan, dan 1 pasar buah.

Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	NA	NA	NA	10	16
2	Persentase jumlah pedagang kaki lima yang terbina	%	NA	NA	100	80	80
3	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia	%	NA	NA	100	80	80
4	Persentase penyelenggaraan promosi perdagangan	%	NA	NA	100	100	100
5	Persentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan	%	NA	NA	NA	0	5,05

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

f. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan hingga tahun 2024 adalah 0 karena tidak ada transmigran yang diberangkatkan yang dikarenakan tidak tersedianya anggaran.

Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan	%	NA	NA	0	0	0

Sumber: Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara

4. Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan



Kabupaten Banjarnegara telah menyusun dan menetapkan seluruh dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW dalam setiap tahunnya sehingga persentase mencapai 100%. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sudah saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Hal ini terlihat dari tingginya persentase penjabaran konsistensi program dalam dokumen RPJMD ke dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase tersedianya dokumen perencanaan RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100
3	Penjabaran Konsistensi program RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD bidang perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	%	100	100	100	96,43	90,24
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Program	413	160	112	123	130
10	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Program	413	110	106	106	105

Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

b. Keuangan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan Opini WTP yang ke 11 kalinya secara berturut turut atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dimana BPPKAD sebagai koordinator penyusunan LKD. Capaian persentase Penerbitan SP2D terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan, ini artinya semua SPP/SPM yang diajukan telah diterbitkan SP2Dnya sesuai SOP yang ada. Realisasai serapan dana transfer pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,42% dari target 100%. Hal ini karena selain serapan bergantung pada kontrak dari OPD pengelola DAK



juga karena adanya sisa dana tahun lalu yang diperhitungkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara telah selesai disusun dan disajikan tepat waktu.

Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
3	Persentase serapan dana transfer daerah	%	93,65	105,9	117	93,43	98,42
4	Persentase Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
6	Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD	%	>90	>90	>90	>90	100
7	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah	%	- 12,34	14,12	27,12	9,74	5,07

Sumber: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

c. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami peningkatan signifikan dari hanya 1,2% pada 2020 menjadi 64,78% pada 2024. Peningkatan tajam ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap pengembangan kompetensi pegawai, kemungkinan didorong oleh tuntutan adaptasi teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menariknya, persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural justru mengalami penurunan dari 70,2% pada 2020 menjadi 52,64% pada 2024. Penurunan ini mungkin mencerminkan pergeseran fokus dari pelatihan struktural menuju pelatihan fungsional dan teknis yang lebih mendukung profil jabatan baru dalam reformasi birokrasi.

Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,2	37,52	34,76	56,42	64,78
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	70,2	37,18	48,39	61,11	52,64
3	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,18	0,05	0,09	0,12	0,11



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	jabatan	27	29	29	29	29
5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	jabatan	692	621	455	455	455
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	orang	4.748	5.156	5.786	6.890	7.217

Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

d. **Penelitian dan Pengembangan**

Dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil kelitbangan di tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 100%. Pada tahun 2024 dilakukan 2 riset yang telah disusun laporannya yang berfungsi sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	NA	20	60	100
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	NA	20	31	100

Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

e. **Pengawasan**

Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, dan BPK RI terealisasi rata-rata 95,996% dengan status "Tercapai". Hal ini dikarenakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pengawasan kinerja, keuangan, pengawasan desa, revidu laporan kinerja, revidu laporan keuangan dan pengawasan dengan tujuan tertentu serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dapat terlaksana dengan lancar. Pada tahun 2024, nilai kapabilitas APIP mencapai Level 3 (*Integrated*) dengan target level 3, yang berarti tingkat ketercapaian mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, manajemen audit internal dan praktik secara profesional telah diterapkan secara seragam di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerinkasaan Internal dan Eksternal	%	94,96	95,88	95,62	96,66	96,85
	Insp Kabupaten	%	89,64	91,43	90,78	94,19	96,25
	Insp Provinsi	%	100	100	98,69	99,7	98,81
	BPK-RI	%	95,23	96,22	97,40	96,10	95,50



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	3	3
3	Indeks Integritas Nasional (SPI)	Angka	-	77,23	74,21	73,93	75,28
4	Maturitas SPIP	Nilai	3,082	2,452	2,753	2,926	3,079

Sumber: Inspektorat Kab. Banjarnegara

f. Sekretariat Daerah

Nilai SAKIP Pemerintah Daeah Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan kembali di tahun 2024 menjadi BB. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara semakin baik, akuntabel, dan program-program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran. Sementara itu, skor LPPD kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skoring LPPD	Skor (Status)	3,1099 (Sangat Tinggi)	1,85 (Rendah)	3,3059 (Sedang)	NA	3,5059
2	Nilai SAKIP Setda	Huruf	B	B	CC	B	BB
3	Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100
4	Persentase pengkoordinasian kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan Kinerja	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

g. Sekretariat DPRD

Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda pada tahun 2022 hingga 2024 juga telah terlaksana 100%, dimana pada tahun 2024 terlaksana 12 Rancangan Peraturan Daerah. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran, terdiri dari kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang teralisasi 100 %, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terealisasi sebesar 100 %, penghimpunan aspirasi masyarakat



teralisasi sebesar 100 % dan pengawasan kode etik DPRD terealisasi sebesar 100 % sehingga rata-rata capaian menjadi 100 %.

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase capaian kinerja Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten	%	NA	NA	96,7	99,08	97,91
2	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	%	NA	NA	100	100	100
3	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	%	NA	NA	95,69	95,5	100
4	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda	%	NA	NA	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

h. Kewilayahan

Kinerja penunjang kewilayahan yang dilakukan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan capain yang sangat baik. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bajarnegara memiliki persentase yang sangat baik yaitu 100%. Capaian tersebut dapat diartikan sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	100	100	100	100	100
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100
	3. Kecamatan Batur	%	100	100	100	99,9	100
	4. Kecamatan Bawang	%	100	100	92	100	100
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	100	100
	6. Kecamatan Karangkobor	%	100	100	100	95,5	100
	7. Kecamatan Madukara	%	100	100	100	99,73	100
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	100	100	100
	9. Kecamatan Pagedongan	%	99,83	100	100	100	100
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	100	93,98	106,8	100
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	100	100	99,8



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	98,82	99,68	100
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	100	100	100	100
	15. Kecamatan Purwareja-Klampok	%	100	100	100	100	100
	16. Kecamatan Rakit	%	100	100	100	100	100
	17. Kecamatan Sigaluh	%	97,59	97,01	99,91	97,31	100
	18. Kecamatan Susukan	%	100	100	100	97,24	100
	19. Kecamatan Wanadadi	%	100	100	100	100	100
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	100	100	103	100
2.	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	NA	NA	NA	NA	NA
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100
	3. Kecamatan Batur	%	NA	NA	NA	NA	NA
	4. Kecamatan Bawang	%	NA	NA	NA	NA	NA
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	NA	NA
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	NA	NA	NA	NA	NA
	7. Kecamatan Madukara	%	100	100	100	82,75	100
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	100	100	100
	9. Kecamatan Pagedongan	%	NA	NA	NA	NA	NA
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	100	100	100	100
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	100	100	NA
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	100	100	NA
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	NA	NA	NA	NA
	15. Kecamatan Purwareja-Klampok	%	100	100	100	100	100
	16. Kecamatan Rakit	%	NA	NA	NA	NA	NA
	17. Kecamatan Sigaluh	%	97,72	80,46	99,7	95,22	100
	18. Kecamatan Susukan	%	NA	NA	NA	93,5	NA
	19. Kecamatan Wanadadi	%	NA	NA	NA	NA	NA
	20. Kecamatan Wanayasa	%	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum						
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	NA	NA	NA	NA	NA
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	NA	NA
	3. Kecamatan Batur	%	NA	NA	NA	NA	NA
	4. Kecamatan Bawang	%	NA	NA	NA	NA	NA
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	NA	NA
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	NA	NA	NA	NA	NA
	7. Kecamatan Madukara	%	100	100	NA	NA	NA
	8. Kecamatan Mandiraja	%	NA	NA	NA	100	NA
	9. Kecamatan Pagedongan	%	NA	NA	NA	NA	NA
	10. Kecamatan Pagentan	%	NA	NA	NA	NA	NA
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	100	100	NA



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	100	100	NA
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	NA	NA
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	NA	NA	NA	NA
	15. Kecamatan Purwareja-Klompok	%	100	100	100	NA	100
	16. Kecamatan Rakit	%	NA	NA	NA	NA	NA
	17. Kecamatan Sigaluh	%	90,54	88,67	80,35	NA	NA
	18. Kecamatan Susukan	%	NA	NA	NA	100	NA
	19. Kecamatan Wanadadi	%	NA	NA	NA	NA	NA
	20. Kecamatan Wanayasa	%	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	100	100	100	100	100
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100
	3. Kecamatan Batur	%	100	100	100	100	100
	4. Kecamatan Bawang	%	100	100	100	100	100
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	100	100
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	100	100	100	100	100
	7. Kecamatan Madukara	%	100	100	100	100	100
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	100	100	100
	9. Kecamatan Pagedongan	%	100	100	100	100	100
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	100	100	100	100
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	100	100	100
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	100	100	100
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	100	100	100	100
	15. Kecamatan Purwareja-Klompok	%	100	100	100	100	100
	16. Kecamatan Rakit	%	100	100	100	100	100
	17. Kecamatan Sigaluh	%	100	99,9	100	84,67	100
	18. Kecamatan Susukan	%	100	100	100	100	100
	19. Kecamatan Wanadadi	%	100	100	100	100	100
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
	1. Kecamatan Banjarmangu	%	100	100	100	100	100
	2. Kecamatan Banjarnegara	%	100	100	100	100	100
	3. Kecamatan Batur	%	100	100	100	100	100
	4. Kecamatan Bawang	%	100	100	100	100	100
	5. Kecamatan Kalibening	%	100	100	100	100	100
	6. Kecamatan Karangkoobar	%	100	100	100	100	100
	7. Kecamatan Madukara	%	100	100	100	99,64	100
	8. Kecamatan Mandiraja	%	100	100	100	100	100
	9. Kecamatan Pagedongan	%	100	100	100	100	100
	10. Kecamatan Pagentan	%	100	100	100	100	100
	11. Kecamatan Pandanarum	%	100	100	100	100	99,86



No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	12. Kecamatan Pejawaran	%	100	100	100	100	100
	13. Kecamatan Punggelan	%	100	100	100	100	100
	14. Kecamatan Purwanegara	%	100	100	100	100	100
	15. Kecamatan Purwareja-Klompok	%	100	100	100	100	100
	16. Kecamatan Rakit	%	100	100	100	100	100
	17. Kecamatan Sigaluh	%	90,54	77,96	92,25	73,9	100
	18. Kecamatan Susukan	%	100	100	100	100	100
	19. Kecamatan Wanadadi	%	100	100	100	100	100
	20. Kecamatan Wanayasa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kabupaten Banjarnegara

5. **Urusan Pemerintahan Umum**

a. **Kesatuan Bangsa dan Politik**

Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga kenteraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase penanganan konflik dan jumlah konflik sosial mengalami peningkatan hingga 100%. Kondisi ini terjadi karena terdapat koordinasi dengan stakeholder terkait melalui tim Wasdinda, FKUB, Ormas Keagamaan, FKOM, dan Forkompimda dalam proses identifikasi, penanganan, dan penyelesaian konflik. Hal tersebut dapat diartikan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan dengan baik, dengan adanya penanganan konflik yang menyentuh angka 100%.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penanganan konflik sosial	%	-40	-33	-1	100	100
2	Jumlah konflik sosial		(3 Konflik) 100	(2 Konflik) 60	(0 Konflik) 100	(0 Konflik) 100	(0 Konflik) 100
3	Persentase Elemen masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	%	0	50	50	25	25
4	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	0	100	100	100	100
5	Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Tercatat (SKT) Ormas	%	120	280	88	106	25
6	Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	%	0	100	100	100	100

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

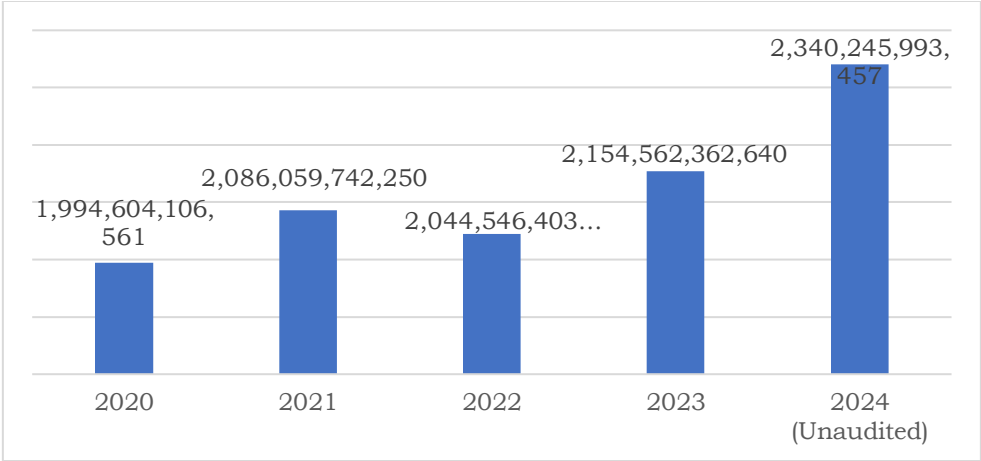
Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dari sebesar 1.994.604.106.561 pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.340.245.993.457 pada tahun 2024. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



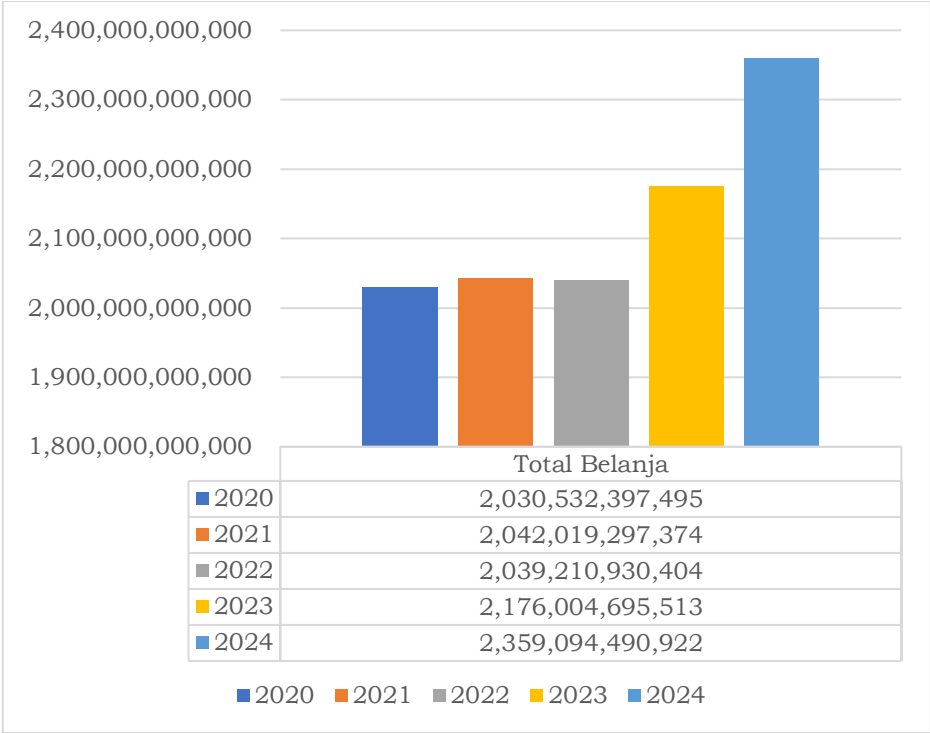
Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 46 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selama kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan dari 271.999.439.888 menjadi 430.776.074.334. **Pendapatan transfer** mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 pendapatan transfer mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 1.719.953.264.985 tahun 2020 menjadi 1.897.092.029.498 pada tahun 2024. Pencapaian target dana transfer pemerintah pusat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Perkembangan **lain-lain pendapatan daerah yang sah** mengalami fluktuasi dengan kecenderungan naik dari sebesar 2.651.401.688 pada tahun 2020 menjadi 12.377.889.625 pada tahun 2024.

2. Kinerja Belanja Daerah

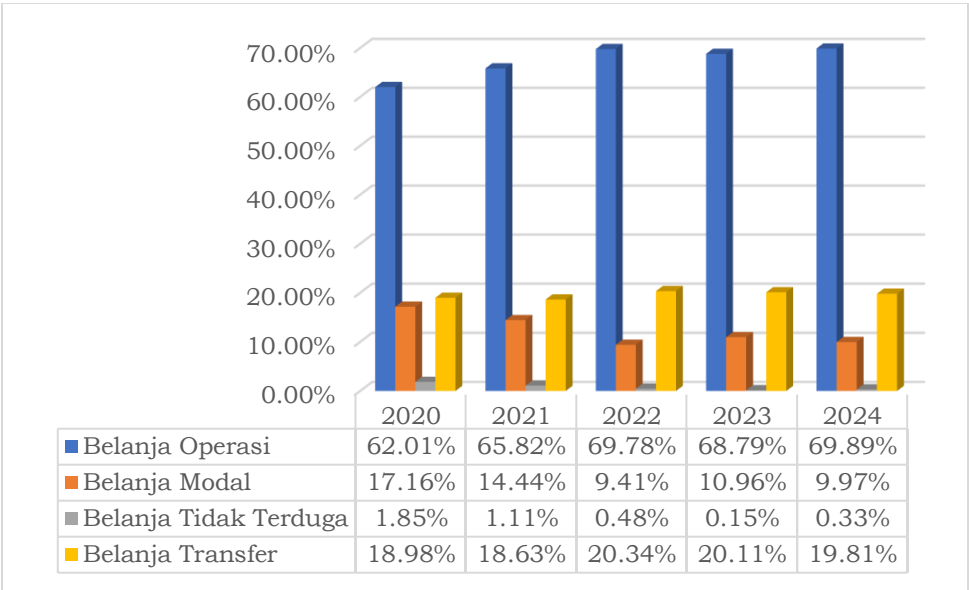
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan angka yang cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Tercatat realisasi 2.030.532.397.495 pada tahun 2020 menjadi 2.359.094.490.922 pada tahun 2024. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 47 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. **Belanja operasi** terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Proporsi belanja operasi sangat dominan ditunjukkan dengan proporsi selama tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu berada di atas 60%. Besarnya proporsi dan peningkatan pada belanja operasi dipengaruhi oleh komponen belanja pegawai yang meningkat signifikan sebagai akibat dari upaya penyelesaian skema non ASN menjadi penyumbang cukup besar terhadap kenaikan belanja pegawai. Sebaliknya proporsi **belanja modal** cenderung turun dari semula 17,16% pada 2020 menjadi 9,97% pada tahun 2024. **Belanja transfer** yang digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah kabupaten ke desa proporsinya fluktuatif namun cenderung meningkat. Sedangkan **belanja tidak terduga** proporsinya cenderung turun hal ini disebabkan oleh sifat belanja ini yang sifatnya respon terhadap kejadian yang di luar perkiraan. Berikut disajikan grafik proporsi perkembangan belanja daerah tahun 2020-2024.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 48 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

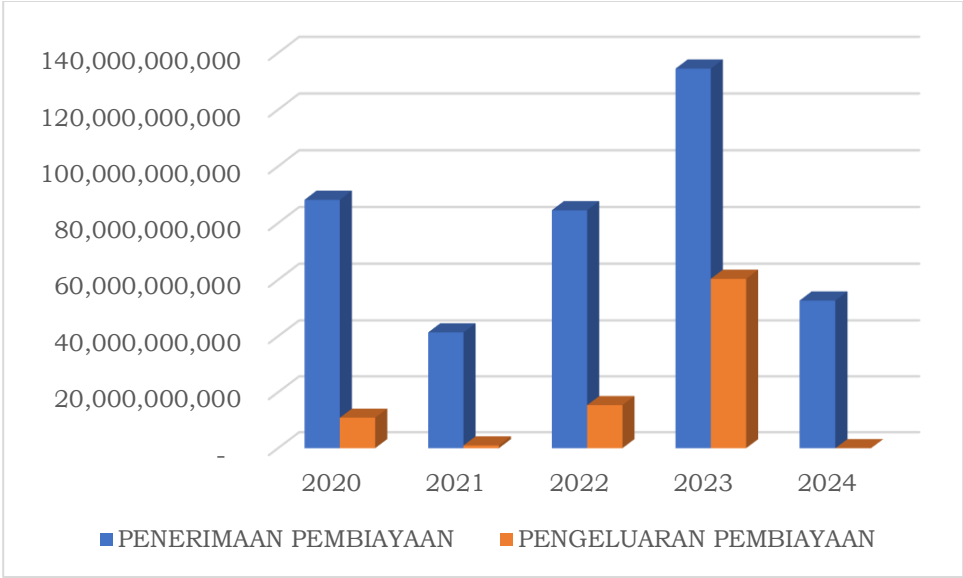
3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Banjarnegara berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.88.211.343.324,- menjadi Rp.52.668.790.294,- Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.10.900.000.000,- menjadi Rp.0,- yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan cenderung fluktuatif dari sebesar Rp.77.311.343.324,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.52.668.790.294,00 pada tahun 2024.

Berikut ini grafik perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.



Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

Grafik 2. 49 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020-2024

Berikut ini disajikan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024.



Tabel 2. 74 Perkembangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	271.999.439.888	361.184.263.870	332.946.400.219	384.834.335.352	430.776.074.334
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	87.998.313.990	106.278.716.461	123.232.926.993	131.419.557.757	132.160.024.508
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	16.589.489.104	24.707.701.210	31.167.385.785	32.983.845.779	264.812.325.940
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.290.379.441	17.259.412.303	18.112.778.934	21.421.057.648	22.924.652.924
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	152.121.257.353	212.938.433.896	160.433.308.507	199.009.874.168	10.879.070.962
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.719.953.264.985	1.708.530.720.433	1.684.274.856.914	1.750.381.790.752	1.897.092.029.498
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.633.849.889.603	1.626.640.585.379	1.593.758.070.388	1.648.625.871.102	1.746.203.537.167
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.103.375.382	81.890.135.054	90.516.786.526	101.755.919.650	150.888.492.331
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.651.401.688	16.344.757.947	27.325.146.172	19.346.236.536	12.377.889.625
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.651.401.688	16.344.757.947	27.325.146.172	19.346.236.536	12.377.889.625
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.994.604.106.561	2.086.059.742.250	2.044.546.403.305	2.154.562.362.640	2.340.245.993.457
	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	1.259.046.892.519	1.344.038.014.010	1.422.892.577.443	1.496.793.103.676	1.648.678.055.190
5.1.01	Belanja Pegawai	827.241.565.328	816.467.236.902	822.165.098.279	860.598.828.833	968.930.096.077
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.433.531.055	454.676.014.419	460.739.268.016	485.754.204.183	544.550.887.906
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	202.222.224	0



KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	30.246.917.201	64.128.276.592	124.972.787.105	142.069.272.436	129.815.223.207
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.124.878.935	8.766.486.097	15.015.424.043	8.168.576.000	5.381.848.000
5.2	BELANJA MODAL	348.505.249.709	294.844.828.809	191.794.043.374	238.397.698.407	235.196.246.888
5.2.01	Belanja Modal Tanah	117.722.300	341.529.000	2.093.268.000	0	11.962.468.203
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.425.419.090	46.568.895.498	51.750.636.616	64.110.186.058	87.106.724.079
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.186.677.468	49.020.896.250	69.077.600.844	117.409.209.690	86.285.377.085
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	247.092.540.257	194.089.691.735	61.669.040.480	44.502.570.419	38.960.492.936
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.682.890.594	4.823.816.326	7.203.497.434	12.375.732.240	10.174.252.385
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	706.932.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.594.817.867	22.654.563.455	9.705.855.737	3.288.493.930	7.819.955.344
5.4	Belanja Transfer	385.385.437.400	380.481.891.100	414.818.453.850	437.525.399.500	467.400.233.500
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.714.442.000	11.040.471.500	13.609.639.250	12.937.698.500	17.873.797.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	373.670.995.400	369.441.419.600	401.208.814.600	424.587.701.000	449.526.436.000
	JUMLAH BELANJA	2.030.532.397.495	2.042.019.297.374	2.039.210.930.404	2.176.004.695.513	2.359.094.490.922
	PEMBIAYAAN					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88,211,343,324	41,384,263,390	84,518,650,266	134,454,123,167	52,668,790,294
	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	88,157,618,246	41,384,263,390	84,518,650,266	74,454,123,167	52,668,790,294
	Pencairan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0



KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	53,725,078	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD	0	0	0	60,000,000,000	0
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,900,000,000	1,000,000,000	15,400,000,000	60,343,000,000	0
	Penyertaan Modal Daerah	10,900,000,000	1,000,000,000	15,400,000,000	343,000,000	0
	Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD	0	0	0	60,000,000,000	0
	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	77,311,343,324	40,384,263,390	69,118,650,266	74,111,123,167	52,668,790,294

Sumber: LRA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024



2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Perkembangan jumlah aset Kabupaten Banjarnegara menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp.4,528 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.4,565 miliar pada tahun 2023. Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari Rp.21,558 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.49,912 milyar pada tahun 2023. Sementara itu jumlah ekuitas dana naik dari Rp.4,507 miliar pada tahun 2020 menjadi 4,565 miliar pada tahun 2023, secara lengkap Neraca Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. 75 Neraca Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	%(*) CAGR
A	ASET						
1	ASET LANCAR	113,125,935,585	135,271,414,743	141,945,516,177	110,417,705,171	NA	-0,80
	Kas di Kas Daerah	19,889,824,377	27,127,109,504	27,149,761,487	26,969,645,437		
	Kas di Bendahara Penerimaan	211,225,540	96,145,000	94,841,000	440,447,600		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	22,113,736	20,000	363,000			
	Kas di BLUD	18,379,758,508	56,734,726,609	46,879,590,526	21,338,998,092		
	Kas di Bendahara BOS	2,740,689,771	565,903,077	331,770,474	94,491,898		
	Kas di Bendahara FTKP/BOK				3,825,207,267		
	Kas Lainnya	212,822,774			1,840,320		
	Piutang Pendapatan	48,492,846,959	26,741,125,009	34,154,000,235	37,538,039,769		
	Penyisihan Piutang	-5,190,655,646	-7,592,004,816	-14,033,849,844	-14,083,906,096		
	Piutang Pajak	2,517,002,473	2,931,055,123	3,626,111,271	3,251,908,731		
	Penyisihan Piutang Pajak	-1,087,884,325	-1,422,825,839	-1,708,470,616	-996,873,061		
	Piutang Pajak Netto	1,429,118,147	1,508,229,284	1,917,640,656	2,255,035,670		
	Piutang Retribusi	2,306,343,146	2,740,742,947	2,994,150,362	3,401,511,116		
	Penyisihan Piutang Retribusi	-596,083,123	-865,782,435	-1,162,436,085	-1,572,578,864		
	Piutang Retribusi Netto	1,710,260,023	1,874,960,512	1,831,714,277	1,828,932,252		
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0			
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0			
	Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	0	0	0	0		
	Piutang Lain lain PAD yang Sah	26,223,143,563	17,812,700,816	25,499,809,331	26,088,086,591		
	Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	-1,998,390,494	-5,262,836,661	-11,162,943,144	-11,514,454,170		
	Piutang Lain lain PAD yang Sah netto	24,224,753,069	12,549,864,155	14,336,866,187	14,573,632,421		
	Piutang Pendapatan Transfer	17,035,409,686	3,256,626,123	2,033,929,271	4,796,533,331		
	Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer	-1,508,297,704	-40,559,882	0	0		
	Piutang Pendapatan Transfer netto	15,527,111,982	3,216,066,241	2,033,929,271	4,796,533,331		
	Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah Lainnya	410,948,091	0	0	0		



No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	%(*) CAGR
	<i>Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah Lainnya</i>	0	0	0	0		
	Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah Lainnya netto	410,948,091	0	0	0		
	Beban Dibayar Dimuka	584,510,330	1,165,132,123	779,342,661	339,177,127		
	Persediaan	27,782,799,236	30,433,258,237	46,589,696,638	33,953,763,756		
	Persediaan Bahan Habis Pakai	27,782,799,236	30,433,258,237	46,589,696,638	33,953,763,756		
	Persediaan Bahan/Material						
	Persediaan Brg Diserahkan ke Masyarakat						
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	121,502,303,921	133,824,669,766	147,927,010,345	148,818,080,983	NA	6,99
a	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	804,906,237	1,217,101,399	0	0		
	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0		
	Investasi Dalam Obligasi	0	0	0	0		
	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0		
	Dana Bergulir	9,969,318,740	6,939,053,473	0	0		
	<i>Penyisihan Investasi Non Permanen</i>	-9,164,412,503	-5,721,952,074	0	0		
b	Investasi Jangka Panjang Permanen	120,697,397,684	132,607,568,367	147,927,010,345	148,818,080,983		
	Penyertaan Modal pada PT BPD	73,970,000,000	73,970,000,000	83,970,000,000	83,970,000,000		
	Penyertaan Modal pada Perusda.	12,974,991,537	12,869,375,415	12,640,263,627	13,278,058,667		
	Penyertaan Modal pada PD BPR/BKK	33,485,406,147	45,501,192,952	51,049,746,718	51,303,022,316		
	Penyertaan Modal pada PRPP	267,000,000	267,000,000	267,000,000	267,000,000		
	Penyertaan Modal Pabrik Gula Mini	0	0	0	0		
3	ASET TETAP	6,841,090,226,622	7,161,275,178,612	7,365,636,557,347	7,406,814,632,434	NA	2,68
	Tanah	1,186,013,045,527	1,202,559,975,387	1,207,495,808,167	1,078,474,614,781		
	Peralatan dan Mesin	636,393,380,496	687,832,907,365	742,269,659,161	776,256,607,253		
	Gedung dan Bangunan	1,607,229,462,198	1,659,116,033,206	1,729,878,903,369	1,767,147,363,998		
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,296,033,827,918	3,499,106,335,015	3,563,388,708,146	3,610,850,928,465		
	Aset Tetap Lainnya	106,888,905,810	111,474,677,586	117,942,387,410	125,819,948,647		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8,531,604,673	1,185,250,053	4,661,091,094	48,265,169,290		



No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	%(*) CAGR
	Akumulasi Penyusutan	-2,548,663,586,391	-2,821,228,966,475	-3,042,083,235,170	-3,253,479,568,173		
	Nilai Buku Aset Tetap	4,292,426,640,231	4,340,046,212,137	4,323,553,322,177	4,153,335,064,261		
4	PROPERTI INVESTASI	0	0	0	141,750,210,518	NA	0
	Properti Investasi - Tanah				129,272,818,286		
	Properti Investasi - Peralatan dan Mesin				286,131,560		
	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan				19,444,143,078		
	Properti Investasi - Jalan, Irigasi dan Jaringan				690,185,200		
	Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya				8,173,000		
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi				-7,951,240,606		
5	ASET LAINNYA	1,864,845,239	2,042,437,971	7,456,510,428	11,170,934,218	NA	81,61
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	106,314,474	105,814,474	105,314,474	104,964,474		
	Aset Tak Berwujud	3,960,503,750	4,469,680,400	4,486,630,250	5,184,742,950		
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-2,929,842,510	-3,425,659,000	-3,207,117,940	-3,779,834,470		
	Aset Tidak Berwujud Netto	1,030,661,240	1,044,021,400	1,279,512,310	1,404,908,480		
	Aset Lain-lain (Rusak)	5,034,631,532	5,000,543,467	6,211,609,498	34,131,144,563		
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rusak)	-4,306,762,007	-4,107,941,370	-4,469,779,667	-28,478,371,299		
	Aset Lain-lain Netto	727,869,525	892,602,097	1,741,829,831	5,652,773,264		
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			4,329,853,813	4,008,288,000		
	Aset untuk D hibahkan		0	0	0		
	Piutang Lebih dari 1 tahun	0	0	0	0		
	Penyisihan	0	0	0	0		
	JUMLAH ASET	4,528,919,724,976	4,611,184,734,617	4,620,882,359,127	4,565,491,995,151	NA	0,27
B	KEWAJIBAN	21,558,235,705	24,306,773,816	32,956,897,033	49,912,862,766	NA	32,29
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,558,235,705	24,306,773,816	32,956,897,033	49,912,862,766	NA	32,29
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	73,382,316	5,253,924	2,203,320	1,840,320		
	Pendapatan Diterima Dimuka	2,594,368,467	2,421,018,299	1,993,119,927	1,624,953,907		
	Utang Beban	18,890,484,922	21,880,501,593	30,961,573,786	48,286,068,539		
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0		



No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	%) CAGR
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	NA	0
	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0		
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0		
C	EKUITAS DANA	4,507,361,489,270	4,586,877,960,801	4,587,925,462,094	4,515,579,132,383	0	0,06
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4,528,919,724,976	4,611,184,734,617	4,620,882,359,127	4,565,491,995,149	0	0,26

*) Rata-Rata Pertumbuhan
Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Analisis Neraca Keuangan Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sementara itu Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang dengan menggunakan Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (*Debt to Asset Ratio*). Analisi rasio keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 76 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	5	6	4	2	NA
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	4	4	3	2	NA
3.	Rasio total hutang terhadap total asset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,0048	0,0053	0,0071	0,0109	NA

Sumber: LKD Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan arti dari masing-masing rasio sebagai berikut.

- 1) Rasio Lancar (Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2020 sebesar 5 dimana terus turun menjadi 2 pada tahun 2023. Melihat perkembangan tersebut Pemerintah Kabupaten mulai menggunakan asetnya dengan baik (dapat ditekan dibawah 3) dan masih menunjukkan angka ideal dalam kemampuan untuk melunasi hutang.

- 2) Rasio Cepat (Aset Lancar–Persediaan/Kewajiban Jangka Pendek)

Quick Ratio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2020 sebesar 4 dan menurun menjadi 2 pada tahun 2023. Hal ini dapat diartikan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajibannya.

- 3) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan berdasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 serta anggaran tahun 2025, pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.297.316.712.000,- dan menjadi sebesar Rp.2.625.083.042.975,- pada tahun 2030. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2025-2029 berada pada angka diatas 4,5-5%.
- b. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tumbuh sesuai dengan target RPJMD berada pada angka di atas 5%.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik rata-rata 7,54%.
- d. Dana Transfer diproyeksikan naik rata-rata 1%. Kenaikan berasal dari dana transfer yang bersifat block grant.
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan turun seiring dengan berakhirnya kegiatan UPLAND. Untuk proyeksi pendapatan hibah sifatnya insidental berbasis program yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2030 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya pungutan pajak daerah sebagai salah satu komponen dari PAD. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PAD sebagai berikut:
 - 1) Mempersiapkan transisi pelaksanaan opsen PKB dengan memperkuat dukungan pada penggalan data, penagihan, dan perumusan SOP yang efektif.
 - 2) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang prinsip teguh prinsip akuntabilitas transparansi. Terutama pada sektor pajak yang memiliki potensi besar seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu, serta Pajak Reklame.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola penerimaan PAD.
- c. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- d. Optimalisasi kinerja BUMD.
- e. Optimalisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat berasal dari pinjaman, hasil investasi, CSR, dsb.



Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2026-2030 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 77 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	444.477.740.000	472.244.811.838	507.152.574.459	545.878.051.070	589.150.401.703
Pendapatan Pajak Daerah	173.572.548.000	182.924.980.754	197.312.942.422	213.125.608.479	230.557.870.997
Hasil Retribusi Daerah	232.759.453.000	245.938.512.877	260.584.702.230	276.368.053.575	293.439.075.603
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.426.506.000	29.093.012.228	32.192.878.914	35.623.037.059	39.418.679.289
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.719.233.000	14.288.305.979	17.062.050.893	20.761.351.957	25.734.775.814
PENDAPATAN TRANSFER	1.787.983.601.000	1.917.268.698.551	1.935.231.453.910	1.954.475.904.972	1.975.183.553.319
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.684.430.190.000	1.776.987.040.556	1.789.331.048.292	1.802.572.299.887	1.816.861.720.542
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.553.411.000	140.281.657.995	145.900.405.618	151.903.605.085	158.321.832.777
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.855.371.000	52.477.346.250	55.101.213.563	57.856.274.241	60.749.087.953
Pendapatan Hibah	17.818.500.000	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.036.871.000,00	52.477.346.250	55.101.213.563	57.856.274.241	60.749.087.953
JUMLAH PENDAPATAN	2.297.316.712.000	2.441.990.856.639	2.497.485.241.932	2.558.210.230.283	2.625.083.042.975

Sumber: Diolah Penulis, 2025



2.2.2.2. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama diproyeksikan meningkat menjadi Rp.1,373,598,151,738,- pada tahun 2030, dengan beberapa asumsi:

- a. Belanja gaji dan tunjangan, Belanja Jasa Kantor (listrik air telepon), Belanja listrik PJU, Belanja jaminan kesehatan PBI, dan Belanja THL/PPPK Paruh Waktu diproyeksikan sesuai rata-rata pertumbuhan alami.
- b. Belanja TPP menggunakan pertumbuhan 2 tahun terakhir mengantisipasi penambahan Calon ASN dan skema penyelesaian PPPK.
- c. Belanja sertifikasi guru dan dana desa diproyeksikan sama dengan tahun 2025 mengingat alokasi berasal dari Pemerintah Pusat.
- d. Belanja gaji KDH/WKDH, belanja operasional KDH/WKDH, dan belanja operasional KDH diasumsikan pada pagu tertinggi.
- e. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD menggunakan rata-rata pertumbuhan alami namun kenaikannya 2 tahun sekali sesuai dengan ketentuan appraisal tunjangan perumahan dan transportasi.
- f. Belanja pemungutan pajak daerah, belanja pemungutan retribusi daerah, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa, serta belanja bagi hasil mcb dan palawi menggunakan persentase pertumbuhan hasil proyeksi akun pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- g. Belanja ADD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- h. Belanja bantuan partai politik menggunakan pertumbuhan 3 tahun terakhir.
- i. Belanja kesra Wiyata Bhakti diproyeksikan tetap sebagai proyeksi untuk dialihkan kepada akun belanja PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu.
- j. Pembentukan dana cadangan diarahkan untuk meringankan penganggaran pilkada serentak.
- k. Belanja pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dipasang sesuai sisa dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah

Perincian Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama disajikan pada tabel berikut



Tabel 2. 78 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
A	Belanja wajib pegawai	1,053,818,628,575	1,091,723,001,865	1,137,620,630,962	1,179,325,200,494	1,230,332,045,915
1	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	688,991,722,091	717,710,916,455	747,627,211,013	778,790,504,412	811,252,775,217
2	Belanja Tambahan penghasilan pegawai	121,355,046,448	130,044,067,774	139,355,223,027	149,333,056,995	160,025,303,876
3	Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	200,762,502,000	200,762,502,000	200,762,502,000	200,762,502,000	200,762,502,000
4	Belanja gaji KDH	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
5	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD	33,968,277,406	33,968,277,406	40,109,741,961	40,109,741,961	47,361,583,308
6	Belanja Operasional Anggota DPRD	252,000,000	252,000,000	252,000,000	252,000,000	252,000,000
7	Belanja Operasional KDH	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
8	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	5,535,178,463	5,922,640,955	6,337,225,822	6,780,831,630	7,255,489,844
9	Belanja pemungutan Retribusi Daerah**)	2,173,902,167	2,282,597,275	2,396,727,139	2,516,563,496	2,642,391,671
B	Belanja wajib transfer	435,898,213,780	437,719,508,512	439,631,705,795	441,639,342,946	443,747,183,773
1	Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	23,333,584,050	24,500,263,253	25,725,276,415	27,011,540,236	28,362,117,248
2	Belanja Bagi Hasil MCB dan Palawi	11,338,205,550	11,905,115,828	12,500,371,619	13,125,390,200	13,781,659,710
3	Bantuan keuangan kepada desa Alokasi Dana Desa	126,500,000,000	126,500,000,000	126,500,000,000	126,500,000,000	126,500,000,000
4	Bantuan keuangan kepada desa Dana Desa	272,904,953,000	272,904,953,000	272,904,953,000	272,904,953,000	272,904,953,000
5	Belanja bantuan partai politik	1,821,471,180	1,909,176,432	2,001,104,761	2,097,459,510	2,198,453,815
B	Belanja mengikat	97,267,157,593	104,375,233,964	112,248,809,833	120,974,794,630	130,650,105,823
1	Belanja Jasa Kantor (listrik air telepon)	6,544,650,842	6,809,598,239	7,085,271,515	7,372,104,884	7,670,550,141
2	Belanja listrik PJU	18,171,140,954	18,516,796,244	18,869,026,662	19,227,957,281	19,593,715,554
3	Belanja jaminan kesehatan PBI	31,213,629,098	34,647,063,459	38,458,168,468	42,688,487,111	47,384,132,017
4	Belanja THL/PPPK Paruh Waktu	25,337,736,699	28,401,776,021	31,836,343,188	35,686,245,355	40,001,708,111
5	Belanja kesra WB (Dindikpora)	16,000,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000
C	Pembiayaan Pengeluaran	18,966,000,000	22,616,000,000	22,616,000,000	22,616,000,000	12,616,000,000
1	Pembentukan Dana Cadangan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0
2	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
3	Penyertaan Modal	8,966,000,000	12,616,000,000	12,616,000,000	12,616,000,000	12,616,000,000
	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	1,170,051,786,168	1,218,714,235,829	1,272,485,440,795	1,322,915,995,124	1,373,598,151,738

Sumber: Diolah Penulis, 2025



Tabel 2. 79 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.676.232.198.500	1.739.814.683.000	1.758.232.784.721	1.813.667.038.898	1.916.880.094.653
Belanja Pegawai	1.053.818.628.575	1.091.723.001.865	1.137.620.630.962	1.179.325.200.494	1.230.332.045.915
Belanja Barang dan Jasa	541.717.382.602	568.803.251.732	540.363.089.145	553.185.899.464	604.431.621.629
Belanja Bunga	15.000.000	80.000.000	130.000.000	70.000.000	-
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	78.332.049.971	76.530.412.821	77.066.125.711	77.605.588.591	78.148.827.711
Belanja Bantuan Sosial	2.349.137.352	2.678.016.581	3.052.938.903	3.480.350.349	3.967.599.398
BELANJA MODAL	221.041.770.900	273.749.841.558	264.005.856.177	284.385.307.949	299.038.218.364
Belanja Modal Tanah	7.714.290.000	7.144.265.891	5.637.786.193	8.172.363.973	16.309.395.530
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.399.771.025	59.735.738.968	62.125.168.527	64.610.175.268	67.194.582.278
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.285.377.085	83.180.255.301	70.689.603.906	72.103.395.984	72.824.429.944
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.960.492.936	118.570.097.865	119.755.798.844	132.928.936.717	134.258.226.084
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.248.215.380	4.842.965.533	5.520.980.707	6.293.918.006	7.175.066.527
Belanja Modal Aset Lainnya	433.624.475	276.518.000	276.518.000	276.518.000	1.276.518.000



URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Belanja Transfer	434.076.742.600	435.810.332.081	437.630.601.034	439.541.883.436	441.548.729.958
Belanja Bagi Hasil	34.671.789.600	36.405.379.081	38.225.648.034	40.136.930.436	42.143.776.958
Belanja Bantuan Keuangan	399.404.953.000	399.404.953.000	399.404.953.000	399.404.953.000	399.404.953.000
JUMLAH BELANJA	2.336.350.712.000	2.454.374.856.639	2.464.869.241.932	2.542.594.230.283	2.662.467.042.975

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengklasifikasikan belanja daerah ke dalam empat jenis utama: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kabupaten Banjarnegara memproyeksikan belanja daerah dari tahun 2026 hingga 2030 sebagaimana tersaji pada tabel 2.79 diatas. Belanja Operasi pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar **1.676.232.198.500** secara agregat naik menjadi **1.916.880.094.653** pada tahun 2030. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial sebagai komponen belanja operasional konsisten naik setiap tahun sedangkan belanja bunga merupakan konsekuensi adanya pinjaman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk membiayai pembangunan yang prioritas untuk pelayanan masyarakat, yaitu Pembangunan Rumah Sakit baru.

Belanja modal bila dibandingkan dengan periode perencanaan sebelumnya (RPD 2023 -2026) mengalami peningkatan secara agregat maupun dari masing masing item belanja modal. Infrastruktur berupa jalan, irigasi dan jembatan menjadi komponen yang meningkat cukup signifikan disamping belanja modal gedung juga meningkat karena adanya pembangunan RS baru. Dari tabel diatas, belanja modal diproyeksikan sebesar **221.041.770.900** pada tahun 2026 dan naik 35,29% menjadi **299.038.218.364** pada tahun 2030.

Belanja tidak terduga dianggarkan tetap sejumlah 5.000.000.000, yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang timbul akibat keadaan darurat atau kejadian mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan amanah undang undang. Sedangkan belanja transfer kenaikan anggarannya tidak terlalu signifikan karena perhitungannya berdasarkan regulasi disesuaikan dengan besarnya pendapatan transfer yang diperoleh



2.2.2.3. **Proyeksi pembiayaan**

Tabel 2. 80 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	45.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000
Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Pencairan Dana Perimbangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Pencairan dana Cadangan					30.000.000.000
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir					
Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD	30.000.000.000	25.000.000.000			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.966.000.000	32.616.000.000	52.616.000.000	35.616.000.000	12.616.000.000
Penyertaan Modal Daerah	8.966.000.000	12.616.000.000	12.616.000.000	12.616.000.000	12.616.000.000
Pembentukan dana Cadangan		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD					
Pembayaran Pokok Utang	2.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000	13.000.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	39.034.000.000	12.384.000.000	- 32.616.000.000	- 15.616.000.000	37.384.000.000

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi pembiayaan netto yang disajikan pada table 2.79, telah memperhitungkan:

1. Pembentukan dana cadangan yang digunakan untuk pembiayaan pemilu. Pengalokasian ini membutuhkan peraturan daerah sebagai dasar hukumnya. Dengan mempertimbangkan proses pembuatan perda, maka dana cadangan dipasang pada tahun 2027, 2028, 2029, sedangkan 2030 dana cadangan dicairkan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada
2. Penyertaan Modal Daerah untuk BUMD dengan mempertimbangkan kebijakan investasi daerah dan memperhatikan potensi besaran deviden yang diperoleh
3. Pinjaman daerah dan pembayaran pokok utang sesuai ketentuan. Pinjaman dilakukan untuk membiayai pembangunan daerah dalam hal ini pendirian Rumah sakit. Pinjaman ini dilakukan dengan memperhatikan dan memperhatikan kapasitas keuangan daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembanguana daerah di sector lainnya.
4. Perhitungan SILPA (siswa lebih perhitungan anggaran). Besaran silpa yaitu sebesar 20.000.000.000 sebagai perwujudan perencanaan pembangunan diusahakan dengan cermat dan mempertimbangkan resiko pada pelaksanaan pembangunan.

2.2.2.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2026-2030 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 2. 81 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	444.477.740.000	472.244.811.838	507.152.574.459	545.878.051.070	589.150.401.703
Pendapatan Pajak Daerah	173.572.548.000	182.924.980.754	197.312.942.422	213.125.608.479	230.557.870.997
Hasil Retribusi Daerah	232.759.453.000	245.938.512.877	260.584.702.230	276.368.053.575	293.439.075.603
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.426.506.000	29.093.012.228	32.192.878.914	35.623.037.059	39.418.679.289
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.719.233.000	14.288.305.979	17.062.050.893	20.761.351.957	25.734.775.814
PENDAPATAN TRANSFER	1.787.983.601.000	1.917.268.698.551	1.935.231.453.910	1.954.475.904.972	1.975.183.553.319
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.684.430.190.000	1.776.987.040.556	1.789.331.048.292	1.802.572.299.887	1.816.861.720.542
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.553.411.000	140.281.657.995	145.900.405.618	151.903.605.085	158.321.832.777
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.855.371.000	52.477.346.250	55.101.213.563	57.856.274.241	60.749.087.953
Pendapatan Hibah	17.818.500.000	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.036.871.000,00	52.477.346.250	55.101.213.563	57.856.274.241	60.749.087.953
JUMLAH PENDAPATAN	2.297.316.712.000	2.441.990.856.639	2.497.485.241.932	2.558.210.230.283	2.625.083.042.975
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.676.232.198.500	1.739.814.683.000	1.758.232.784.721	1.813.667.038.898	1.916.880.094.653
Belanja Pegawai	1.053.818.628.575	1.091.723.001.865	1.137.620.630.962	1.179.325.200.494	1.230.332.045.915



URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Barang dan Jasa	541.717.382.602	568.803.251.732	540.363.089.145	553.185.899.464	604.431.621.629
Belanja Bunga	15.000.000	80.000.000	130.000.000	70.000.000	-
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	78.332.049.971	76.530.412.821	77.066.125.711	77.605.588.591	78.148.827.711
Belanja Bantuan Sosial	2.349.137.352	2.678.016.581	3.052.938.903	3.480.350.349	3.967.599.398
BELANJA MODAL	221.041.770.900	273.749.841.558	264.005.856.177	284.385.307.949	299.038.218.364
Belanja Modal Tanah	7.714.290.000	7.144.265.891	5.637.786.193	8.172.363.973	16.309.395.530
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.399.771.025	59.735.738.968	62.125.168.527	64.610.175.268	67.194.582.278
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.285.377.085	83.180.255.301	70.689.603.906	72.103.395.984	72.824.429.944
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.960.492.936	118.570.097.865	119.755.798.844	132.928.936.717	134.258.226.084
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.248.215.380	4.842.965.533	5.520.980.707	6.293.918.006	7.175.066.527
Belanja Modal Aset Lainnya	433.624.475	276.518.000	276.518.000	276.518.000	1.276.518.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Belanja Transfer	434.076.742.600	435.810.332.081	437.630.601.034	439.541.883.436	441.548.729.958



URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Bagi Hasil	34.671.789.600	36.405.379.081	38.225.648.034	40.136.930.436	42.143.776.958
Belanja Bantuan Keuangan	399.404.953.000	399.404.953.000	399.404.953.000	399.404.953.000	399.404.953.000
JUMLAH BELANJA	2.336.350.712.000	2.454.374.856.639	2.464.869.241.932	2.542.594.230.283	2.662.467.042.975
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	45.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000
Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Pencairan Dana Perimbangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Pencairan dana Cadangan					30.000.000.000
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir					
Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD	30.000.000.000	25.000.000.000			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.966.000.000	32.616.000.000	52.616.000.000	35.616.000.000	12.616.000.000
Penyertaan Modal Daerah	8.966.000.000	12.616.000.000	12.616.000.000	12.616.000.000	12.616.000.000
Pembentukan dana Cadangan		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD					
Pembayaran Pokok Utang	2.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000	13.000.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	39.034.000.000	12.384.000.000	32.616.000.000	15.616.000.000	37.384.000.000

Pengalokasian belanja daerah dan pembiayaan Kabupaten Banjarnegara menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan riil kemampuan keuangan. Kapasitas riil kemampuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.255.631.976.926,- pada tahun 2026 menjadi Rp.1.321.865.108.771,- pada tahun 2030.

Kebijakan penggunaan keuangan daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kebijakan Prioritas I, diarahkan untuk:
 - a. Program pembangunan daerah unggulan sesuai Visi Misi Kepala Daerah.
 - b. Program yang mendukung kebijakan Nasional dan atau Provinsi.
 - c. Program yang wajib dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Kebijakan Prioritas II, diarahkan untuk:
 - a. Program pembangunan yang menjamin pelaksanaan urusan-urusan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
3. Kebijakan Prioritas III, diarahkan untuk:
 - a. Alokasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.
 - b. Pengeluaran pembiayaan yang mengikat.

2.3 Permasalahan dan isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan pembangunan daerah menjadi rujukan dalam perumusan visi, misi, dan program kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang bersifat dominan/signifikan dikelompokkan berdasarkan aspek pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Permasalahan Aspek Geografis dan Demografi

- a. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup, terlihat dari penurunan indeks kualitas lingkungan hidup dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 65,76 pada tahun 2024. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut juga dipengaruhi penurunan indeks kualitas air dari 59,31 di tahun 2020 menjadi 51,24 pada tahun 2024.
- b. Permasalahan sedimentasi yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air di Kabupaten Banjarnegara. Permasalahan sedimentasi waduk yang menjadi sumber air pembangkit listrik dan sumber irigasi ini perlu menjadi perhatian, karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara.

- c. Timbulan sampah. Jika timbulan sampah tidak dapat dikelola dengan baik akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, termasuk berpotensi memperparah bencana banjir, selain itu timbulan sampah juga berpengaruh terhadap pencemaran air melalui sampah plastik. Permasalahan sampah terlihat dari peningkatan volume timbulan sampah, serta penanganan dan pengolahan sampah yang belum dilaksanakan secara keseluruhan volume timbulan sampah yang diproduksi masyarakat.
- d. Kerawanan Bencana. Sebagai daerah yang terletak di daerah dataran tinggi, Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari indeks risiko bencana 103,28, meski masih termasuk pada skala sedang, namun beberapa daerah di Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana yang tinggi.
- e. Perubahan cuaca ekstrem/anomali cuaca akibat el nino dan la nina yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini ditandai musim penghujan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan banjir dan longsor yang sangat parah, namun kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan yang parah. Pemanasan global dan perubahan iklim akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi karena tidak jarang menimbulkan bencana tersendiri atau memperparah bencana yang sedang terjadi.
- f. Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih Rendah. Kabupaten Banjarnegara masih belum memaksimalkan tata kelola pemanfaatan ruang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pemanfaatan ruang yang baru mencapai 71,01%. Ketidaktaatan terhadap pemanfaatan ruang dalam jangka panjang akan berdampak juga terhadap potensi peningkatan lingkungan kumuh, adanya lingkungan kumuh tentunya dapat mengganggu tata wilayah, selain itu berdampak pada bencana yang mungkin muncul dikemudian hari.
- g. Bonus Demografi yang Belum Termanfaatkan Dengan Baik. Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang memiliki bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) yang lebih besar dari usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas). Bonus demografi jika dapat dikelola dengan baik maka akan menghasilkan produktifitas yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, namun sebaliknya jika tidak dapat dikelola atau dimanfaatkan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang berdampak terhadap ekonomi sosial dan budaya. Saat ini bonus demografi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik

namun dalam jangka panjang situasi ini harus bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kemiskinan Masih Tinggi, terlihat dari persentase kemiskinan Kabupaten Banjarnegara termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat perkembangannya selama 5 tahun terakhir selalu diatas 10 persen, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara sebesar 14,71%, dengan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,61 dan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,38 pada kategori tinggi. Permasalahan kemiskinan ini tentu menjadi salah satu penghambat pembangunan di daerah, sehingga permasalahan kemiskinan akan selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk dituntaskan.
- b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kurang optimal, disebabkan oleh belum tersedianya rumah singgah untuk menunjang pelayanan PMKS/PPKS mempengaruhi perlindungan sosial di Kabupaten Banjarnegara. Di tahun 2024, persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai 57,73%.
- c. Tingkat perkawinan usia anak yang tinggi, dipengaruhi pemahaman masyarakat untuk menikahkan anak ketika tidak lagi sekolah dan terjadinya perilaku seks bebas pada remaja.
- d. Rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat terutama pasangan usia subur yang sudah memiliki anak lebih dari tiga orang dan dengan latar belakang ekonomi kurang untuk ikut ber KB juga menambah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara.
- e. Minimnya jumlah desa mandiri yang berdampak pada kemiskinan, hal ini disebabkan karena desa belum dapat memetakan potensi desa, yang dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan maupun sumberdaya untuk mengelola potensi desa yang ada.
- f. Pengangguran Masih Cukup Tinggi dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,57%. Secara umum kondisi pengangguran dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja. Penduduk yang telah berhasil menyelesaikan studi/pendidikan tentu memerlukan lapangan pekerjaan sebagai tempat untuk berkarya/bekerja, ketika tempat berkarya atau bekerja tidak tersedia, maka potensi pengangguran akan meningkat setiap tahunnya. Kesesuaian kualitas tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja juga masih sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum tersedianya tenaga instruktur pendidikan pelatihan dan motivator ketenagakerjaan, fasilitas pelatihan yang tidak seimbang dengan animo pelatihan yang diinginkan para pencari kerja. Keterbatasan akses terhadap modal juga dapat

menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran. Secara khusus penduduk yang ingin menjadi wirausahawan, ketika modal untuk membuka usaha tidak bisa didapatkan maka akan memicu naiknya angka pengangguran.

- g. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Kondisi kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 hanya sebesar 69,62. Jika dibandingkan dengan wilayah aglomerasi Barlingmas cakeb (Banjarnegara-Purbalingga Banyumas Cilacap- Kebumen), capaian IPM Kabupaten Banjarnegara merupakan yang paling rendah. Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara juga masih berada dibawah rata-rata IPM Provinsi dan IPM Nasional. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karena layanan pendidikan belum merata, pendidikan belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan layanan Kesehatan yang belum merata.
- h. Layanan kesehatan yang belum sepenuhnya baik. Hal ini ditandai dengan banyak permasalahan, seperti tingginya kematian ibu dan bayi, stunting, gizi buruk serta permasalahan kesehatan lain. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan, belum tersedianya dokter dengan pelayanan spesialis patologi anatomi, spesialis kesehatan jiwa, sub spesialis anak, sub spesialis penyakit dalam, sub spesialis obgyn serta orthopedi sangat mempengaruhi layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan juga belum baik. Peralatan kedokteran dan penunjang di RSUD yang tersedia saat ini masih belum dapat menjawab kebutuhan pasien, seperti pelayanan radiologi, USG 4 Dimensi, Phacoemulsifikasi, fototherapy chamber, alat-alat rehabilitasi, alat laboratorium canggih, CT scan. Masih terdapat 18 Puskesmas dari 35 Puskesmas yang berada di tanah desa, dan sarana prasana Puskesmas yang belum sesuai standar, serta ketiadaan rumah sakit secara khusus di daerah pegunungan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kedaruratan pasien di daerah pegunungan karena akses yang terlalu jauh.
- i. Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Masih Rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2024 capainnya hanya 6,87 tahun (kelas 1 SMP), Harapan Lama Sekolah 11,83 tahun (Kelas 3 SMA). Hal ini didukung fakta bahwa banyak anak tidak sekolah yang berpengaruh terhadap tingginya perkawinan anak. Ketersediaan sekolah pada jenjang SMA yang belum merata di seluruh kecamatan. Selain itu pada pendidikan dasar banyaknya sarana dan prasarana yang rusak juga perlu mendapatkan perhatian.

- j. Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi siswa yang masih rendah, terlihat dari rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan asesmen nasional pada jenjang SD dan SMP, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi tersebut disebabkan oleh: beberapa guru masih mengandalkan buku paket, baik buku siswa maupun buku guru sebagai satu-satunya sumber belajar, sedangkan sumber belajar lainnya dianggap tidak penting; sulitnya akses digital atau internet yang menjadi kendala guru menerapkan kurikulum merdeka; dan tidak semua guru menguasai berbagai aspek profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian; dan keterbatasan sarana TIK, jaringan internet dan letak geografis satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
- k. Permasalahan akses pangan yang bergizi bahan pangan juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahan pangan akan berpengaruh terhadap gizi yang berdampak pada kualitas SDM. Seperti diketahui Kabupaten Banjarnegara masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan. Ketersediaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjarnegara belum sesuai ketentuan yang ada, disebabkan belum semua desa memiliki lumbung pangan untuk cadangan pangan, sehingga peran cadangan pangan masyarakat belum optimal. Akses terhadap pangan juga terbatas akibat kemiskinan. Pola konsumsi masyarakat juga belum ideal dan diversifikasi pangan belum optimal karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan guna mengolah bahan pangan berbasis sumberdaya lokal.
- l. Ketimpangan Gender. Ketimpangan gender dapat berupa ketimpangan dalam memperoleh hak di bidang politik, ekonomi, sipil, dan sosial budaya, terjadinya eksploitasi, kekerasan, penelantaran atau diskriminasi terhadap perempuan (kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan lapangan kerja). Ketimpangan gender Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat melalui capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun 2024 sebesar 0,28, menunjukkan masih adanya ketidaksetaraan antara laki laki dan perempuan di Kabupaten Banjarnegara.
- m. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena keengganan korban untuk melapor maka beberapa kasus menjadi tidak dapat ditelusuri dan dipecahkan. Sementara itu untuk mengedukasi korban agar melapor ketika terjadi kekerasan memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sedangkan implementasi anggaran responsif gender masih sangat terbatas.

- n. Pemenuhan Hak Perempuan, Anak belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan fasilitas-fasilitas umum yang responsif gender serta ramah anak juga masih sangat terbatas. Permasalahan terkait anak lainnya yaitu masih banyaknya penduduk usia anak yang bekerja pada sektor informal yang dipengaruhi oleh kemiskinan dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan pada anak.
- o. Fasilitas umum yang responsif terhadap kaum disabilitas dan lansia, jumlahnya juga masih sangat terbatas. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum tersedianya data base data penyandang disabilitas dan Lansia, sehingga pembangunan fasilitas pelayanan terhadap fasilitas pelayanan umum pada kaum disabilitas dan lansia menjadi sangat terbatas. Hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi meliputi hak kesetaraan dan non-diskriminasi di masyarakat dan hukum, hak aksesibilitas terhadap layanan publik, hak untuk hidup, hak peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penduduk Lansia diproyeksikan akan terus bertambah, sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Hak Lansia yang harus dipenuhi meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.

3. Permasalahan Aspek Daya Saing

- a. Daya saing daerah yang masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi/rendahnya indeks daya saing daerah, yaitu dukungan dari 12 pilar (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Kabupaten Banjarnegara sendiri memiliki capaian yang kurang maksimal di beberapa pilar yaitu, infrastruktur, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi. Capaian indeks daya saing yang masih rendah dipengaruhi oleh: kapabilitas inovasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Banjarnegara masih sangat kurang.
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang perdagangan masih sangat terbatas, disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Infrastruktur juga masih kurang memadai, disebabkan terbatasnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur perdagangan.
- c. Akses informasi dan teknologi yang masih rendah, terlihat dari keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital, hal ini diakibatkan

oleh rendahnya penetrasi teknologi informasi di Kabupaten Banjarnegara.

- d. Stabilitas keamanan untuk menjamin stabilitas ekonomi makro. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih kerap terjadi di Kabupaten Banjarnegara, disebabkan kurangnya sosialisasi Perda bersanksi. Selain itu masih ada daerah yang belum terjangkau penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, utamanya didaerah pinggiran, karena terbatasnya jumlah dan kapasitas personil Satpol PP, PPNS, serta sarana dan prasarana kerja untuk melakukan patroli penegakan Perda.
- e. Pendapatan Daerah yang Masih Rendah. Rasio PAD Kabupaten Banjarnegara terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah, disebabkan penggalan potensi pajak daerah yang belum optimal. Pertumbuhan usaha skala nasional (> 5M) di Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tidak mendukung (akses jalan, harga tanah yang relatif mahal).
- f. PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah. Rendahnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing sektor yang belum maksimal.
- g. Pada sektor pertanian, teknologi pertanian perlu mendapatkan perhatian, baik alat pertanian serta pengendalian hama dan penyakit tanaman, ketersediaan dan mekanisme pupuk subsidi yang masih kurang di masyarakat, permodalan terhadap petani, serta rantai niaga yang terlalu panjang dan belum menguntungkan petani. Permasalahan penting lainnya adalah regenerasi di bidang pertanian tidak berjalan dengan baik, kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian perlu diterapkan agar para petani muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Sementara di bidang peternakan penyakit menular ternak sangat mempengaruhi populasi ternak, hal tersebut diperparah dengan terbatasnya para petugas medik.
- h. Pada sektor perikanan, angka konsumsi ikan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 27,76 ton/tahun. Kondisi ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun serta dukungan anggaran sosialisasi dan edukasi gemarikan kurang memadai.
- i. Produksi perikanan tangkap masih kurang optimal, diantaranya disebabkan oleh: penangkapan ikan yang merusak menggunakan Stroom dan obat-obatan kimia, belum terdatanya pelaku penangkapan ikan (nelayan) terutama di perairan Sungai, belum tersedia kawasan suaka ikan atau kawasan reservat, berkurangnya jenis ikan asli di sungai, sertavadanya aktivitas kegiatan yang merusak ekosistem sungai.

- j. Pada sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan terbilang rendah, rendahnya wisatawan ini selain dipengaruhi oleh akses jalan dan investasi bidang pariwisata, juga dipengaruhi oleh promosi yang masih sangat terbatas. Obyek wisata yang berkaitan dengan kebudayaan juga masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang masih kurang, karena belum ditetapkan WBTB. Kurangnya pembinaan kelompok seni, dan fasilitasi event budaya menjadi masalah kebudayaan lainnya. Demikian juga usaha ekonomi kreatif yang perkembangannya masih sangat lambat. Pemasaran produk lokal hasil ekonomi kreatif juga belum maksimal, dipengaruhi faktor minimnya akses penjualan produk ke pasar yang lebih besar.
- k. Pada sektor industri beberapa masalah yang menghambat seperti: belum optimalnya implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta daya saing produk IKM yang masih rendah yang dipengaruhi oleh kepemilikan izin edar, sertifikat halal, hak merk, dan SNI.
- l. Pertumbuhan Kewirausahaan/UMKM yang Masih Rendah. Hal ini dikarenakan animo masyarakat dari unsur pemuda untuk berwirausaha mandiri masih rendah, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan permodalan kepada para wirausahawan. Selain itu terbatasnya pelatihan atau kursus juga mempengaruhi munculnya wirausahawan-wirausahawan yang baru.
- m. Kualitas pertumbuhan koperasi yang masih rendah. Dari 443 koperasi yang ada di tahun 2024, hanya 173 koperasi yang aktif. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya kompetensi pengurus dan pengawas koperasi, yang diakibatkan oleh minimnya kaderisasi dan peningkatan kompetensi pengelola koperasi.
- n. Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, juga desa dan daerah perkotaan masih rendah. Beberapa kerusakan juga terjadi karena, minimnya pemeliharaan dan ketersediaan drainase, serta diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan. Selain itu peningkatan ruas jalan tidak disertai dengan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan Jalan, termasuk penerangan jalan umum.
- o. Pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara juga perlu ditingkatkan, masih banyak saluran irigasi yang belum memadai dan banyak area sawah yang belum terairi dengan baik, sistem irigasi yang tidak baik berpotensi mengganggu lahan pertanian yang berdampak pada krisis pangan.

- p. Infrastruktur dalam bidang perumahan juga masih kurang, dapat dilihat masih belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni, selain itu juga masih terdapat pemukiman kumuh yang perlu mendapatkan penanganan.

4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

- a. Implementasi reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Perwujudan reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika hal tersebut dapat terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dari beberapa capaian indikator yang digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan capaiannya masih perlu ditingkatkan, seperti indeks reformasi birokrasi, indeks inovasi daerah, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta indeks pelayanan publik.
- b. Pelayanan public yang masih kurang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas ASN yang belum memadai. Pada aspek kuantitas beberapa jabatan fungsional belum terisi akibat kurangnya kompetensi. Dari seluruh ASN yang berjumlah 8.717 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 7.217 orang (teknis, guru dan Kesehatan. Selain itu, di tahun 2024 jumlah pejabat yang belum melaksanakan Diklat Kepemimpinan sejumlah 12 pejabat eslon, 28 orang pejabat eslon 3 dan 124 orang pejabat eslon 4. Sementara pada aspek kualitas dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan dan pelatihan rutin bagi ASN. Pada tahun 2024, dari sejumlah 108 orang yang mengikuti diklat teknis/fungsional, rata-rata jam pelajaran yang diterima sejumlah 36,43 jam Pelajaran. Hal tersebut mempengaruhi kecakapan ASN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Situasi tersebut juga terjadi di tingkat kecamatan/kelurahan, pendidikan dan pelatihan ASN tingkat kecamatan/ kelurahan juga masih sangat terbatas. Demikian juga jumlah SDM di kecamatan/kelurahan juga masih terbatas, sehingga sering ditemui permasalahan pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan karena aksesibilitas yang terbatas.
- c. Pada aspek lainnya yaitu dari sisi pengawasan juga mengalami keterbatasan, perbandingan antara obyek pemeriksaan dengan jumlah APIP tidak sebanding, yang juga disebabkan oleh kurangnya SDM. Permasalahan lainnya tindak lanjut hasil pemeriksaan belum sesuai dengan standar (maksimal 6 bulan), disebabkan obyek pemeriksaan di

tingkat desa tidak bisa memenuhi hasil kesepakatan hasil pemeriksaan. Permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelayanan umum di Kabupaten Banjarnegara.

2.3.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global dalam SDGs, isu nasional dalam RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025), isu regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, dan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2025-2029. Isu Global, Nasional, Regional dan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara dapat diidentifikasi sebagai berikut:



Tabel 2. 82 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)
			GLOBAL (SDG's)	NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjarnegara terletak di jalur tengah Jawa Tengah, menghubungkan wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Potensi ini mendukung pengembangan konektivitas transportasi darat antar kabupaten, terutama melalui jalur provinsi dan kabupaten.	1. Fasilitas umum yang responsif terhadap kaum disabilitas dan lansia, jumlahnya juga masih sangat terbatas. 2. Keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital 3. Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, juga desa dan daerah perkotaan masih rendah. 4. Pengembangan jaringan irigasi perlu ditingkatkan 5. Infrastruktur dalam bidang perumahan masih kurang,	Rendahnya akses sanitasi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan	1. Industri, inovasi, dan infrastruktur 2. Air bersih dan sanitasi layak 3. Energi bersih dan terjangkau		Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan Infrastruktur dan pelayanan publik
1. Sekitar 51% perekonomian Banjarnegara berputar di sekitar jalur jalan nasional 2. Potensi Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng sebagai Magnet Ekonomi 3. Potensi produksi komoditas pertanian (padi, tanaman hortikultura, perikanan, dan peternakan)	1. Kemiskinan Masih Tinggi 2. Pengangguran Masih Cukup Tinggi 3. Pendapatan Daerah yang Masih Rendah. Rasio PAD Kabupaten Banjarnegara terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah	1. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan industri berkelanjutan 2. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum	1. Tanpa kemiskinan 2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 3. Berkurangnya kesenjangan	1. Perekonomian global dilanda ketidakpastian 2. Rendahnya produktivitas	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan	Pemerataan Ekonomi



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)
			GLOBAL (SDG's)	NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah 5. Pertumbuhan Kewirausahaan/UMKM yang Masih Rendah 6. Stabilitas keamanan untuk menjamin stabilitas ekonomi makro.	meratanya distribusi kesejahteraan				
1. Banjarnegara memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun), sehingga berpotensi untuk meningkatkan daya saing SDM. 2. Tersedia berbagai lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah atas, serta beberapa perguruan tinggi swasta dan keagamaan.	1. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang 2. Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Masih Rendah 3. Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi siswa yang masih rendah 4. Layanan kesehatan yang belum sepenuhnya baik 5. Permasalahan akses pangan yang bergizi bahan pangan juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang masih rendah	1. Tanpa kelaparan 2. Kehidupan sehat dan sejahtera 3. Pendidikan berkualitas	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)
			GLOBAL (SDG's)	NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6. Bonus Demografi yang Belum Termanfaatkan Dengan Baik 7. kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar					
1. Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi sumber daya energi berupa energi surya dan juga panas bumi yang cukup tinggi. 2. Mata air Kabupaten Banjarnegara apabila dilihat dari segi hidrologi memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri dan lainnya. 3. potensi bahan tambang yang dapat mendukung kegiatan pembangunan. 4. Sumber daya lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 menghasilkan produksi sebesar 176.077,22 ton dari luas panen 25.553,37 Ha. 5. Potensi Sumber daya alam perkebunan yang berupa	1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Permasalahan sedimentasi yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air di Kabupaten Banjarnegara 3. Timbunan sampah 4. Kerawanan Bencana 5. Perubahan cuaca ekstrem/anomali cuaca akibat el nino dan la nina 6. Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih Rendah	Peningkatan intensitas bencana dan perubahan iklim	1. Penanganan perubahan iklim 2. Ekosistem laut 3. Ekosistem daratan	Krisis lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Degradasi lingkungan hidup



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGARA 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)
			GLOBAL (SDG's)	NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
kelapa, kopi, tebu, teh dan tembakau.						
1. Komitmen pemerintah daerah dalam penerapan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui berbagai platform digital 2. digitalisasi pelayanan publik	1. Implementasi reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik 2. Pelayanan publik yang masih kurang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas ASN yang belum memadai 3. Perbandingan antara obyek pemeriksaan dengan jumlah APIP tidak sebanding, yang juga disebabkan oleh kurangnya SDM	Belum optimalnya tata kelola pemerintah, keuangan, dan kondusivitas serta stabilitas wilayah	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah
			Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Pergeseran struktur kelas masyarakat		
			Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)
			GLOBAL (SDG's)	NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1. Kesetaraan gender 2. Kemitraan untuk mencapai tujuan		Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dirumuskan isu strategis Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun ke depan (2025-2029) sebagai berikut.

1. Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi tantangan yang signifikan sekaligus membuka peluang strategis untuk pembangunan di masa depan. Indeks infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 82,80% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pemenuhan infrastruktur belum sepenuhnya merata. Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 55,275%, dan hanya 3,34% jalan yang dilengkapi trotoar serta drainase/saluran pembuangan air dengan lebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kualitas dan kelengkapan infrastruktur jalan, yang berdampak pada aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi.

Di sektor pertanian, persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 76,27% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi. Keterbatasan infrastruktur irigasi juga dapat berdampak terhadap ketahanan pangan lokal dan efisiensi penggunaan air, terutama menghadapi perubahan iklim dan musim tanam yang tidak menentu.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar lainnya juga masih menyisakan pekerjaan rumah. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum bersih dan aman telah mencapai 96,86% pada tahun 2024, sementara persentase kepala keluarga yang terlayani pengelolaan sistem air limbah baru mencapai 77,23%. Selain itu, cakupan ketersediaan rumah layak huni baru mencapai 89,07%, dan masih terdapat kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian cukup tinggi, masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dasar secara optimal.

Di sektor transportasi dan perhubungan, masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana seperti area parkir, terminal tipe C, halte, serta jaringan trayek yang belum merata. Selain itu, daerah rawan kecelakaan belum memiliki fasilitas keselamatan jalan yang memadai, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kekurangan ini menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, inklusif, dan terintegrasi.

Di sisi lain, kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 85,19 pada tahun 2024. Meskipun

nilai ini tergolong baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kecepatan, efektivitas, dan inovasi pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai kondisi tersebut, permasalahan infrastruktur dan pelayanan publik tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan transformasi secara menyeluruh. Perbaikan infrastruktur fisik, penguatan sistem pelayanan dasar, serta digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih layak huni serta berkelanjutan di masa depan.

2. Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Banjarnegara, yang juga sekaligus membuka peluang besar untuk penguatan fondasi pembangunan ekonomi daerah ke depan. Jika dilihat dari perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2024, posisi ekonomi Kabupaten Banjarnegara masih relatif tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain di kawasan Barlingmascakeb. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Banjarnegara tercatat sebesar 27,64 juta rupiah, hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen yang berada di angka 27,29 juta rupiah. Namun demikian, angka ini masih jauh di bawah PDRB per kapita kabupaten lainnya seperti Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga, yang memiliki struktur ekonomi lebih kuat dan beragam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 5,11% pada tahun 2024, distribusi hasil pembangunan belum merata antarwilayah dalam kawasan regional. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kontribusi sektor-sektor unggulan lokal dalam mendorong nilai tambah ekonomi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi produktif. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11% tersebut juga menjadi indikator bahwa Banjarnegara memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat apabila difokuskan pada strategi yang tepat, seperti pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal (pertanian, pariwisata, industri kecil), peningkatan konektivitas wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Lebih lanjut, posisi PDRB per kapita yang masih rendah juga bisa dijadikan dasar untuk mendorong kebijakan afirmatif dan program intervensi yang bersifat pro-rakyat, termasuk peningkatan kualitas SDM, perluasan akses terhadap modal usaha mikro dan kecil, serta penyediaan infrastruktur ekonomi yang merata. Dengan demikian, kondisi ekonomi Banjarnegara saat ini bukan hanya menunjukkan adanya ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang

besar untuk merancang transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di masa depan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Banjarnegara masih menjadi tantangan yang nyata dan mendesak, namun juga menyimpan peluang strategis untuk mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan di masa depan. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 69,62, yang mencerminkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat masih berada pada kategori sedang dan belum menyentuh ambang kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Banjarnegara yang belum memperoleh akses optimal terhadap layanan dasar, seperti pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan ekonomi yang layak.

Masalah kualitas SDM juga berkorelasi erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara masih mencapai 137,68 ribu jiwa atau sebesar 14,71% dari total populasi. Persentase ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada daya beli dan kesejahteraan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan secara berkelanjutan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,57% pada tahun 2024 menempatkan Banjarnegara sebagai kabupaten dengan tingkat pengangguran tertinggi ketiga di kawasan, setelah Cilacap dan Banyumas. Ini mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, baik karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia maupun karena adanya ketidaksesuaian kompetensi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Meski demikian, kondisi-kondisi tersebut juga membuka peluang besar untuk melakukan transformasi pembangunan SDM secara lebih terarah. Rendahnya IPM dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran dapat dijadikan dasar untuk merancang kebijakan yang lebih fokus pada pembangunan manusia, seperti penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis industri lokal, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan perluasan program pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, memperkecil kesenjangan sosial ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, serta kompetitif di masa depan.

4. Degradasi Lingkungan Hidup

Degradasi lingkungan hidup ditandai dengan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan khususnya dalam penyediaan pangan

dan air; menurunnya kualitas lingkungan hidup, terlihat dari penurunan indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun kondisi pada tahun 2024 yaitu indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 65,76, indeks kualitas udara sebesar 92, dan indeks kualitas air sebesar 51,24.

Degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara merupakan tantangan serius yang berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan jika tidak segera ditangani. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya dalam penyediaan pangan dan air, menjadi sinyal peringatan terhadap keberlanjutan ekosistem alam yang menopang kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui beberapa indeks pada tahun 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjarnegara tercatat sebesar 65,76, menunjukkan bahwa kualitas lingkungan berada dalam kategori sedang dan cenderung menurun. Meskipun indeks kualitas udara relatif tinggi yaitu sebesar 92, hal ini tidak serta-merta menutupi permasalahan lain yang lebih kritis, seperti indeks kualitas air yang hanya mencapai 51,24 pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa kualitas sumber air di wilayah ini berada dalam kondisi kurang baik dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan, pertanian, dan ketersediaan air bersih.

Kondisi ini menggambarkan adanya tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas manusia, urbanisasi, limbah domestik dan industri, serta praktik penggunaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Penurunan kualitas air, khususnya, mengindikasikan adanya pencemaran yang belum tertangani secara optimal, baik dari sektor rumah tangga maupun pertanian dan industri. Masalah ini tidak hanya berdampak pada ekosistem air dan biota di dalamnya, tetapi juga terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya tersebut, seperti petani, nelayan darat, serta pengguna air bersih rumah tangga.

Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk memperbaiki dan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup ke depan. Rendahnya indeks kualitas air dan lingkungan dapat menjadi dasar untuk memperluas kebijakan pengelolaan sumber daya berbasis konservasi, meningkatkan infrastruktur pengolahan limbah, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perilaku ramah lingkungan, serta mendorong penggunaan teknologi hijau dalam berbagai sektor, termasuk pertanian dan industri rumah tangga. Selain itu, dengan indeks kualitas udara yang masih tinggi, Banjarnegara memiliki potensi besar untuk mempertahankan dan memperkuat aspek ini melalui pengembangan transportasi rendah emisi dan perluasan ruang terbuka hijau.

Dengan langkah kebijakan yang tepat, tantangan degradasi lingkungan dapat diubah menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan ekologi,

menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi generasi mendatang di Kabupaten Banjarnegara.

5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Banjarnegara, capaian tata kelola pemerintahan pada tahun 2024 ditunjukkan melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar BB, serta tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang berada pada level 3. Nilai SAKIP BB menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan pemerintah daerah telah berjalan cukup baik dan mulai mengarah pada manajemen berbasis hasil. Begitu pula, Kapabilitas APIP pada level 3 mencerminkan bahwa fungsi pengawasan internal telah dilaksanakan secara terstruktur dan mulai memberikan nilai tambah terhadap proses tata kelola organisasi.

Meskipun demikian, kedua capaian tersebut sekaligus menandakan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang cukup besar untuk mencapai level yang lebih tinggi dalam hal efektivitas kinerja dan integritas kelembagaan. Nilai SAKIP BB masih di bawah level A atau AA yang menjadi indikator kinerja pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Demikian pula, APIP level 3 belum mencapai level optimal (level 4 atau 5) yang menunjukkan pengawasan yang sepenuhnya mendorong perbaikan berkelanjutan dan manajemen risiko secara menyeluruh. Dengan demikian, tantangan ke depan terletak pada bagaimana meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, memperkuat sistem evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh.

Namun, kondisi ini juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui inovasi tata kelola, digitalisasi layanan publik, dan penguatan integritas aparatur. Meningkatkan kualitas SAKIP dan kapabilitas APIP dapat mendorong Banjarnegara menuju birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan, Banjarnegara tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu **“Maju”** dan **“Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Penjelasan Pokok Visi

Pernyataan Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera	Maju	Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti menjadi lebih baik; berkembang; dan telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Maju dimaknai sebagai kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah untuk mengembangkan sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maju ditunjukkan dengan tingginya daya saing, meningkatnya modernitas, terciptanya lingkungan yang inovatif, masyarakat yang mandiri dan tangguh, serta adanya kemampuan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun rohani.



Pernyataan Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Sejahtera	Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kondisi aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dalam upaya mewujudkan visi **“Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”** akan dilakukan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah difokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi secara vertikal maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan masyarakat, perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan efisien.

Dari sisi kuantitas, pembangunan infrastruktur akan diperluas untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar. Ini mencakup peningkatan jaringan jalan dan jembatan untuk memperlancar mobilitas, pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien, serta pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara dari sisi kualitas, pembangunan infrastruktur akan mengedepankan keawetan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada akan menjadi prioritas agar tetap berfungsi secara optimal dan tidak mengalami

penurunan kualitas yang dapat menghambat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

Dengan adanya peningkatan dalam kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih produktif, konektivitas yang lebih baik, serta akses layanan publik yang lebih merata, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, menciptakan peluang usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berkembang dan bersaing. Untuk mencapainya diperlukan pengembangan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan teknis akan diberikan kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam bisnis mereka.

Selain itu, penguatan konektivitas pasar dan digitalisasi ekonomi akan menjadi prioritas dalam memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Pemerintah daerah akan mendorong pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk memperkenalkan serta memasarkan produk unggulan daerah kepada pasar yang lebih luas. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pasar rakyat, juga akan menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat rantai pasok ekonomi daerah.

3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, misi ini berfokus pada peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci bagi masa depan generasi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, memperkuat kompetensi tenaga pendidik, serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain akses pendidikan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga diperlukan. Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan akan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh

layanan medis dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, program kesehatan preventif dan promotif akan diperkuat, termasuk kampanye hidup sehat, layanan imunisasi, serta peningkatan gizi masyarakat untuk mencegah stunting dan penyakit kronis, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berbagai program perlindungan sosial akan dioptimalkan, termasuk jaminan kesehatan bagi kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta dukungan bagi penyandang disabilitas dan lansia.

4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Seiring semakin tertekannya daya dukung dan daya tampung lingkungan karena pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya alam maupun aktivitas perekonomian lainnya maka diperlukan konsep pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan sumber daya, serta mitigasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Kelestarian sumber daya alam menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan diarahkan pada praktik yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, konservasi lahan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta berketahanan terhadap bencana. Hal ini juga selaras dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mendorong pembangunan rendah karbon dan peningkatan efisiensi energi.

Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah akan menjadi prioritas utama. Peningkatan sistem pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun industri, akan diterapkan guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri serta aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan akan dilakukan secara ketat guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan

Pemerintahan yang baik dan transparan merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik akan terus diperkuat. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara partisipatif. Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas dalam rangka meningkatkan keterbukaan data dan mempermudah akses informasi publik, termasuk memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna memastikan bahwa setiap keluhan dan masukan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Pelayanan publik akan diarahkan pada pemberian layanan yang cepat, efektif dan berorientasi pada masyarakat. Digitalisasi layanan pemerintahan akan terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi maupun perizinan. Selain itu, reformasi birokrasi akan dilakukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan akan terus dilakukan guna menciptakan pelayanan yang profesional, responsif, serta memudahkan masyarakat.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera”. Tujuan ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan segala potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia untuk mewujudkan Banjarnegara yang maju dan sejahtera. Kemajuan dan kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga dalam aspek spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan kemampuan daerah untuk mengembangkan kapasitas sosial dan ekonominya untuk mewujudkan kondisi di mana masyarakat Banjarnegara dapat hidup dengan aman, nyaman, dan berkecukupan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, serta potensi lokal. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, maka Kabupaten Banjarnegara dapat memastikan bahwa setiap warganya merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Banjarnegara akan terus berkembang menjadi daerah yang maju dalam pembangunan dan sejahtera dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang akan diambil adalah:

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Sasaran strategis "*Meningkatnya kualitas hidup masyarakat*" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera, dan berdaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kualitas hidup yang baik mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang merata, layanan sosial yang baik, serta lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial ekonominya dengan baik.

Untuk mencapai sasaran ini, perlu adanya peningkatan dalam berbagai sektor, diantaranya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera. Di sisi lain, aspek sosial dan budaya tidak boleh diabaikan. Penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkualitas.

2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berbasis keunggulan lokal. Sasaran ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, sektor unggulan, serta peningkatan daya saing usaha lokal di pasar yang lebih luas. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan optimalisasi potensi lokal yang mencakup sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembangunan ekonomi yang inklusif juga berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan menciptakan lapangan kerja yang cukup dan layak, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memastikan distribusi ekonomi yang adil, masyarakat dapat menikmati kehidupan secara lebih layak. Selain itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan diwujudkan melalui inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dukungan kebijakan yang berpihak pada investasi daerah, peningkatan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan infrastruktur yang memadai dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, menciptakan peluang investasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan konektivitas, pengembangan dan perbaikan jaringan jalan, jembatan serta peningkatan akses transportasi publik yang nyaman, terjangkau, diperlukan guna memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Selain konektivitas, penguatan infrastruktur ekonomi perlu dilakukan dengan membangun infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri, pusat perdagangan, dan pasar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di dalamnya penyediaan akses terhadap energi, air bersih, dan sistem logistik yang efisien. Untuk mendukung ekonomi digital, perluasan jaringan internet dan layanan telekomunikasi perlu dilakukan hingga ke daerah terpencil untuk meningkatkan akses terhadap ekonomi digital serta mendorong adopsi teknologi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan sanitasi, yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendukung pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peningkatan akses publik terhadap informasi secara terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan publik secara inklusif diarahkan guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.



Tabel 3. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025–2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi Mewujudkan Banjarmasin yang Maju dan Sejahtera Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal 3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial 4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera		Angka Kemiskinan	%	14,71	14,79-14,30	14,39-13,90	13,98-13,49	13,57-13,08	13,17-12,68	12,76-12,27
			PDRB per Kapita	Rp Juta	27,64	28,99	30,63	32,36	34,20	36,14	38,18
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,29	70,96	71,64	72,32	73,02	73,72
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20,6	19,3	18	16,7	15,4	14,1	14,1
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,79	11,19	10,59	10	9,40	8,80	8,20
			Indeks Risiko Bencana	Angka	103,28	102,80-102,27	100,80-100,40	98,79-97,82	96,79-95,59	94,78-93,36	92,78-91,13
			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70
		Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,57	6,10-5,72	5,50-5,00	5,47-5,17	5,43-5,13	5,38-5,06	5,33-4,90
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,76	68,75	75,95	75,99	76,03	76,08	76,08
		Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB	%	21,47	22,51	22,65	22,79	22,92	23,06	23,20
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,05	81,30	81,55	82,05	82,55	83,05	83,55



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan		yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,29	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Banjarnegara maju dan sejahtera dengan empat sasaran daerah yang akan diwujudkan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, 2) Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan, 3) Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan PDRB per kapita dan menurunkan angka kemiskinan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 dirumuskan strategi pembangunan daerah berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Strategi:

- a. Peningkatan layanan pendidikan
- b. Peningkatan layanan kesehatan
- c. Peningkatan layanan kesejahteraan sosial
- d. Peningkatan keberdayaan masyarakat
- e. Peningkatan toleransi antar penduduk
- f. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan

Strategi:

- a. Pengembangan dan penguatan UMKM serta pelaku usaha ekonomi lainnya
- b. Pengembangan diversifikasi ekonomi
- c. Peningkatan promosi investasi
- d. Peningkatan produktivitas pertanian
- e. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- f. Perbaikan tata kelola pengelolaan sampah dan limbah
- g. Pengembangan energi terbarukan

- h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Strategi:

- a. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan
- b. Pengembangan sistem transportasi
- c. Peningkatan infrastruktur layanan dasar
- d. Penataan ruang untuk menunjang pembangun infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
- 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Strategi:

- a. Peningkatan kualitas layanan publik
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
- d. Sinergi optimalisasi pengelolaan pajak dan opsen pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah
- e. Pengembangan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan alternatif, seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, utang daerah, optimalisasi peran BUMD, dan sebagainya.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026-2030 akan lebih optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan prioritas daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan dengan arah kebijakan pada periode sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026-2030 dijabarkan sebagai berikut.

1. Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan pada pembangunan pondasi dan perencanaan strategis dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 ditujukan untuk:

- a. Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas
- b. Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan

- c. Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan.

2. Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan pada implementasi dan evaluasi dampak dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2027 ditujukan untuk:

- a. Perluasan akses layanan layanan dasar
- b. Pembinaan bisnis sektor unggulan potensial ekonomi kreatif secara berkelanjutan
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung sektor utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan partisipatif

3. Tahun 2028

Tahun 2028 arah pembangunan akan diarahkan perluasan dan optimalisasi dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2028 ditujukan untuk:

- a. Peningkatan cakupan layanan dasar yang berkualitas
- b. Perluasan jangkauan program pengembangan dan pemerataan ekonomi serta ekosistem investasi secara berkelanjutan
- c. Peningkatan kualitas konektivitas daerah dan infrastruktur utama lainnya
- d. Optimalisasi sistem *e-government* dan partisipasi masyarakat.

4. Tahun 2029

Tahun 2029 arah pembangunan akan diarahkan konsolidasi dan penguatan hasil dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2029 ditujukan untuk:

- a. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis umpan balik masyarakat
- b. Peningkatan daya saing perekonomian lokal secara berkelanjutan
- c. Penguatan konektivitas dan pemeliharaan infrastuktur yang telah terbangun
- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah

5. Tahun 2030

Tahun 2030 merupakan tahun terakhir pada periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan perwujudan dan keberlanjutan program dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2030 ditujukan untuk:

- a. Penguatan kualitas hidup masyarakat secara merata
- b. Penguatan inovasi dalam perekonomian daerah untuk peningkatan daya saing secara berkelanjutan
- c. Penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial
- d. Perwujudan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.



Gambar 3.1.

Penahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan dilaksanakan dalam rangka pencapaian misi daerah. Hubungan tersebut tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi

No	Misi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik	1. Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian 2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung sektor utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 3. Peningkatan kualitas konektivitas daerah dan infrastruktur utama lainnya 4. Penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial
2.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal	1. Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan
3.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	2. Pembinaan bisnis sektor unggulan potensial ekonomi kreatif secara berkelanjutan



No	Misi	Arah Kebijakan
		3. Perluasan jangkauan program pengembangan dan pemerataan ekonomi serta ekosistem investasi secara berkelanjutan 4. Penguatan inovasi dalam perekonomian daerah untuk peningkatan daya saing secara berkelanjutan
4.	Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas 2. Perluasan akses layanan layanan dasar 3. Peningkatan cakupan layanan dasar yang berkualitas 4. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis umpan balik masyarakat 5. Penguatan kualitas hidup masyarakat secara merata
5.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan	1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan partisipatif 3. Optimalisasi sistem <i>e-government</i> dan partisipasi masyarakat 4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah 5. Perwujudan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Program prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. Program Unggulan

Merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program unggulan sebagai berikut:

1. Jalan kabupaten dan jalan usaha tani mulus
2. Insentif untuk guru keagamaan
3. Dana pinjaman bergulir UMKM melalui BLUD
4. Peningkatan Dana ADD
5. Pembangunan RS di Banjarnegara atas
6. Renovasi sarana dan prasarana sekolah & rumah ibadah
7. Pengembangan unit bibit benih & penyediaan sarana produksi pertanian
8. Rintisan kawasan industri ramah lingkungan
9. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
10. Peningkatan kapasitas perangkat desa



B. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Merupakan program yang akan dilakukan selama periode RPJMD untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3. 4 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026–2030

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera		Menurunkan kemiskinan	Angka Kemiskinan	
		Meningkatkan pendapatan	PDRB per Kapita	
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Program Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum)
				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program peningkatan



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Pemberdayaan Sosial
				Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender
				Program Perlindungan Perempuan
				Program Pemenuhan Hak Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak
				Program Pembinaan Keluarga Berencana
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Program Pengendalian Penduduk
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Program Pengembangan Kebudayaan
				Program Pembinaan Perpustakaan
				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Meningkatkan status gizi	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Meningkatkan ketahanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Rehabilitasi Sosial
				Program Penanganan Kerawanan Pangan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Menurunkan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Program Penanggulangan Bencana
				Program Penanganan Bencana
	Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Program Promosi Penanaman Modal
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengembangan Ekspor
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Program Pemasaran Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Penatagunaan Tanah
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
				Program Penyuluhan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro Daerah
				Program Hubungan Industrial
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Mencegah degradasi kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				Program Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air
				Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota
				Program Pengelolaan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Perekonomian dan Pembangunan
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
				Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Program Adminstrasi Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa
				Program Penataan Desa
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
				Program Kepegawaian Daerah
				Program Pengembangan SDM
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Program Pendaftaran Penduduk



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Program Pencatatan Sipil
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
		Meningkatkan kapasitas fiskal	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 juga disusun guna memberikan dukungan terhadap pencapaian target RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap program delegasi Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 3. 5 Dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap Program Delegasi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
1	2	3	4	5
PP.	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa			
		Peningkatan TPP ASN	-	-
		Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah *)	Pemberian insentif bagi pemungut pajak dan retribusi daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Gaji Perangkat Desa	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan ASN	1. Pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional. 2. Pengiriman latsar cpns dan diklatpim, 3. Penyelenggaraan orientasi PPPK, 4. Pengiriman peserta ujian kedinasan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Retret penyelarasan visi misi dan program Kepala daerah	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	-	-
		Beasiswa kepada ASN	Pemberian bantuan stimulant tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar	Program Kepegawaian Daerah
PI.	Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni			
		Penyusunan Pergub/Perkada		
		Pelaksanaan integrasi aplikasi	Integrasi Aplikasi SID ke OPENDATA Banjarnegara	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PI.	Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Nglakoni”			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Menyiapkan Infrastruktur di Pusat dan PPID	Pengembangan Aplikasi PPID Kabupaten Banjarnegara	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Menyiapkan kebutuhan SDM di Pusat dan PPID	Mengundang Narasumber / Pembahas dalam Sosialisasi PPID Kabupaten	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Merubah Peraturan Gubernur terkait dengan PPID	Memperbarui SK DIP dan DIK (sesuai dengan usulan DIK dari PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Pelatihan SDM PPID Smart Response	Melaksanakan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PI.	Kantor Gubernur Rumah Rakyat			
		Pertemuan reguler pemerintah provinsi atau Gubernur dengan masyarakat secara langsung di Kantor Gubernur atau Kantor Eks Bakorwil	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kanal aduan Lapor Gubernur dengan bersinergi dengan seluruh OPD terkait pengaduan di Kab Banjarnegara	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PI.	Digitalisasi Manajemen Arsip			
		Penyusunan regulasi manajemen arsip	Membuat atau merevisi regulasi terkait manajemen arsip (seperti Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Perbup tentang Kearsipan atau SOP Kearsipan).	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
		Pembuatan Digital Arsip terintegrasi	1. Mengalihmediakan dan mengautentikasi arsip; 2. Memfasilitasi pembuatan akun, tanda tangan elektronik, dan menjadi narasumber bimtek untuk pelatihan SRIKANDI; 3. Memberkaskan arsip digital pada SRIKANDI; 4. Mengunggah item arsip ke aplikasi SIKN dan mempublikasikan ke aplikasi JIKN.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
PA.	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
	Pelayanan Publik berbasis wilayah			
		Penyusunan regulasi kelembagaan		
		Penyiapan infrastruktur dan SDM		
PA.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak			
		Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	PKS dengan Lembaga Bantuan Hukum	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PA.	Pengembangan sister province			
		Penyusunan regulasi tentang sister province atau Kerjasama Daerah (KSD)		
		Promosi kerjasama sister province		
		Pengembangan sister province pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, teknologi informasi)		
PA.	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK			
		Penyusunan Pergub satuan tugas pengamanan data digital	- Pembaharuan SK Agen CISRT Kabupaten th 2023 dan SK Tim Agen CISRT Kabupaten Tahun 2023	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Identifikasi ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	- Bimtek CISRT tahun 2026 untuk tenaga TIK - Bimtek kemandirian siber untuk siswa SMA dan SMK	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Pembentukan satuan tugas pengamanan data digital	Pembentukan Tim CISRT Kabupaten Banjarnegara dari elemen tenaga TIK di setiap OPD	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
PA.	Program Kerjasama Forkopimda			
		Koordinasi Hubungan Kerjasama Pembangunan Daerah melalui Forkopimda		
PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima			
		Peningkatan sarpras dan SDM pelayanan dan fasilitas SAMSAT	Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
PT.	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah			
		Penambahan anggaran penegakan Peraturan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penambahan SDM penegakan Peraturan Daerah		
		Revitalisasi sarana dan prasarana PPNS		
PT.	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media,			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
	dan lembaga keuangan)			
		Kerjasama dengan akademisi	Kerjasama Dengan Universitas, Politekhnik dan Sekolah Tinggi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Kerjasama dengan Bisnis	Kemitraan Inovasi dan Riset	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Kerjasama dengan Komunitas	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Memperkuat Kerjasama Pemerintah	Forum Multi-Stakeholder	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Kerjasama dengan Media	Penyiaran Dialog Interaktif dan Forum Terbuka	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PT.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah			
		Memperkuat ekosistem riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Kolaborasi Hexahelix	
PI.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD		- Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM - Pendampingan ZI menuju WBK - Pendampingan WBK menuju WBBM - Evaluasi Internal WBK/ WBBM oleh TPI - Pemantauan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM untuk mempertahankan predikatnya	
		Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan:



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
				pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
		Evaluasi Zona Integritas		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
PI.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa			
		Penyusunan Pergub tentang kewenangan Inspektorat	Penyusunan Perbup tentang kewenangan Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Penambahan anggaran pengawasan	Pengusulan anggaran minimal sesuai ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		Penambahan SDM pengawasan	Penambahan JFT Auditor/ PPUPD melalui jalur Pengadaan CPNS/ Impassing maupun lulusan IPDN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Sistem informasi pengawasan terintegrasi	Pengembangan aplikasi pendukung pengawasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PA.	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum,			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
	OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK			
		Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	insersi Nilai Antikorupsi pada ASN	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
		Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi pada 30 Desa di Kabupaten Banjarnegara	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
PA.	Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C			
		Penyusunan Pergub tentang tata kelola mineral bukan logam dan batuan (MBLB)	Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
PI.	Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah			
		Riset potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala	Kajian Tarif dan Kebijakan Retribusi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Menyusun riset potensi pembangunan desa	Kajian Rencana pemajuan induk IPTEK Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Menyusun rencana pembangunan kawasan pedesaan	Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Sistem informasi peta potensi desa dan kelurahan	Integrasi data statistik, demografi, dan potensi desa dalam satu sistem berbasis GIS (Geographic Information System).	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PA.	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal			
		Menyusun Regulasi Daerah tentang Pendayagunaan Aset Idle Daerah	Menerbitkan SK Bupati tentang Properti Investasi	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Menempatkan SDM di UPTD Pemanfaatan Aset	Tidak ada UPTD	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait pemanfaatan Aset	Mengoptimalkan sewa lahan di Desa Kalitengah untuk pertambangan dan kuliner tamkot serta kuliner banjarnegara	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Promosi pemanfaatan aset potensial	Melakukan sosialisasi pemanfaatan dengan mekanisme sewa atas aset potensial	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Melakukan kerjasama pengelolaan aset	Optimalisasi Sewa dan retribusi aset kepada pihak ketiga	Pengelolaan Barang Milik Daerah
PA.	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD			
		Merubah Pergub terkait tata kelola BUMD		
		Reformasi Struktur Organisasi		
		Peningkatanan kompetensi SDM		
		Menyusun Rencana Aksi tata kelola BUMD		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima			
		Perbaikan Tata Kelola SAMSAT untuk memaksimalkan pendapatan daerah	Sinergi dalam optimalisasi peningkatan pkb dan bbnkb	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah	Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah	5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PP.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim			
		Penyusunan Regulasi Daerah terkait ekosistem ekonomi syariah		
		Mengembangkan wisata ramah muslim		
		Penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah		
PP.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri			
	Pupuk mudah bagi petani	Penyusunan pergub		
		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Koordinasi dalam penngajuan RDKK untuk menentukan kuota pupuk subsidi yang akan diajukan	Program pelaksanaan penyuluhan
	Subsidi solar bagi nelayan	Penyusunan pergub		
		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Pendirian SPBU milik BUMD JPEN di kawasan Nelayan		
	Day care untuk buruh di Kawasan Industri	Penyusunan pergub	Penyusunan Perbup	
		Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri	palaksanaan kepatuhan norma ketenagakerjaan , oordinasi dengan pengusaha , serikat pekerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
PP.	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja			
		Penyusunan Pergub Pemberdayaan Pemuda Jawa Tengah		
		Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun)		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota (terkait dengan data pemuda)		
		Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PI.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)			
		Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas	pelatihan bagi disabilitas berupa pelatihan pemasaran digital produk	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	Rencana aktivitas riil pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dapat mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif		
		Pengembangan sport center di setiap kecamatan		
PI.	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru			
		Pemetaan sasaran desa wisata	Pendampingan pengembangan desa wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Penambahan anggaran		
		Menyiapkan infrastruktur dan SDM pengelola		
PI.	Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah			
	Pengembangan wisata alam	Dieng - Wonosobo	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Geopark Karangsambung - Kebumen		
	Pengembangan wisata budaya	Rambut Gimbal - Dieng	Pelaksanaan Dieng Culture Festival	Program Pengembangan Kebudayaan



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Desa Adat Banokeling - Banyumas		
	Pengembangan wisata religi	Kyai Soleh Darat - Kota Semarang		
		Sunan Kalijaga - Demak		
		Sunan Muria - Kudus		
		Klenteng Liong Hok Bio - Magelang		
		Gereja Salib Putih - Salatiga		
		Prambanan dan Borobudur - Magelang		
PI.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening			
		Pengembangan Kawasan Borobudur		
		Pengembangan Kawasan Kopeng		
		Pengembangan Kawasan Rawa Pening		
PI.	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa			
PI.	Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal		Penetapan BCB dan pengembangan wisata religi dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
	Pembinaan kebudayaan lokal bekerjasama dengan ISI Surakarta	Sekolah Wayang, Tari, Gamelan, dan Dalang		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Penyusunan Peraturan gubernur tentang pemberian insentif budayawan		
		Pemberian insentif kepada budayawan		
		Identifikasi potensi pembiayaan kelembagaan BLUD sektor budaya dan cagar budaya		
	Revitalisasi taman cagar budaya	Taman Budaya Jawa Tengah		
		Museum Ronggowarsito		
PA.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis			
		Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM		
		Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM		
		Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM		
		Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM		
PA.	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot)			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Pemasangan jaringan FO, Wi-fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis)	Usulan dari Dinkominfo Kab Banjarnegara pada tahun 2025 sejumlah 25 desa ke Dinkominfo Provinsi, terkait bantuan internet desa per tahun pada desa blankspot (lemah signal), pada tahun 2025 mendapat bantuan internet desa sebanyak 3 desa (Sawal, Semangkung, dan Mlaya),	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
PA.	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM			
		Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)		
		Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora		
PA.	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter			
		Jalan sabuk Gunung Sumbing Wonosobo - Banjarnegara		
		Pemalang - Banyumas		
		Brebes - Tegal		
		Pemalang - Batang		
		Semarang - Purwodadi		
		Rembang - Blora		
	Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi baik di Wilayah Perbatasan maupun di Kabupaten / Desa			
		Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		(PJU) di Jalan Provinsi		
PA.	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)			
		BLUD Pengelola Trans Jateng		
		Kerjasama CSR dan BUMN/BUMD		
		Moderanisasi armada Trans Jateng		
		Moderanisasi sistem Trans Jateng		
		Modernisasi halte Trans Jateng		
PA.	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi			
PA.	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global			
PA.	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api			
PA.	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Penyesuaian dan Implementasi Regulasi Daerah terkait Industri Ramah Lingkungan	saat ini regulasi yang bisa menjawab adalah peraturan bupati nomor 7 tahun 2024 tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044	tidak ada
		Pemberian Insentif bagi Investor yang telah menerapkan Industri Ramah Lingkungan	Penyusunan peraturan bupati terkait tindak lanjut peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha, namun memang belum secara spesifik terkait pemberian insentif kepada industri yang menerapkan ramah lingkungan.	tidak ada
PA.	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)			
		Identifikasi kawasan industri berwawasan lingkungan	belum ada, hanya kawasan peruntukan industri diatur dalam perda kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2023	tidak ada
		Fasilitasi pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan	belum ada, hanya kawasan peruntukan industri diatur dalam perda kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2023	tidak ada
PA.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya			
		DAS Serayu		
		DAS Bengawan Solo		
PA.	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi			
		Sewa Lahan Pertanian dari Masyarakat, Pekerja oleh Masyarakat, tapi dikelola oleh Investor Swasta dengan Mengedepankan Kesejahteraan Petani	bentuk integrasi yang dilakukan adalah melakukan integrasi pertanian antara komoditas kopi dan ternak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Upland)



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PA.	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian			
		Adanya sistem kolaborasi pertanian, swasta melakukan sewa lahan kepada pemilik lahan kemudian dilakukan penyesuaian lahannya dan yang mengelola dikembalikan ke pemilik lahan agar yang awalnya panennya 3 kali setahun bisa 4 kali setahun	bentuk integrasi yang dilakukan adalah melakukan integrasi pertanian antara komoditas kopi dan ternak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Upland)
PA.	Pendirian Koperasi Buruh			
		Pendirian Koperasi Buruh		
PA.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora			
		Identifikasi budaya lokal di Jawa Tengah	Fasilitasi pentas seni tradisional	Program pengembangan kebudayaan
		Pameran Budaya Jawa Tengah di forum Internasional		
		Pengembangan jejaring Diaspora untuk promosi budaya		
PA.	Event olahraga memancing terbesar di Asia			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PA.	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi			
PA.	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya			
		Menyusun riset investasi berbasis padat karya	belum ada	tidak ada
		Menyusun peta investasi berbasis padat karya	saat ini hanya ada simpetin dari tahun 2018, belum ada update sistem	tidak ada
		Identifikasi potensi investasi proyek pemerintah yang padat karya	ada dalam simpetin	tidak ada
		Promosi investasi dalam dan luar negeri	Keikutsertaan dalam kegiatan pameran atau expo	Program Promosi Penanaman Modal
PA.	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa			
		Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bibit Ternak Khas Jawa		
		Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Lokal	pengembangan komoditas domba batur	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian melalui kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
		Pelatihan dan Pendampingan Peternak lokal		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Penjaminan Kualitas Pakan Ternak		
PA.	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional			
PA.	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa			
		Penguatan koperasi desa		
PA.	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa			
PA.	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah			
		Penyusunan Pergub Badan Aglomerasi		
PA.	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau			
		Menyusun Regulasi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Menyusun Perda	
		Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau	Menyusun RAD	
PA.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata			
		Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 konten	Pendampingan konten kreator	Program pemasaran pariwisata



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		kreator di desa wisata		
PT.	Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi			
		Pesantren olah sampah		
		Pesantren mandiri energi		
PT.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan			
		Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir		
		Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi petani perempuan	dilaksanakan melalui pengembangan kelompok wanita tani memamui beberapa kegiatan	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
PT.	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)			
		Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes		
		Penyusunan Regulasi Daerah tentang Bumdes		
		Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jawa Tengah		
PT.	Revitalisasi embung			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Pembangunan Embung Baru	dilaksanakan pembangunan embung baru untuk irigasi pertanian	program pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian
		Rehabilitasi Embung eksisting		
		Biaya Operasional dan Pemeliharaan		
PT.	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau			
		Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah		
		Promosi produk unggulan di Jawa Tengah	Mengikuti pameran produk - produk umkm	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
PT.	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan			
		Penguatan Urban Farming di Perkotaan	pengembangan komoditas hortikultura (buah dan sayur)	Program Penyuluhan Pertanian
		Pelatihan dan pembinaan kepada petani urban farming		
		Promosi hasil urban farming		
PT.	Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital		Disperindagkop UKM mengusulkan program Revitalisasi Bangunan Pasar yang rusak.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Disperindagkop UKM menyusun Rencana Aksi Digitalisasi Pasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PT.	Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah			
		Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PT.	Penyediaan benih yang berkualitas		fasilitasi benih kepada petani / kelompok tani	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
PT.	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian		fasilitasi alsintan kepada kelompok tani	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
PT.	Regulasi Pengembangan kawasan industri			
PT.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha			
		Percepatan perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		Pemberian insentif bagi investor		
PT.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce)			
		Membuat anak perusahaan pengelola e commerce milik pemerintah		
		Membuat platform E-Commerce		
		Membuat Pergub tentang penguatan e commerce		
PT.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
	olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”			
PP.	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)			
		Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	Pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja di 20 kecamatan (anggaran APBD dan DBHCHT)	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Bursa Kerja / Job Fair	pelaksanaan job fair / bursa kerja di 20 kecamatan	Penempatan Tenaga Kerja
PA.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta			
		Penyetaraan ijazah lulusan pesantren		
PA.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan			
		Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Standarisasi rumah pemotongan hewan		
PA.	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
	Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja			
		Membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri		
		- Perbaiki kurikulum sesuai kebutuhan industri		
PA.	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial			
		Pemberdayaan Alpukat		
		- Kabupaten Semarang, Wonosobo, dan Kendal		
		Pemberdayaan Sengon		
		- Wonosobo, ,Banjarnegara dan Temanggung		
		Pemberdayaan kelapa Kopyor		
		- Pati dan Blora		
		Pemberdayaan Aren		
PT.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)			
		Pengembangan koperasi pesantren		
		Fasilitasi jaringan pemasaran one pesantren one product		
PT.	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan		Perlindungan Hak buruh dan pembinaan serikat pekerja.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerj dan penutupan perusahaan yang yang bedampak pada



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
				kepentingan di 1 daerah
		Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki-laki	Pembinaan dan koordinasi dengan organisasi pengusaha	
		Perlindungan atas hubungan industrial	Review peraturan bupati terkait ketenagakerjaan dan perlindungan jamsos	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerj dan penutupan perusahaan yang yang bedampak pada kepentingan di 1 daerah
		Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah	Keikutsertaan serikat pekerja dalam penetapan UMK	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berdampak pada kepentingan dalam 1 daerah
			Bantuan Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja
PT.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas			
PT.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila			
		Tambak Ikan Nila - Pantura		
		Tambak Udang - Pansela		
PP.	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama	- Menerbitkan SK kepengurusan FKUB dan PKUB	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Penerapan pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK	Peningkatan toleransi beragama kepada Masyarakat		
		Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada Masyarakat	- Forkopimda Go To School - Pembinaan Paskibraka Kecamatan	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng	- Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Kabupaten - Pembinaan Paskibraka Kecamatan - Mengirim Perwakilan Paskibraka Tk Provinsi	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan	- Fasilitasi kegiatan ormas kepemudaan lingkup keagamaan	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		Pelatihan Pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di kalangan pesantren	- Pengisian kegiatan di lingkungan pesantren	
		Penyelenggaraan Jateng Bersholawat	- Banjarnegara Bersholawat pada rangkaian HUT Kemerdekaan	
PA.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan hingga operasional. Tujuannya adalah menyediakan tempat aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta memberikan dukungan pemulihan.	Program Perlindungan Perempuan
				Program Perlindungan Khusus Anak
		Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas		
PA.	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO			
PA.	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
PA.	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri			
PA.	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan			
	Peningkatan kegiatan forum Kerukunan antar Umat Beragama			
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	- Kegiatan pembinaan Forum Umat Kerukunan Umat Beragama Kabupaten - Pembinaan Forum Umat Kerukunan Ummat Beragama setiap Kecamatan	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan	- Kegiatan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten - Pembinaan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama setiap Kecamatan	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
			- Pemantauan & Pembinaan Penganut Kepercayaan	
		Hibah FKUB	Hibah FKUB	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Peningkatan kegiatan kepada forum pembauran kebangsaan			
		Penguatan Jawa Tengah Kampung Bhineka		
		Penguatan Kontra Radikalisme Ekstrimisme Bagi Masyarakat	- Pembahasan dalam Rakor Pengawasan Dini Daerah	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Lintas Etnis	Belum ada wadah yang menaungi	
		Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	- Pembentukan Forum Komunikasi antar Etnis yang ada di Kabupaten Banjarnegara (Tionghoa, Padang, Batak, Arab, Madura, Jawa, Sunda) (FPK)	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		Dialog Pembauran Kebangsaan	- Rakor Komunikasi Forum Silaturahmi antar etnis (FPK)	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		Nguri-nguri Budaya pada Generasi Muda Guna Ketahanan Bangsa	- Pemantauan dan dukungan pada saat kegiatan pelestarian budaya - Fasilitasi Ormas lingkup kebudayaan dan kepemudaan	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		Kemah Kebangsaan		
		Hibah FPK		
PT.	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Penyusunan RAD tentang PUG melibatkan beberapa tahapan dan aktivitas nyata antara lain pembentukan tim penyusun,pengumpulan data dan informasi,analisis gender,perumusan arah kebijakan dan strategi,penyusunan rencana aksi,penyusunan anggaran,konsultasi publik,penetapan dan sosialisasi,implementasi dan pemantauan,evaluasi dan pelaporan Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan perempuan dalam pembangunan daerah berbasis organisasi	dapat mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta advokasi kebijakan yang responsif gender.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
PT.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya			
		Event Budaya di spot kunjungan wisata	Pelaksanaan Event Budaya di destinasi wisata	Program Pengembangan Kebudayaan
		- Kraton Mangkunegaran - Solo		
		- Kota Lama - Semarang		
		- Kota Lama - Banyumas		
		Penggunaan baju adat daerah setiap 1 minggu sekali dan hari-hari besar nasional		
PP.	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren			
		Hibah pesantren		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PP.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin			
		Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Kepesertaan JKN bagi masyarakat miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah (JKN PBI APBD)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat- Jaminan Kesehatan Masyarakat
PP.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi			
		Insentif Guru		
		Insentif pengajar agama		
		Insentif penghafal kitab		
		Beasiswa luar dan dalam negeri untuk siswa miskin		
		Beasiswa luar dan dalam negeri untuk guru		
		Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi		
PI.	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil		Menjalankan fungsi koordinasi percepatan penurunan stunting, Manajemen data, Monitoring dan Evaluasi (pelaporan dan pelaksanaan PMT lokal puskesmas baik yang bersumber dana BOK puskesmas atau Bankeu)	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
		Balita	Menjalankan fungsi koordinasi pencatatan pelaporan data, monev Pelayanan SPM Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pemberian PMT	Pemberian PMT Lokal Balita dan Ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Pemberian Suplemen	Pembelian Bahan membuat Formula 100 WHO untuk kasus gizi buruk/gizi kurang	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
PI.	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)			
		Menyediakan Paket Pendidikan Seragam		
		Menyediakan Paket Pendidikan Buku Pembelajaran		
		Menyediakan Paket Pendidikan Akses Internet		
PA.	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa			
		Spesialis keliling setiap desa	Pelaksanaan layanan spesialis keliling pada 30 desa sasaran bekerjasama dengan 4 RS Kabupaten, RS Margono sebagai pengampu, dan puskesmas di wilayah	
		Pelayanan kesehatan keliling	Layanan Sapa Sehati	
		Puskesmas pembantu setiap desa	Pembangunan faskes lainnya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan setiap desa		
PA.	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Penyediaan 1 Dokter di setiap puskesmas pembantu	Pengangkatan CPNS, PPPK, Pegawai BLUD dan distribusi / mutasi tenaga dokter	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Penyediaan 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu	Pengangkatan CPNS, PPPK, Pegawai BLUD dan distribusi / mutasi tenaga bidan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
PA.	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit		Pelayanan Klinik Geriatri	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Lansia	Pengiriman Obat Gratis (pasien usia 60 keatas)	
		Ibu Hamil	kelompok rawan ibu hamil, diberikan kartu antrian bertanda merah dan kursi penunggu dibedakan	
		Disabilitas	Pengiriman Obat Gratis	
		Pensiunan		
PA.	BOSDa Madrasah Aliyah			
		Identifikasi Madrasah Aliyah di Jawa Tengah		
		Penambahan Anggaran BOS		
PA.	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta			
		Identifikasi SMA/SMK di setiap Kecamatan		
		Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah swasta		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PA.	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga			
		Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih		
		Peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga		
		Meningkatkan alokasi anggaran KONI dan KORMI		
PA.	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan			
		Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusif		
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas		
PT.	Pap smear gratis (skrining Ca serviks)			
		Skrining IVA	Sosialisasi dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode DNA HPV Co testing IVA kepada wanita usia 30-69 tahun dengan riwayat kontak sosial	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
PT.	Peningkatan operasional kader Posyandu		Peningkatan kapasitas 25 keterampilan pada kader Posyandu	Pemenuhan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
PT.	Peningkatan kualitas hidup lansia			
		Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia		
		Pemeriksaan kesehatan	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi		
PT.	Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba		Peningkatan kapasiatas Teanga Kesehatan	
PT.	Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah			
		RSJD dr.Soejarwadi Klaten		
		RSJD Amino Gondohutomo		
		RSJD dr Arif Zainudin		
PT.	Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah			
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	meliputi beberapa kegiatan utama antara lain Pembentukan TPPK dan Satgas PPKS,Sosialisasi dan edukasi,pengembangan mekanisme pelaporan dan penanganan,penguatan budaya sekolah,monitoring dan evaluasi Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.	Program Perlindungan Khusus Anak
PT.	Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa			
		Penguatan regulasi daerah tentang sekolah luar biasa		
		Peningkatkan kualitas guru SLB		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Perbaikan manajemen dan tata kelola SLB		
		Perbaikan sarana dan prasarana SLB		
PT.	Cek kesehatan gratis			
		Bayi Baru Lahir	Skrining Kesehatan pada Bayi Baru Lahir meliputi: Pertumbuhan, PJB, Hormon Thiroid,G6PD, ggn Adrenal,kelainan saluran empedu	
		Balita dan Pra Sekolah	Skrining Kesehatan padaanak Balita dan Pra Sekolah	
		Anak Sekolah (SD, SMP, SMA)	Skrining Kesehatan Pada Anak Sekolah SD, SMP dan SMA	
		Dewasa	Skrining Penyakit Tidak Menuklar dan Penyakit Menular pada orang dewasa/usia produktif usia 15-59 tahun	
		Lansia	Skrining Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pada Lansia	
PP.	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana			
		Pembangunan lumbung kesejahteraan		
		Produk unggulan go internasional bekerjasama dengan diaspora		
		Sistem Informasi Desa (SID)		
		Penguatan Tim tanggap bencana		
PP.	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
	Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional			
		Verifikasi dan Validasi RTLH		
		Penyediaan Anggaran		
		Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebagai Etalase Jawa Tengah		
		Mendorong terciptanya Kolaborasi dengan BUMD, Swasta, dan Dunia Usaha dalam Kawasan Pengembangan Potensi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan		
PI.	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa		Memverifikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Keuangan Umum dan Khusus Kepada Desa	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Gubernur		
		Wakil Gubernur		
		DPRD		
PI.	Jambanisasi 100%		Basos uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat untuk jambanisai	program penyelenggaraan kabupaten kota sehat
PI.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari		dilaksanakan pelatihan mengenai teknologi tepat guna dan terbaru	program peyuluhan pertanian
	Pembelian hasil panen petani	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Mengoptimalkan Hasil Pertanian (Intensifikasi)		
		Penyuluhan dan Pelatihan untuk		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		meningkatkan Kualitas Panen		
	Pembelian hasil panen nelayan	Pelatihan Penggunaan Teknologi GPS pada Nelayan		
		Pelatihan Petambak Garam untuk Peningkatan Kualitas Produksi Garam Industri		
		Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen		
PI.	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida		koordinasi dan sosialisasi asuransi pertanian	program penyuluhan pertanian
		Asuransi gagal panen bagi petani		
		Asuransi alat tangkap dan kapal bagi nelayan		
PA.	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir			
		Pembangunan rumah apung di Kota Pekalongan		
		Pembangunan rumah apung di Kab. Demak		
PA.	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional			
	Kewenangan Provinsi	Kabupaten Kendal		
		Kabupaten Pemalang		
		Kota Pekalongan		
	Bekerjasama dengan BBWS	Juana - Pati		
		Semarang		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Jepara		
PA.	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)			
	Sistem Irigasi terintegrasi	Grobogan		
		Demak		
		Pati		
	Pompanisasi khusus daerah priotitas rawan kekeringan	Grobogan		
		Demak		
		Pati		
PA.	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM			
		Melakukan Identifikasi hutang petani, nelayan, UMKM		
		Menyusun Peraturan Gubernur penghapusan piutang		
		Pendampingan Penghapusan Hutang		
PA.	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar			
PA.	Petani milenial gaji			
		Identifikasi dan pemetaan petani milenial		
		Pendampingan petani milenial		
		Koordinasi dan Integrasi dengan Pemerintah Pusat terkait		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Program Petani Milenial Gajian		
PA.	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah			
		Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola CSR		
		Penyusunan lembaga pengelola CSR		
		Identifikasi program yang dibiayai CSR		
PA.	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana			
		Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana melalui tatap muka	(1.05.03) Program Penanggulangan Bencana
		Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi	Penyediaan alat peringatan dini bencana (EWS)	(1.05.03) Program Penanggulangan Bencana
		Monitoring sistem peringatan bencana		
PT.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin			
		Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial		
		Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Penambahan Identitas bagi kaum marginal	pembuatan kartu disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
PT.	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya			
		Menyusun Regulasi Daerah terkait Energi Baru Terbarukan		
		Identifikasi desa mandiri energi		
		Melakukan riset potensi mandiri energi berbasis desa		
		Kolaborasi pengembangan EBT dengan BUMN dan Swasta		
	Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih			
	Pembangunan infrastruktur SPAM Regional	Solo Raya		
		Banyumas Raya		
		Pati Raya		
		Kedu Raya		
		Pekalongan Raya		
		Semarang Raya		
	Pembangunan infrastruktur SPAM Industri	Kawasan Industri Terpadu Batang		
		Kawasan Industri Kendal		
PT.	Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
	sekolah dan pesantren			
	Penerapan Pendidikan dan pelatihan Perubahan Iklim	SMA/SMK		
		Pesantren		
	Penerapan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	SMA, SMK, SLB	Pelatihan dan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	(1.05.03) Program Penanggulangan Bencana
		Pesantren		
PT.	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat			
		Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana	Peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	(1.05.03) Program Penanggulangan Bencana
		- BPBD Provinsi		
		- Tagana		
		- Masyarakat	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan Pembinaan Relawan	(1.05.03) Program Penanggulangan Bencana
		Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota		
PT.	Penataan Drainase dan Pengendalian Banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak			
	Penataan Drainase	Kota Semarang		
		Kota Pekalongan		
		Kabupaten Demak		
	Pengendalian Banjir	Kota Semarang		
		Kota Pekalongan		
		Kabupaten Demak		
		Kabupaten Kendal		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PT.	Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta			
PP.	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai			
		Penanaman mangrove		
PI.	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)			
		Identifikasi Lokasi Desalinasi		
		Pembangunan desanilasi di Pekalongan		
		Pembangunan desanilasi di Demak		
		Pembangunan desanilasi di Kota Semarang		
		Rumusan Kelembagaan Pengelola		
		Pengujian Hasil		
		Kerjasama dengan CSR		
PA.	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali			



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
PA.	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)			
PA.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa			
		RTH Perkotaan	Pemeliharaan RTH	
		RTH Perdesaan		
PT.	Menghadirkan Infrastruktur yang carbon neutral			
		Penegakan Peraturan Daerah terkait dengan Carbon neutral		
		Pemberian insentif kepada daerah yang menggunakan Carbon neutral dalam Pembangunan Infrastruktur		
PT.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional			
	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Penguatan tata kelola KSM		
		Peningkatan kapasitas KSM		
	Pengembangan tempat pengolahan sampah regional	Modernisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)		
		Penguatan Tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu		



Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			Program Kabupaten	
			Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur
		Regional (TPST Reg)		
PT.	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok			
PT.	Subsidi Pangan Murah		dilaksanakan pelaksanaan pasar murah saat terjadi gejolak harga komoditas strategis seperti cabai, beras daan lainnya	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Indentifikasi kebutuhan pokok yang sudah disubsidi		
		Identifikasi penerima bantuan		
		Identifikasi koperasi/BUMD penyalur		
		Menyusun SOP penyaluran bantuan		
		Penyiapan anggaran		
PI.	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru			
		Pembentukan Kelembagaan		
		Identifikasi Potensi Kawasan Aglomerasi		

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program-program pembangunan perangkat daerah untuk lima tahun mendatang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program-program ini berpijak pada janji politik yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2025-2029. Walaupun demikian, program pembangunan perangkat daerah yang disusun hingga tahun 2030 ini merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam menyusun rencana alokasi dana pembangunan, kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan penting dan harus sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas wajib menjadi landasan dalam proses penganggaran. Program pembangunan yang telah dilengkapi dengan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif kemudian berfungsi sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis PD, termasuk menjabarkannya lebih detail ke dalam bentuk kegiatan maupun sub-kegiatan.

Program pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 berdasarkan masing-masing urusan dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkalitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan diarahkan untuk dapat meningkatkan mutu dan akses layanan Pendidikan. Program ini dilaksanakan melalui empat kegiatan, yaitu pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, dan kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota, dan kegiatan pengembangan mutu dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberian izin apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, kegiatan penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman Industri rumah tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah kabupaten/kota, kegiatan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah kabupaten/kota, dan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota.

e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini didukung melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM/UKP kewenangan daerah kabupaten/kota.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Banjarnegara melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kab/kota.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi yang diimplementasikan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan DA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab/kota dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam suatu daerah kab/kota.

c. Program Penataan Bangunan Gedung

Program penataan bangunan Gedung diarahkan untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis yang diarahkan pada satu kegiatan yaitu penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota. Pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang melalui tiga kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penetapan RTRW dan RRTR kab/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/kota.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program pengembangan jasa konstruksi diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman diarahkan pada dua kegiatan yaitu kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.

- b. Program Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum)
Program peningkatan PSU diarahkan pada kegiatan yaitu kegiatan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan.
- c. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- d. Program Pengembangan Perumahan
Program pengembangan perumahan diarahkan pada empat kegiatan yaitu kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program kab/kota, kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota, dan kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- e. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/kota, kegiatan penegakkan Perda kabupaten/kota dan Perbup/Walikota, dan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPKS) kabupaten/kota.
- b. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran melalui empat kegiatan yaitu kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota, kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, dan kegiatan penyelenggaraan operasi/pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.
- c. Program Penanggulangan Bencana
Program penanggulangan bencana diarahkan pada terwujudnya kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana melalui empat

kegiatan yaitu kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kab/kota, kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kegiatan pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana, dan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana kabupaten/kota.

6. Sosial

a. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

b. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan melalui kegiatan perlindungan social korban bencana alam dan social kabupaten/kota, dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan melalui kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

d. Program Pemberdayaan Sosial

Program pemberdayaan sosial diarahkan melalui kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota dan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupate/kota.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan melalui kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan kegiatan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja diarahkan pada kegiatan pelaksanaan antar kerja di Kabupaten/kota, dan kegiatan pengelolaan informasi pusat kerja.

c. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program perencanaan tenaga kerja diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja.

d. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial diarahkan melalui kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubin, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga diarahkan melalui kegiatan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender

Program ini diarahkan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan analisi dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

d. Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan perempuan diarahkan melalui kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Program pemenuhan hak anak diarahkan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program perlindungan khusus anak diarahkan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.

3. Pangan

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan melalui kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota, dan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

b. Program Penangan Kerawanan Pangan

Program penanganan kerawanan pangan diarahkan melalui kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanian

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan melalui kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.

b. Program Penatagunaan Tanah

Program penatagunaan tanah didukung melalui kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota.

c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Program ini didukung melalui kegiatan koordinasi pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota.

5. Lingkungan Hidup

a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan melalui kegiatan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota.

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini didukung melalui kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota dan kegiatan

penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota.

- c. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan melalui kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.

- e. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini didukung melalui kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota.

- f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini didukung melalui kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.

- g. Program Pengelolaan Persampahan

Program pengelolaan persampahan didukung melalui kegiatan pengelolaan persampahan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk didukung melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

- b. Program Pencatatan Sipil

Program pencatatan sipil didukung melalui kegiatan pelayanan pencatatan sipil, kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil, dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini didukung melalui 4 kegiatan, yaitu kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, kegiatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Penataan Desa

Program penataan desa diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang didukung melalui kegiatan penyelenggaraan penataan desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama antar Desa

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang didukung melalui kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini didukung melalui kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program ini diarahkan untuk dapat mewujudkan pengendalian penduduk melalui kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

c. Program Pengendalian Penduduk

Program pengendalian penduduk didukung melalui kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.

9. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan cakupan kualitas layanan transportasi melalui kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe c, kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor, kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalali) untuk jalan kabupaten/kota, kegiatan audit dan inspeksi untuk keselamatan LLAJ di jalan, kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota, kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu kabupaten/kota, dan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten/kota.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan untuk dapat meningkatkan pemanfaatan data center melalui dua kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota dan kegiatan pengelolaan *E-Government* di lingkup pemerintah daerah kab/kota.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk dapat Meningkatkan informasi yang dapat diakses oleh publik melalui kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, keitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

b. Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Program ini diarahkan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil.

c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/kota.

e. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota

f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

12. Penanaman Modal

a. Program Promosi Penanaman Modal

Program promosi penanaman modal diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,

b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan melalui kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

13. Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/ kota.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada tiga kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, dan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program pengembangan kapasitas kepramukaan diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

14. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program penyelenggaraan statistik sektoral diarahkan untuk dapat Meningkatkan ketersediaan data sektoral untuk menyusun perencanaan pembangunan melalui kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

15. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah melalui kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

16. Kebudayaan

a. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini didukung melalui kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

b. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan didukung melalui kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, dan kegiatan pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.

17. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan untuk dapat mengembangkan budaya baca masyarakat dan pelaksanaan pembinaan perpustakaan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, dan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

18. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program perlindungan dan penyelamatan arsip diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip melalui kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah

kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota.

4.1.3. Unsur Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, kegiatan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, dan kegiatan fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, serta kegiatan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata

a. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan melalui kegiatan destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini didukung melalui kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, dan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, dan kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi kreatif.

3. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan melalui kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, dan kegiatan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan melalui kegiatan pembangunan prasarana pertanian dan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota.

d. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan melalui kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

4. Perdagangan

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

b. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting ditingkat pasar Kabupaten/Kota, dan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan melalui kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian dan Usaha Industri

Program ini diarahkan melalui kegiatan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan melalui kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI.

6. Transmigrasi

a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemerataan persebaran penduduk berasal dari 1 daerah kabupaten/kota.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, meningkatnya pelayanan terhadap penduduk miskin, dan meningkatnya sarana dan prasarana ibadah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerja sama daerah, fasilitasi dan koordinasi hukum, dan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan koordinasi dalam rangka Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efisien melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM melalui kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam, kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, dan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

2. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan melalui kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD, kegiatan peningkatan kapasitas DPRD, kegiatan fasilitasi tugas DPRD, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran, kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, kegiatan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pengembangan daerah melalui kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA, kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

2. Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, penyerapan belanja, dan penyusunan laporan keuangan daerah melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah melalui kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

3. Kepegawaian

- a. Program Kepegawaian Daerah
Program kepegawaian daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan profesionalitas ASN melalui kegiatan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pengembangan SDM

Program pengembangan SDM diarahkan untuk dapat meningkatkan profesionalitas ASN melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program penelitian dan pengembangan daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas, kuantitas serta penerapan riset dan inovasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan perumusan kebijakan terkait di bidang pengawasan dan fasilitasi serta kegiatan pendampingan dan asistensi.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan melalui tiga kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan kelurahan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan melalui kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan melalui kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Di bawah ini disajikan tabel indikasi rencana program beserta rincian kebutuhan pendanaannya.

Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan													
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS)	NA	7,67%	149.714.500.000	7,27%	150.000.000.000	6,77%	152.000.000.000	6,27%	154.000.000.000	5,77%	159.000.000.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang sudah memiliki serttifikat pendidik	NA	90,20%	13.538.200.000	92,70%	14.500.000.000	96,20%	15.500.000.000	98,70%	16.500.000.000	99,50%	17.500.000.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan													
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	29,33%	160.002.391.600	34,67%	161.000.000.000	40%	137.000.000.000	45,33%	138.000.000.000	50,67%	140.000.000.000	PD Pengampu Urusan Kesehata n
	Rasio tempat tidur terhadap populasi	0,53	0,55 per 1.000 penduduk		0,56 per 1.000 penduduk		0,57 per 1.000 penduduk		0,58 per 1.000 penduduk		0,58 per 1.000 penduduk		PD Pengampu Urusan Kesehata n
	Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan	NA	89%		90%		92,5%		95%		97,5%		PD Pengampu Urusan Kesehata n
	Prevalensi Gizi Buruk	< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		PD Pengamp



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													u Urusan Kesehata n
	Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB succes rate)/ IUP	NA	93%		93%		94%		94%		95%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV	NA	91%		92%		93%		94%		95%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Persentase lanjut usia yang mandiri	NA	77%		79%		81%		83%		85%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	25,18%	28,78%		30,58%		32,37%		34,17%		35,97%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Kab/ kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	NA	21%		22%		23%		24%		25%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	90,1%	91,8%		93,4%		95%		96,7%		98,36%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Persentase penduduk terdaftar Jaminan	98%	98,10%		98,15%		98,20%		98,25%		98,30%		PD Pengamp u

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kesehatan Nasional (JKN)												Urusan Kesehata n
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	100%	67%		70%		72%		74%		76%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	76,6%	78%		79%		80%		81%		82%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	1,88 per 1.000 penduduk	1,92 per 1.000 penduduk	1.681.49 3.000	1,94 per 1.000 penduduk	1.700.000 .000	1,96 per 1.000 penduduk	1.800.000 .000	1,98 per 1.000 penduduk	1.900.000 .000	2 per 1.000 penduduk	2.000.000 .000	PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	65,0%	68%		70%		72%		74%		75%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengamp u Urusan Kesehata n
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100%	100%	313.758. 000	100%	400.000.0 00	100%	450.000.0 00	100%	500.000.0 00	100%	600.000.0 00	PD Pengamp u Urusan Kesehata n



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	50%	51%		52%		53%		54%		55%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan desa/ kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	NA	50%	566.394.300	52%	600.000.000	53%	650.000.000	54%	700.000.000	55%	750.000.000	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	2.500.000.000	100%	2.800.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.300.000.000	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat	8,75%	21,21%	100.000.000.000	21,70%	100.000.000.000	22,22%	90.000.000.000	22,77%	90.000.000.000	23,34%	100.000.000.000	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks prasarana fisik irigasi kewenangan kabupaten	39,45	41,99	18.995.000.000	43,72	16.824.000.000	45,46	17.880.000.000	47,19	20.100.000.000	48,92	20.570.000.000	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Penataa n Ruang
	Indeks prasarana non-fisik irigasi kewenangan kabupaten	63,03	63,83		64,23		64,63		65,03		65,43		PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung aset daerah yang memenuhi standar teknis	14,67%	18,00%	17.000.000.000	21,33%	20.400.000.000	24,67%	17.784.000.000	28,00%	19.784.000.000	31,33%	19.784.000.000	PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	92,00%	92,50%	1.500.000.000	93,00%	1.500.000.000	93,50%	1.500.000.000	94,00%	1.500.000.000	94,50%	1.500.000.000	PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	96,86%	98,80%	3.445.000.000	98,90%	3.535.000.000	99,00%	3.725.000.000	99,10%	4.215.000.000	99,20%	4.905.000.000	PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	77,23%	78,73%	3.318.000.000	80,03%	3.568.000.000	81,28%	3.927.000.000	82,33%	4.125.000.000	83,08%	4.310.000.000	PD Pengamp u Urusan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Pekerja Umum dan Penataa n Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	58,27%	66,62%	100.000.000	74,96%	100.000.000	83,31%	100.000.000	91,65%	100.000.000	100%	100.000.000	PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman													
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	89,07%	20%	7.704.735.000	25%	7.216.000.000	30%	7.310.000.000	35%	7.563.000.000	35%	8.025.000.000	PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan Pemuki man
Program Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum)	Persentase ketersediaan PSU di perumahan	20%	20%	1.090.000.000	30%	1.500.000.000	40%	1.800.000.000	50%	2.000.000.000	60%	2.200.000.000	PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan Pemuki man
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan	-	-	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kawasan permukiman												Pemukiman
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana	20%	20%	5.131.473.200	30%	5.570.000.000	40%	5.740.000.000	50%	6.518.000.000	50%	6.724.000.000	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase perbaikan rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh	30%	-	0	35%	1.300.000.000	40%	1.300.000.000	45%	1.400.000.000	45%	1.500.000.000	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum dalam satu Kabupaten/Kota	100%	100%	602.550.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	1.300.000.000	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penegakkan peraturan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan peraturan Bupati/Walikota												Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat
	Persentase Peningkatan Kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100%	100%				100%				100%		
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.735.920.000	100%	1.451.000.000	100%	1.590.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.900.000.000	PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat
	Persentase peningkatan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran	100%	100%				100%				100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	53,26%	39,93%	1.926.625.500	41,73%	2.000.000.000	43,53%	2.100.000.000	45,32%	2.200.000.000	47,12%	2.341.000.000	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Masyara kat
	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial													
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	119,47%	100%	1.954.200.000	100%	2.100.000.000	100%	2.150.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.300.000.000	PD Pengamp u Urusan Sosial
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi	165,74%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengamp u



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kebutuhan dasarnya luar panti												Urusan Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	89,05%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sosial
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	123,86%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	230.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	PD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan dokumen yang diintervensi	NA	3%	3.953.513.100	3%	4.000.000.000	3%	4.200.000.000	3%	4.200.000.000	3%	4.200.000.000	PD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	NA	70,84%	1.031.673.120	70,84%	1.232.000.000	70,84%	1.400.000.000	70,84%	1.500.000.000	70,84%	1.550.000.000	PD Pengampu Urusan Sosial
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	100%	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	PD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN													



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
DENGAN PELAYANAN DASAR													
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja													
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	4,94%	4,85%	850.000.000	5,19%	975.000.000	5,37%	975.000.000	5,54%	975.000.000	5,20%	975.000.000	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55,952%	57,50%	75.000.000	59%	210.000.000	60%	237.000.000	60,20%	250.000.000	60,50%	270.000.000	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu rencana tenaga kerja	38,889%	38,889%	4.225.000	38,889%	5.000.000	38,889%	5.000.000	38,889%	5.000.000	38,889%	5.000.000	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase pekerja pada perusahaan yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan jaminan sosial	35,75%	39,00%	98.064.000	41,03%	100.000.000	42,25%	100.000.000	43,20%	100.000.000	45%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara	100%	100%	67.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													ngan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang responsif gender	NA	11,76%	0	17,65%	40.000.000	23,53%	45.000.000	29,41%	45.000.000	35,29%	50.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase desa/keurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB		32,37%		39,57%		46,76%		53,96%		61,15%		
Program Pengelolaan Sistem data Gender	Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah	100%	-	0	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	100%	100%	156.283.400	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	31,29%	34,89%	58.000.000	38,49%	100.000.000	42,09%	100.000.000	45,68%	100.000.000	49,28%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	100%	100%	137.536.600	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan													
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	1982 kkal	2100 kkal	2.199.225.300	2100 kkal	2.200.000.000	2100 kkal	2.300.000.000	2100 kkal	2.400.000.000,00	2100 kkal	2.500.000.000	PD Pengampu Urusan Pangan
	Angka Kecukupan Protein (AKP) (Gram/Kapita/Hari)	58,5 gram	57 gram		57 gram		57 gram		57 gram		PD Pengampu Urusan Pangan		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi	100%	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000	PD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Energi di Masyarakat (kkal/Kapita/Hari)	2899 kkal	2400 kkal	150.000.000	2400 kkal	175.000.000	2400 kkal	200.000.000	2400 kkal	225.000.000,00	2400 kkal	250.000.000	PD Pengampu



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan	95,67%	86%	50.000.000	87%	60.000.000	88%	70.000.000	89%	80.000.000,00	90%	90.000.000	PD Pengampu Urusan Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan													
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah yang menjadi kewenangan kabupaten	NA	-	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah yang terlaksana	NA	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	NA	20%	0	25%	50.000.000	35%	50.000.000	45%	50.000.000	45%	50.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	NA	35%	0	40%	100.000.000	45%	100.000.000	50%	100.000.000	50%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup													
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan	100%	60%	414.422.600	70%	400.000.000	80%	400.000.000	90%	400.000.000	90%	400.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkun

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													gan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tervalidasi	100%	100%	430.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	100%	100%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	60%	70%	250.238.600	80%	200.000.000	90%	230.000.000	90,5%	230.000.000	90,5%	230.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata	75%	80%	60.000.000	85%	70.000.000	90%	80.000.000	95%	90.000.000	95%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang tertangani	70%	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72,32%	73%	1.995.000.000	73,65%	2.000.000.000	74,25%	2.100.000.000	75%	2.000.000.000	75%	2.300.000.000	PD Pengampu Urusan Lingkun



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													gan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Program pendaftaran penduduk	Rasio kepemilikan Kartu Keluarga	99,49%	99,50%	981.138.000	99,60%	900.000.000	99,60%	1.000.000.000	99,70%	1.100.000.000	99,70%	1.100.000.000	PD Pengampu Urusan Admindukcapil
Program pencatatan sipil	Rasio penduduk ber akta kelahiran	55,86%	60%	143.222.900	61%	150.000.000	62%	150.000.000	63%	150.000.000	64%	150.000.000	PD Pengampu Urusan Admindukcapil
	Rasio penerbitan akta kematian	NA	100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Admindukcapil		
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rasio data kependudukan yang dimutakhirkan	100%	100%	516.762.400	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	PD Pengampu Urusan Admindukcapil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
Program Penataan Desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	38,65%	38,70%	90.000.000	38,75%	100.000.000	38,80%	100.000.000	38,85%	100.000.000	38,90%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa	Persentase Kawasan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pemantauan	NA	33,33%	10.000.000	50%	32.000.000	66,67%	34.000.000	83,33%	34.000.000	100%	34.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Adminstrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	100%	100%	4.599.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	67,29%	93,98%		100,00%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Presentase BUMDes yang berkembang	17,11%	18,80%		20,68%		22,56%		24,44%		26,32%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program	96,24%	100%		180.000.000		100,00%		180.000.000		100,00%		200.000.000



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemberdayaan masyarakat												kat dan Desa
	Persentase pengembangan ekonomi desa	10%	16,22%		21,62%		24,32%		27%		29,73%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	3,38%	4,14%		4,51%		4,89%		5,26%		5,64%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	76,75%	77,79%	8.717.480.000	77,99%	8.474.480.000	78,19%	8.474.480.000	78,39%	8.474.480.000	78,59%	8.474.480.000	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3%	6,20%		6,19%		6,18%		6,17%		6,16%		PD Pengampu Urusan Pengendalian



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB	58%	58,15%	5.514.000.000	58,65%	5.584.000.000	59,15%	5.584.000.000	59,65%	5.584.000.000	60,15%	5.584.000.000	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	20%	20%		21%		22%		23%		24%		PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal yang melakukan pendidikan kependudukan	NA	2,26%	473.200.000	3,01%	523.200.000	3,76%	503.200.000	4,51%	503.200.000	5,26%	603.200.000	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	100%				100%				100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													alian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan													
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	89,33%	89,40%	20.287.936.286	89,45%	20.297.000.000	89,50%	17.308.000.000	89,55%	20.319.000.000	89,60%	20.330.000.000	PD Pengampu Urusan Perhubungan
	Persentase cakupan layanan parkir	83%	83,10%		83,20%		83,30%		83,40%		83,50%		PD Pengampu Urusan Perhubungan
	Persentase kelayakan kendaraan bermotor	44,95%	44,96%		44,97%		44,98%		44,99%		45,00%		PD Pengampu Urusan Perhubungan
	Persentase pertumbuhan trayek	0,75%	0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		PD Pengampu Urusan Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase kelancaran akses data center	100%	100%	967.970.000	100%	1.016.368.500	100%	1.067.186.925	100%	1.120.546.271	100%	1.176.573.585	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	NA	65%	1.010.165.700	70%	1.060.673.985	75%	1.113.707.684	80%	1.169.393.068	85%	1.227.862.722	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah													
Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan wirausaha	112,5%	0,72%	487.800.000	0,78%	546.336.000	0,84%	600.000.000	0,89%	660.000.000	0,95%	726.000.000	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengimplementasikan hasil pelatihan	NA	38%	150.000.000	43%	168.000.000	48%	180.000.000	53%	198.000.000	55%	220.000.000	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	30%	38,30%	15.000.000	38,35%	15.000.000	38,97%	15.000.000	48,99%	20.000.000	49,88%	25.000.000	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang bisa menilai kesehatannya	52%	76%	70.000.000	77%	150.000.000	78%	150.000.000	79%	150.000.000	80%	150.000.000	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan fasilitas pelatihan	14,47%	44,50%	300.000.000	53,45%	400.000.000	62,36%	400.000.000	71,26%	400.000.000	80,17%	400.000.000	PD Pengampu Urusan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Koperasi UKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	60%	76%	100.000.000	77%	100.000.000	78%	100.000.000	79%	100.000.000	80%	100.000.000	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal													
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	0,50%	1,50%	50.000.000	2%	55.000.000	2,50%	61.000.000	3%	66.600.000	3,50%	73.200.000	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	35%	45%	25.000.000	50%	27.000.000	55%	30.200.000	60%	32.200.000	65%	36.600.000	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	35%	45%	100.000.000	50%	110.000.000	55%	121.000.000	60%	133.100.000	65%	146.400.000	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga													
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan	NA	81%	200.000.000	82%	220.000.000	83%	240.000.000	84%	260.000.000	85%	280.000.000	PD Pengampu Urusan Kepemudaan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional dan nasional	NA	30	3.625.000.000	30	3.825.000.000	30	4.000.000.000	30	4.200.000.000	30	4.400.000.000	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah pramuka garuda	NA	2.710	220.000.000	2.715	240.000.000	2.720	260.000.000	2.725	280.000.000	2.730	300.000.000	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi oleh walidata	100%	100%	75.577.700	100%	79.356.585	100%	83.324.414	100%	87.490.635	100%	91.865.167	PD Pengampu Urusan Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian													
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase aplikasi yang diasesmen dengan ITSA	10,64%	14,89%	86.922.300	19,15%	91.268.415	23,40%	95.831.836	27,66%	100.623.428	31,91%	105.654.599	PD Pengampu Urusan Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan													
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	2,37%	2,37%	10.000.000	2,37%	175.000.000	2,37%	175.000.000	2,37%	175.000.000	2,37%	175.000.000	PD Pengampu Urusan Kebudayaan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	NA	4,80%	90.000.000	5,30%	2.500.000.000	5,60%	2.500.000.000	5,90%	2.500.000.000	6,2	2.500.000.000	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan													
Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	4.98%	7,31%	50.000.000	7,91%	190.000.000	8,57%	200.000.000	9,35%	210.000.000	10,31%	220.000.000	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
	Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	6.55%	7.29%		7,66%		8,03%		8,40%		8,77%		PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan													
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	75,01%	75,03%	19.000.000	75,06%	48.369.825	75,09%	50.673.150	75,12%	52.976.475	75,15%	55.279.800	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	85%	85,50%	6.000.000	85,75%	33.880.875	86,00%	35.494.250	86,25%	37.107.625	86,50%	38.721.000	PD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan													
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	575,56 ton	580 ton	110.000.000	580 ton	120.000.000,00	590 ton	125.000.000,00	590 ton	130.000.000,00	590 ton	135.000.000,00	PD Pengampu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	40,510 ton	41,016 ton	715.000.000	41,320 ton	720.000.000,00	41,725 ton	725.000.000,00	42,029 ton	730.000.000,00	42,535 ton	735.000.000,00	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Produksi Benih Ikan	2,534,358,034 ekor	2,566,037,509 ekor		2,585,045,194 ekor		2,610,388,775 ekor		2,629,396,460 ekor		2,661,075,935 ekor		
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang diberdayakan	5 Kegiatan	5 Keg.	25.000.000	5 Keg.	30.000.000,00	5 Keg.	35.000.000,00	5 Keg.	40.000.000,00	5 Keg.	45.000.000,00	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	120,89 ton/tahun	123,5 ton/th	225.000.000	125 ton/th	230.000.000,00	126,5 ton/th	235.000.000,00	128 ton/th	240.000.000,00	130 ton/th	245.000.000,00	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata													
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase cakupan media pemasaran pariwisata	83	83	245.000.000	83	1.200.000.000	83	1.300.000.000	83	1.400.000.000	83	1.500.000.000	PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Jumlah tamu wisatawan nusantara	2145722	2155000		2160000		2165000		2170000		2175000		PD Pengampu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Urusan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara	NA	76%	1.900.000.000	77%	4.000.000.000	78%	4.000.000.000	79%	4.000.000.000	80%	4.000.000.000	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	NA	50%	85.000.000	51%	1.000.000.000	52%	1.000.000.000	53%	1.000.000.000	54%	1.000.000.000	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rata-Rata Kenaikan Persentase Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan	5%	1,00%	4.088.324.900	1,50%	4.100.000.000	2%	4.200.000.000	2,50%	4.300.000.000	3%	4.400.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanian
	Persentase kenaikan populasi ternak kecil	2%	2%		2,50%		3%		3,50%		4%		PD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan luas panen komoditas tanaman pangan	5%	1,5%	16.700.500.000	2%	16.800.000.000	2,3%	13.900.000.000	2,7%	17.000.000.000	3%	17.000.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanian
	Persentase penambahan luas panen hortikultura	25%	1,50%		2%		2,50%		2,7%		3%		PD Pengampu Urusan Pertanian



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan terdampak bencana pertanian yang tertangani	100%	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 5%, L > M : 5%, M > U : 1%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 25%, penyuluhan : 25%	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 7%, L > M : 7%, M > U : 2%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 35%, penyuluhan : 35%	5.803.005.000	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 8%, L > M : 8%, M > U : 2%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 40%, penyuluhan : 40%	5.850.000.000	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 9%, L > M : 9%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 45%, penyuluhan : 45%	5.860.000.000	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 50%, penyuluhan : 50%	5.870.000.000	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 55%, penyuluhan : 55%	5.880.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanian
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase cakupan vaksinasi hewan terhadap target populasi rentan	60%	68%	908.200.000	71%	915.000.000	74%	920.000.000	77%	925.000.000	80%	930.000.000	PD Pengampu Urusan Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan													
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	NA	20%	911.200.000	20%	850.000.000	20%	850.000.000	20%	850.000.000	20%	850.000.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
	Persentase pelaku usaha perdagangan yang terbina	NA	0,26%		0,36%	66.200.000	0,46%	71.200.000	0,51%	76.200.000	0,62%	81.200.000	PD Pengampu Urusan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
													Perdagangan
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	NA	<5%	45.620.000	<5%	50.000.000	<5%	55.000.000	<5%	60.000.000	<5%	65.000.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan komoditas potensial ekspor	NA	2%	30.000.000	2%	35.000.000	2%	40.000.000	2%	45.000.000	2%	50.000.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68,30%	71%	30.000.000	72%	35.000.000	73%	40.000.000	75%	45.000.000	76%	50.000.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi /dilaksanakan	NA	5%	300.000.000	5%	305.000.000	5%	310.000.000	5%	315.000.000	5%	320.000.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0,25%	0,35%	125.000.000	0,40%	150.000.000	0,45%	200.000.000	0,50%	250.000.000	0,55%	300.000.000	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan perijinan berusaha sektor industri dengan jumlah ijin	100%	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	PD Pengampu Urusan Perindustrian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	usaha yang diterbitkan												
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini	100	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi													
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang diberangkatkan	0%	5%	5.000.000	5%	307.000.000	5%	307.000.000	5%	307.000.000	5%	307.000.000	PD Pengampu Urusan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
Sekretariat Daerah													
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	NA	100%	4.116.903.100	100%	4.545.862.300	100%	4.512.574.800	100%	4.636.721.050	100%	4.742.506.925	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
	Efektivitas kerja sama daerah	NA	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sekretari



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kesejahteraan masyarakat												at Daerah
	Persentase produk hukum yang dihasilkan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian serta Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	NA	100%	1.350.000.000	100%	1.417.500.000	100%	1.488.375.000	100%	1.568.306.250	100%	1.643.551.875	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ	NA	9/9		9/9		1/9		2/9		3/9		PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD													
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase raperda yang ditetapkan sesuai Propemperda	100%	100%	11.941.351.300	100%	12.025.000.000	100%	12.125.000.000	100%	12.225.000.000	100%	12.525.000.000	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Ketepatan penetapan perda APBD tahun N	tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Perencanaan													
Program Perencanaan. Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	97,30%	90%	180.000.000	90%	189.000.000	90%	198.450.000,00	90%	208.372.500,00	90%	218.791.125,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA	90,24%	90%	730.000.000	90%	766.500.000	90%	804.825.000	90%	845.066.250,00	90%	887.319.562,00	PD Pengampu Urusan Perencanaan
	Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	90%		90%		90%		90%		PD Pengampu Urusan Perencanaan		
	Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	90%		90%		90%		90%		PD Pengampu Urusan Perencanaan		
Keuangan													



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD sesuai ketentuan	100%	100%	444.079.623.885	100%	459.461.689.981	100%	467.640.488.764	100%	490.640.513.204	100%	538.497.538.864	PD Pengampu Urusan Keuangan
	Persentase kesesuaian program dalam APBD dengan RKPD	97%	97%		97%		97%		97%		97%		PD Pengampu Urusan Keuangan
	Persentase serapan belanja daerah	96,96%	97%		97%		97%		97%		97%		PD Pengampu Urusan Keuangan
	Persentase serapan dana transfer	98,42%	98,50%		98,60%		98,70%		98,80%		98,90%		PD Pengampu Urusan Keuangan
	Persentase OPD yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD sesuai standar	33%	35%		37%		39%		41%		43%		PD Pengampu Urusan Keuangan
Program Pengeloaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	100%	1.050.000.000	100%	1.102.500.000	100%	1.157.625.000	100%	1.215.506.250	100%	1.276.281.562	PD Pengampu Urusan Keuangan
	Persentase pemanfaatan BMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Keuangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase luas tanah pemerintah kabupaten yang bersertifikat	71%	76%		81%		86%		91%		96%		PD Pengampu Urusan Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	6,55%	2.381.858.500	6,65%	2.500.951.425	6,77%	2.625.998.996	6,90%	2.757.298.945	7,00%	2.895.163.892	PD Pengampu Urusan Keuangan
Kepegawaian													
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN	5,72%	5,90%	1.035.625.000	6,00%	1.087.406.250	6,10%	1.141.776.563	6,20%	1.198.865.391	6,30%	1.258.808.660	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
	Persentase jabatan struktural yang terisi secara definitif	88,84%	91,00%		92,00%		93,00%		94,00%		95,00%		PD Pengampu Urusan Kepegawaian
	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan													
Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	64,78%	65,00%	912.000.000	68,00%	957.600.000	71,00%	1.005.480.000	74,00%	1.055.754.000	77,00%	1.108.541.700	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan													



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase riset yang mendukung perekonomian daerah	50%	50%	142.645.042	50%	149.777.294,00	50%	157.266.158,00	50%	165.129.465,00	50%	173.385.938,00	PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
Inspektorat Daerah													
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT	NA	75%	706.790.400	77%	834.000.000	79%	896.000.000	81%	961.000.000	83%	1.029.000.000	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan OPD yang mendapatkan layanan konsulting	NA	40%	496.552.500	45%	1.283.000.000	50%	1.347.000.000	55%	1.414.000.000	60%	1.485.000.000	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
UNSUR KEWILAYAHAN													
Kecamatan Banjarmangu													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	87.200.000	100%	87.200.000	100%	87.200.000	100%	87.200.000	100%	87.200.000	Kecamatan Banjarmangu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	7.200.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	Kecamatan Banjarmangu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.860.000	100%	13.860.000	100%	13.860.000	100%	13.860.000	100%	13.860.000	Kecamatan Banjarmangu
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	34.425.000	100%	384.425.000	100%	34.425.000	100%	34.425.000	100%	34.425.000	Kecamatan Banjarmangu
Kecamatan Banjarnegara													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	255.479.600	100%	256.480.500	100%	257.500.600	100%	258.500.600	100%	265.500.600,00	Kecamatan Banjarnegara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	3.687.372.806	100%	3.688.372.800	100%	3.689.372.800	100%	3.690.372.800	100%	3.688.372.800,00	Kecamatan Banjarnegara
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	10.800.000	100%	11.800.000	100%	12.800.000	100%	13.800.000	100%	11.800.000,00	Kecamatan Banjarnegara
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	106.625.000	100%	208.577.500	100%	108.500.000	100%	109.500.000	100%	110.500.000,00	Kecamatan Banjarnegara
Kecamatan Batur													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	69.855.000	100%	73.347.750	100%	77.015.138	100%	80.865.894	100%	84.909.189	Kecamatan Batur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	16.000.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	Kecamatan Batur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.480.000	100%	18.480.000	100%	20.480.000	100%	22.480.000	100%	24.480.000	Kecamatan Batur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	34.145.000	100%	84.145.000	100%	89.145.000	100%	144.145.000	100%	89.145.000	Kecamatan Batur
Kecamatan Bawang													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	108.190.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	Kecamatan Bawang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	9.500.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	Kecamatan Bawang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.700.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	17.000.000	100%	20.000.000	Kecamatan Bawang
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	22.125.000	100%	297.125.000	100%	25.000.000	100%	75.000.000	100%	30.000.000	Kecamatan Bawang
Kecamatan Kalibening													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	63.600.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	Kecamatan Kalibening
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kecamatan Kalibening
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	Kecamatan Kalibening
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	35.625.000	100%	378.000.000	100%	53.000.000	100%	51.500.000	100%	51.500.000	Kecamatan Kalibening
Kecamatan Pagedongan													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang	100%	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	67.500.000	100%	70.000.000	100%	72.500.000	Kecamatan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penang- gung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	sesuai dengan standar pelayanan												Pagedon- gan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000	100%	16.000.000	100%	18.000.000	Kecamat- an Pagedon- gan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.500.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000	100%	20.000.000	100%	22.500.000	Kecamat- an Pagedon- gan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	25.500.000	100%	250.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	Kecamat- an Pagedon- gan
Kecamatan Purwanegara													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	127.200.000	100%	129.200.000	100%	131.200.000	100%	133.200.000	100%	135.200.000	Kecamat- an Purwane- gara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	Kecamat- an Purwane- gara
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	16.200.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	Kecamat- an Purwane- gara
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	66.500.000	100%	270.000.000	100%	70.000.000	100%	72.000.000	100%	74.000.000	Kecamat- an Purwane- gara
Kecamatan Sigaluh													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	58.965.000	100%	61.913.000	100%	65.008.000	100%	68.258.000	100%	71.670.000	Kecamat- an Sigaluh
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di	100%	100%	4.800.000	100%	5.040.000	100%	5.292.000	100%	5.556.000	100%	5.833.000	Kecamat- an Sigaluh



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kecamatan yang terfasilitasi												
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	12.900.000	100%	13.545.000	100%	14.222.000	100%	14.933.000	100%	15.679.000	Kecamatan Sigaluh
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	40.300.000	100%	42.315.000	100%	44.430.000	100%	46.651.000	100%	48.983.000	Kecamatan Sigaluh
Kecamatan Pejawaran													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	109.697.300	100%	117.197.300	100%	124.697.300	100%	132.197.300	100%	139.697.300	Kecamatan Pejawaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	13.350.000	100%	20.850.000	100%	28.350.000	100%	35.850.000	100%	43.350.000	Kecamatan Pejawaran
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	16.800.000	100%	24.300.000	100%	31.800.000	100%	39.300.000	100%	46.800.000	Kecamatan Pejawaran
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	38.882.000	100%	271.382.000	100%	278.882.000	100%	286.382.000	100%	343.882.000	Kecamatan Pejawaran
Kecamatan Pagentan													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	86.000.000	100%	91.750.000	100%	97.500.000	100%	103.250.000	100%	109.000.000	Kecamatan Pagentan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	25.000.000	100%	27.000.000	100%	29.000.000	100%	31.000.000	100%	33.000.000	Kecamatan Pagentan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	100%	18.000.000	100%	19.000.000	Kecamatan Pagentan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	71.625.000	100%	402.625.000	100%	83.625.000	100%	86.625.000	100%	91.625.000	Kecamatan Pagentan
Kecamatan Purwareja Klampok													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	110.690.000	100%	116.172.000	100%	121.980.600	100%	128.079.630	100%	134.483.612	Kecamatan Purwareja Klampok
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	3.700.000	100%	4.070.000	100%	4.477.000	100%	4.924.700	100%	5.417.170	Kecamatan Purwareja Klampok
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	14.600.000	100%	15.330.000	100%	16.096.500	100%	16.901.325	100%	17.746.391	Kecamatan Purwareja Klampok
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	12.900.000	100%	171.600.000	100%	29.223.000	100%	14.985.300	100%	15.823.830	Kecamatan Purwareja Klampok
Kecamatan Mandiraja													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	162.529.700	100%	167.000.000	100%	170.529.700	100%	172.529.700	100%	182.529.700	Kecamatan Mandiraja
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	4.800.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	Kecamatan Mandiraja
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	18.600.000	100%	18.600.000	100%	18.600.000	100%	18.600.000	100%	18.600.000	Kecamatan Mandiraja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	68.000.000	100%	386.000.000	100%	70.000.000	100%	72.000.000	100%	73.000.000	Kecamatan Mandiraja
Kecamatan Wanayasa													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	87.917.100	100%	102.000.000	100%	103.500.000	100%	105.000.000	100%	106.000.000	Kecamatan Wanayasa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	9.500.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	Kecamatan Wanayasa
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	14.200.000	100%	14.500.000	100%	15.000.000	100%	15.500.000	100%	16.000.000	Kecamatan Wanayasa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	9.500.000	100%	435.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Karangobar													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	65.048.400	100%	68.300.820	100%	70.000.000	100%	70.750.000	100%	71.000.000	Kecamatan Karangobar
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	6.000.000	100%	7.500.000	100%	8.500.000	100%	9.500.000	100%	10.000.000	Kecamatan Karangobar
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	Kecamatan Karangobar
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	74.888.500	100%	278.632.925	100%	78.632.000	100%	79.600.000	100%	79.000.000	Kecamatan Karangobar
Kecamatan Punggeln													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	116.180.000	100%	120.000.000	100%	121.500.000	100%	122.500.000	100%	123.500.000	Kecamatan Punggelan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	10.000.000	100%	15.500.000	100%	21.500.000	100%	23.750.000	100%	25.000.000	Kecamatan Punggelan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.500.000	100%	14.500.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	16.500.000	Kecamatan Punggelan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	49.100.000	100%	525.100.000	100%	52.600.000	100%	53.600.000	100%	54.600.000	Kecamatan Punggelan
Kecamatan Pandanarum													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	60.428.000	100%	60.428.000	100%	60.428.000	100%	60.428.000	100%	60.428.000	Kecamatan Pandanarum
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan Pandanarum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.685.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan Pandanarum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	64.625.000	100%	217.856.250	100%	71.249.063	100%	71.249.063	100%	96.249.063	Kecamatan Pandanarum
Kecamatan Wanadadi													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	61.940.000	100%	67.990.000	100%	71.447.000	100%	72.447.000	100%	72.447.000	Kecamatan Wanadadi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	17.450.000	100%	26.900.000	100%	36.650.000	100%	36.850.000	100%	36.850.000	Kecamatan Wanadadi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.500.000	100%	13.700.000	100%	14.475.000	100%	14.475.000	100%	15.375.000	Kecamatan Wanadadi
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	36.937.500	100%	312.900.000	100%	75.500.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	Kecamatan Wanadadi
Kecamatan Rakit													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	87.184.100	100%	101.000.000	100%	109.000.000	100%	114.000.000	100%	135.000.000	Kecamatan Rakit
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	8.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	28.000.000	Kecamatan Rakit
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.500.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.500.000	100%	16.000.000	Kecamatan Rakit
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	48.500.000	100%	140.000.000	100%	75.000.000	100%	83.000.000	100%	90.000.000	Kecamatan Rakit
Kecamatan Madukara													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	91.100.000	100%	92.600.000	100%	92.600.000	100%	92.600.000	100%	92.600.000	Kecamatan Madukara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	871.494.300	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	Kecamatan Madukara



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggu ng Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.480.000	100%	13.480.000	100%	13.480.000	100%	13.480.000	100%	13.480.000	Kecamatan Madukara
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	70.000.000	100%	365.000.000	100%	90.000.000	100%	115.000.000	100%	90.000.000	Kecamatan Madukara
Kecamatan Susukan													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	102.240.600	100%	139.615.500	100%	145.615.500	100%	149.615.500	100%	155.615.500	Kecamatan Susukan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	30.000.000	100%	32.000.000	100%	34.000.000	100%	36.000.000	100%	38.000.000	Kecamatan Susukan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	100%	100%	13.750.000	100%	18.500.000	100%	23.500.000	100%	28.500.000	100%	33.500.000	Kecamatan Susukan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	100%	21.000.000	100%	322.000.000	100%	48.000.000,00	100%	45.900.000	100%	50.900.000	Kecamatan Susukan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
Kesatuan Bangsa dan Politik													
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	1%	1%	850.000.000	2%	935.000.000	3%	1.028.500.000	4%	1.131.350.000	5%	1.244.485.000	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	5%	5%	1.865.132.000	5%	2.051.645.200	5%	2.088.000.000	5%	2.100.000.000	5%	2.121.000.000	PD Pengampu Urusan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik													Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	100%	1.165.000.000	100%	1.281.500.000	100%	1.409.650.000	100%	1.550.615.000	100%	1.705.676.500	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	1%	1%	150.000.000	2%	165.000.000	3%	181.500.000	4%	199.650.000	5%	219.615.000	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	100%	100%	489.150.000,00	100%	538.065.000	100%	591.871.500	100%	651.058.650	100%	716.164.515	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				1.265.495.762.861		1.350.491.018.658,74		1.390.749.173.691,56		1.425.616.489.014,31		1.474.959.717.828,90	Semua Perangkat Daerah



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
DPUPR	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	15.870.761.000	100%	18.000.000.000	100%	18.300.000.000	100%	18.400.000.000	100%	18.500.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Distankan KP	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	24,903,388,488	100%	25.000.000.000	100%	25.100.000.000	100%	25.200.000.000	100%	25.300.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
RSUD Hj. Anna Lasmanah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	29.407.623.000	100%	34.000.000.000	100%	35.700.000.000	100%	36.000.000.000	100%	37.600.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
	NDR	15	≤15	177.043.895.000	≤15	186.744.000.000	≤15	212.335.000.000	≤15	232.703.000.000	≤15	243.484.000.000	RSUD Hj. Anna Lasmana h
	Persentase pemenuhan SPM layanan umum dan administrasi	89,40%	91%		92%		93%		94%		94%		RSUD Hj. Anna Lasmana h
	Persentase kemampuan pendapatan membiayai seluruh belanja	78,1%	78,15%		78,20%		78,25%		78,30%		78,30%		RSUD Hj. Anna Lasmana h
	Persentase pemenuhan SPM	90%	91%		92%		93%		94%		94%		RSUD Hj. Anna



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	layanan klinis dan penunjang												Lasmannah
Dinas Kesehatan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	90%	92%	137.397.182.602	93%	148.902.000.000	94%	151.000.000.000	95%	153.900.000.000	95%	157.300.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
DPKPLH	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	15.738.929.774	100%	16.400.000.000	100%	17.000.000.000	100%	17.500.000.000	100%	18.250.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	635.095.159.779	100%	694.728.154.762	100%	659.500.000.000	100%	663.753.628.009	100%	689.009.476.944	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Bakesbangpol	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	3.969.014.925	100%	4.300.000.000	100%	4.400.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.660.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Disperindagkop UKM	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	14.518.975.929	100%	14.730.000.000	100%	15.000.000.000	100%	15.200.000.000	100%	15.300.000.000	Semua Perangkat at Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah
	Peningkatan pendapatan asli retribusi pasar	5%	2%	200.000.000	2%	200.000.000	2%	200.000.000	2%	200.000.000	2%	200.000.000	Disperindagkop UKM
Dispermades PPKB	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	6.771.000.000	100%	6.808.691.000	100%	6.849.691.000	100%	6.870.691.000	100%	6.901.691.000	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah		
Dinas Perhubungan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	9.712.063.714	100%	9.775.000.000	100%	9.825.000.000	100%	9.877.000.000	100%	9.912.000.000	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah		
Dinas Sosial PPPA	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	5.303.841.327	100%	5.550.000.000	100%	5.650.000.000	100%	5.740.000.000	100%	5.855.000.000	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah		
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	4.425.000.000	100%	4.646.250.000	100%	4.746.250.000	100%	4.946.250.000	100%	5.278.000.000	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	100%	100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	keuangan perangkat daerah												
Disnaker dan DPMPTSP	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	6.637.657.927	100%	7.100.000.000	100%	7.320.000.000	100%	7.580.000.000	100%	7.890.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
BPBD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	4.945.060.818	100%	5.192.313.858	100%	5.451.929.550	100%	5.724.526.027	100%	6.010.752.328	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Dinas Komunikasi dan Informasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	5.321.037.300	100%	5.587.089.165	100%	5.866.443.623	100%	6.159.765.804	100%	6.467.754.095	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	8.670.000.000	100%	9.311.786.986	100%	9.311.786.986	100%	9.311.786.986	100%	9.311.786.986	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	5.552.375.000	100%	5.829.993.750	100%	6.121.493.438	100%	6.427.568.109	100%	6.748.946.515	Semua Perangkat at Daerah



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%			100%		100%			Semua Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	38.038.718.591	100%	38.200.000.000	100%	38.450.000.000	100%	38.600.000.000	100%	38.650.000.000	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah
Inspektorat	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	9.046.657.100	100%	10.392.000.000	100%	10.912.000.000	100%	11.457.000.000	100%	12.030.000.000	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	11.644.904.196	100%	12.000.000.000	100%	12.900.000.000	100%	13.400.000.000	100%	14.000.000.000	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah
BPPKAD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	17.061.564.154	100%	17.914.642.361	100%	18.810.374.479	100%	19.750.893.202	100%	20.738.437.862	Semua Perangkat Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Bapperida	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	5.947.354.958	100%	6.244.722.705,00	100%	6.556.958.840,00	100%	6.884.806.782,00	100%	7.229.047.121,00	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Dindukcapil	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	6.266.402.042	100%	6.230.903.542,00	100%	6.302.524.542	100%	6.395.016.542	100%	6.586.867.232	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Sekretariat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	31.533.096.900	100%	33.500.000.000	100%	34.510.000.000	100%	35.500.000.000	100%	36.100.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
	Nilai penataan organisasi	53,54	54,5		55		55,5		56		56,5		Sekretari at Daerah
Kecamatan Banjarmangu	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.246.451.927	100%	2.955.451.927	100%	2.320.451.927	100%	2.237.451.927	100%	2.230.451.927	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Banjarnegara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	10.884.212.140	100%	10.960.212.140	100%	11.245.500.250	100%	11.365.500.250	100%	11.376.500.250	Semua Perangkat at Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%			100%		100%			100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Batur	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.395.96 1.758	100%	2.467.840 .611	100%	2.541.875 .829	100%	2.618.132 .104	100%	2.696.676 .067	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Bawang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.022.14 0.330	100%	2.025.000 .000	100%	2.030.000 .000	100%	2.040.000 .000	100%	2.045.000 .000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Kalibening	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.052.19 7.349	100%	2.068.444 .749	100%	2.068.444 .749	100%	2.068.444 .749	100%	2.068.444 .749	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Karangobar	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.118.72 6.090	100%	2.109.210 .900	100%	2.110.300 .000	100%	2.112.750 .000	100%	2.115.950 .000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kecamatan Madukara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	3.663.501.562	100%	3.823.659.430	100%	3.848.659.430	100%	3.863.659.430	100%	3.863.659.430	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Mandiraja	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.411.790.500	100%	2.438.813.100	100%	2.471.790.500	100%	2.521.790.500	100%	2.551.790.500	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Pagedongan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.627.260.000	100%	2.800.000.000	100%	2.900.000.000	100%	2.925.000.000	100%	2.950.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Pagentan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.114.364.588	100%	2.145.818.447	100%	2.205.723.376	100%	2.293.128.306	100%	2.379.033.235	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Pandanarum	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.341.945.790	100%	2.759.043.080	100%	2.581.995.233	100%	2.633.635.138	100%	2.633.635.138	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangk

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	keuangan perangkat daerah												at Daerah
Kecamatan Pejawaran	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.451.943.900	100%	2.459.443.900	100%	2.466.943.900	100%	2.474.443.900	100%	2.481.943.900	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangk at Daerah
Kecamatan Punggelan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.194.327.130	100%	2.237.000.000	100%	2.360.000.000	100%	2.450.000.000	100%	2.550.000.000	Semua Perangk at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangk at Daerah
Kecamatan Purwanegara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	1.920.703.890	100%	1.940.703.890	100%	1.960.703.890	100%	1.980.703.890	100%	2.000.703.890	Semua Perangk at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangk at Daerah
Kecamatan Purwareja-Klampok	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.175.971.760	100%	2.394.228.936	100%	2.634.311.830	100%	2.898.403.013	100%	3.188.903.314	Semua Perangk at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangk at Daerah
Kecamatan Rakit	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.003.771.576	100%	2.094.000.000	100%	2.241.000.000	100%	2.253.400.000	100%	2.314.700.000	Semua Perangk at Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Sigaluh	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.772.174.310	100%	2.910.783.000	100%	3.056.322.000	100%	3.209.138.000	100%	3.369.594.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Susukan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.000.516.635	100%	2.058.817.835	100%	2.088.817.835	100%	2.118.817.853	100%	2.148.817.853	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Wanadadi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	1.873.338.730	100%	1.904.998.585	100%	1.996.880.485	100%	2.120.157.493	100%	2.180.153.493	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah
Kecamatan Wanayasa	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	1.756.186.860	100%	1.850.000.000	100%	1.900.000.000	100%	1.950.000.000	100%	2.000.000.000	Semua Perangkat at Daerah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Semua Perangkat at Daerah

Sumber: Diolah Penulis, 2025



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Keberhasilan indikator tersebut, ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat tercapai, diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 terdapat 2 (dua) jenis indikator dalam RPJMD yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Secara lengkap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Angka Kemiskinan	Persen	14,79-14,30	14,39-13,90	13,98-13,49	13,57-13,08	13,17-12,68	12,76-12,27
2.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	28,99	30,63	32,36	34,20	36,14	38,18
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,29	70,96	71,64	72,32	73,02	73,72
4.	Prevalensi Stunting	Persen	19,3	18	16,7	15,4	14,1	14,1
5.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	11,19	10,59	10	9,4	8,8	8,2
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70	4,70-5,70
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,10-5,72	5,50-5,00	5,47-5,17	5,43-5,13	5,38-5,06	5,33-4,90
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	68,75	75,95	75,99	76,03	76,08	76,08
9.	Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB	Persen	22,51	22,65	22,79	22,92	23,06	23,20
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,30	81,55	82,05	82,55	83,05	83,55
11.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48
12.	Indeks Risiko Bencana	Angka	102,80-102,27	100,80-100,40	98,79-97,82	96,79-95,59	94,78-93,36	92,78-91,13

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Sedang dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja layanan umum diukur dengan indikator kinerja daerah pada tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	80,86	81,15	81,43	81,72	82	82,29
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	12	15	20	25	30	32
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	3,5	4,5	5,5	8,05	10,6	16,25
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	0,03	5,65	11,28	16,9	22,52	28,14
5	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	118.188,19	1.137.100,67	1.399.074,34	1.861.048,01	2.326.311,91	2.584.995,35
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
6	Indeks Gini	Angka	0,36	0,35	0,348	0,346	0,342	0,34
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,75	75,28	75,55	75,72	75,94	76,32
8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,88	6,89	6,9	6,91	6,92	6,93
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	15	15	14	14	13	13
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Persen	91	92	93	94	94	94
11	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	92	93	93	94	94	95
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,84	11,85	11,86	11,87	11,88	11,89
13	Angka Literasi SD/Sederajat	Persen	70,27	72,77	75,27	77,77	80,27	82,77
14	Angka Literasi SMP/Sederajat	Persen	79,8	80,9	82	83,1	84,2	85,3
15	Numerasi SD/Sederajat	Persen	59,31	62,21	65,11	68,01	70,91	73,81



No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Numerasi SMP/Sederajat	Persen	68,8	70,3	71,8	73,3	74,8	76,3
17	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	5,9	7,31	7,91	8,57	9,35	10,31
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	5,05	5,19	5,32	5,46	5,59	5,73
19	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	84,37	85,15	85,93	86,71	87,49	88,27
20	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulog Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	65	66	68	69	70	71
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	38,25	38,75	39,25	39,75	40,25	40,75
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,51	98,61	98,66	98,71	98,76	98,81
23	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Persen	18,64	19,58	20,53	21,49	22,45	23,41
24	Jumlah Pengunjung tempat bersejarah	orang	435.000	436.000	437.000	438.500	440.000	441.500
25	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Persen	18,55	18,97	19,39	19,81	20,65	21,07
26	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200	6.200
27	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	62,85 - 64,7	62,15 - 62,23	62,88 - 63	63,61 - 63,77	64,34 - 64,54	65,08 - 65,31
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,281 - 0271	0,28 - 0,261	0,278-0,25	0,276-0,24	0,274-0,229	0,272-0,219
29	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	62,69	65,02	67,36	69,69	72,02	74,35
III	ASPEK DAYA SAING							
30	Rasio PDRB industri Pengolahan	Persen	17,04	17,37	17,7	18,02	18,35	18,68
31	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,2	2,43	2,65	2,88	3,1	3,33
32	Rasi Kewirausahaan Daerah	Persen	2,91	3,06	3,31	3,44	3,5	3,62
33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	60,78	61,41	62,03	62,66	63,28	63,91
34	Disparitas Harga	Angka	(+-10)	(+-10)	(+-10)	(+-10)	(+-10)	(+-10)



No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Kapabilitas Inovasi	Angka	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
36	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kab/Kota	Persen	89,4	89,45	89,5	89,55	89,6	89,65
37	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kab/Kota	Angka	53	54	55	56	57	58
38	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	34,69	38,77	42,85	46,93	51,02	55,11
39	Persentase Desa Mandiri	Persen	11,65	12,41	13,53	14,66	15,79	16,92
40	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	22,51	22,65	22,79	22,93	23,06	23,19
41	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	Persen	1,69	1,64	1,59	1,53	1,47	1,41
42	Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	Persen	1,67	1,6	1,53	1,46	1,39	1,32
43	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	18,88-19,68	18,90-19,78	19,20-20,10	19,65-20,30	19,88-20,58	19,96-20,88
44	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,8	1,89	1,9	1,98	2,02	2,04
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
45	Indeks Reformasi Hukum	Angka	82	82,5	83	83,5	84	84,5
46	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,29	3,38	3,48	3,57	3,66	3,75
47	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,56	4,6	4,7	4,8	5	5,1
48	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,9	75,96	76,03	77,09	80	80,05

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Kemudian untuk indikator kinerja kunci Kabupaten Banjarnegara disajikan pada tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030

Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggung Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS)	%	7,67	7,27	6,77	6,27	5,77	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Persentase guru yang sudah memiliki serttifikat pendidik	%	90,20	92,70	96,20	98,70	99,50	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	29,33	34,67	40	45,33	50,67	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Rasio tempat tidur terhadap populasi	per 1.000 penduduk	0,55	0,56	0,57	0,58	0,58	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan	%	89	90	92,5	95	97,5	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Prevalensi Gizi Buruk	%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB succes rate)/ IUP	%	93	93	94	94	95	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV	%	91	92	93	94	95	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77	79	81	83	85	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	28,78	30,58	32,37	34,17	35,97	PD Pengampu Urusan Kesehatan



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Kab/ kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	21	22	23	24	25	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	91,8	93,4	95	96,7	98,36	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase penduduk terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,10	98,15	98,20	98,25	98,30	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	67	70	72	74	76	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	%	78	79	80	81	82	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	1,92	1,94	1,96	1,98	200%	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	68	70	72	74	75	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	51	52	53	54	55	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Cakupan desa/ kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	%	50	52	53	54	55	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Kesehatan



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat	%	21,21	21,70	22,22	22,77	23,34	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Indeks prasarana fisik irigasi kewenangan kabupaten	Nilai	41,99	43,72	45,46	47,19	48,92	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Indeks prasarana non-fisik irigasi kewenangan kabupaten	Nilai	63,83	64,23	64,63	65,03	65,43	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Persentase bangunan gedung aset daerah yang memenuhi standar teknis	%	18,00	21,33	24,67	28,00	31,33	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Persentase penduduk berakses air minum	%	98,80	98,90	99,00	99,10	99,20	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	78,73	80,03	81,28	82,33	83,08	PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	66,62	74,96	83,31	91,65	100	PD Pengampu Urusan



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
							Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	20	25	30	35	35	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Persentase ketersediaan PSU di perumahan	%	20	30	40	50	60	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Persentase meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	-	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Persentase penanganan rumah korban bencana	%	20	30	40	50	50	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Persentase perbaikan rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh	%	-	35	40	45	45	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
Persentase penanganan gangguan trantibum dalam satu Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
							Perlindungan Masyarakat
Persentase penegakkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Persentase Peningkatan Kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Persentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Persentase peningkatan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	39,93	41,73	43,53	45,32	47,12	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sosial
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sosial
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sosial
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sosial



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggung Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Korban Bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sosial
Cakupan dokumen yang diintervensi	%	3	3	3	3	3	PD Pengampu Urusan Sosial
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	70,84	70,84	70,84	70,84	70,84	PD Pengampu Urusan Sosial
Persentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	4,85	5,19	5,37	5,54	5,20	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	57,50	59	60	60,20	60,50	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu rencana tenaga kerja	%	38,889	38,889	38,889	38,889	38,889	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Persentase pekerja pada perusahaan yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan jaminan sosial	%	39,00	41,03	42,25	43,20	45	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang responsif gender	%	11,76	17,65	23,53	29,41	35,29	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	%	32,37	39,57	46,76	53,96	61,15	
Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah	%	-	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	34,89	38,49	42,09	45,68	49,28	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							

Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	kkal/kapita/har i	2100	2100	2100	2100	2100	PD Pengampu Urusan Pangan
Angka Kecukupan Protein (AKP) (Gram/Kapita/Hari)	gram/hari	57	57	57	57	57	PD Pengampu Urusan Pangan
Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pangan
Ketersediaan Energi di Masyarakat (kkal/Kapita/Hari)	%	2400	2400	2400	2400	2400	PD Pengampu Urusan Pangan
Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan	%	86	87	88	89	90	PD Pengampu Urusan Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
Persentase penyelesaian sengketa tanah yang menjadi kewenangan kabupaten	%	-	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Persentase penatagunaan tanah yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	%	20	25	35	45	45	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	%	35	40	45	50	50	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan	%	60	70	80	90	90	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tervalidasi	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	%	70	80	90	90,5	90,5	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata	%	80	85	90	95	95	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase luasan RTH yang tertangani	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	73	73,65	74,25	75	75	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Rasio kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,50	99,60	99,60	99,70	99,70	PD Pengampu Urusan Admindukcapil
Rasio penduduk ber akta kelahiran	%	60	61	62	63	64	PD Pengampu Urusan Admindukcapil
Rasio penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Admindukcapil
Rasio data kependudukan yang dimutakhirkan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Admindukcapil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	38,70	38,75	38,80	38,85	38,90	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
							Masyarakat dan Desa
Persentase Kawasan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pemantauan	%	33,33	50	66,67	83,33	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	93,98	100,00	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Presentase BUMDes yang berkembang	%	18,80	20,68	22,56	24,44	26,32	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase pengembangan ekonomi desa	%	16,22	21,62	24,32	27	29,73	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	%	4,14	4,51	4,89	5,26	5,64	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	77,79	77,99	78,19	78,39	78,59	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,20	6,19	6,18	6,17	6,16	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan anggota Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB	%	58,15	58,65	59,15	59,65	60,15	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	20	21	22	23	24	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal yang melakukan pendidikan kependudukan	%	2,26	3,01	3,76	4,51	5,26	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	%	89,40	89,45	89,50	89,55	89,60	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Persentase cakupan layanan parkir	%	83,10	83,20	83,30	83,40	83,50	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Persentase kelayakan kendaraan bermotor	%	44,96	44,97	44,98	44,99	45,00	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Persentase pertumbuhan trayek	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
Persentase kelancaran akses data center	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	65	70	75	80	85	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
Pertumbuhan wirausaha	%	0,72	0,78	0,84	0,89	0,95	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Persentase Usaha Mikro yang mengimplementasikan hasil pelatihan	%	38	43	48	53	55	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	38,30	38,35	38,97	48,99	49,88	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Persentase KSP/USP yang bisa menilai kesehatanya	%	76	77	78	79	80	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase koperasi yang diberikan fasilitas pelatihan	%	44,50	53,45	62,36	71,26	80,17	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	76	77	78	79	80	PD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
Persentase peningkatan jumlah investor	%	1,50	2	2,50	3	3,50	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	%	45	50	55	60	65	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	45	50	55	60	65	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
Persentase pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan	%	81	82	83	84	85	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional dan nasional	Jumlah	30	30	30	30	30	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah pramuka garuda	Orang	2.710	2.715	2.720	2.725	2.730	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi oleh walidata	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Statistik



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggung Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
Persentase aplikasi yang diasesmen dengan ITSA	%	14,89	19,15	23,4	27,66	31,91	PD Pengampu Urusan Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	4,80	5,30	5,60	5,90	6,2	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	7,31	7,91	8,57	9,35	10,31	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	%	7,29	7,66	8,03	8,40	8,77	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
Tingkat ketersediaan arsip	%	75,03	75,06	75,09	75,12	75,15	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Tingkat Digitalisasi Arsip	%	85,50	85,75	86,00	86,25	86,50	PD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							
Produksi Perikanan Tangkap	ton	580	580	590	590	590	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya	ton	41,02	41,32	41,73	42,03	42,54	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Produksi Benih Ikan	Ekor	2,566,037,509	2,585,045,194	2,610,388,775	2,629,396,460	2,661,075,935	
Jumlah Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang diberdayakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	ton/tahun	123,5	125	126,5	128	130	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
Persentase cakupan media pemasaran pariwisata	%	83	83	83	83	83	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Jumlah tamu wisatawan nusantara	Orang	2155000	2160000	2165000	2170000	2175000	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Persentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara	%	76	77	78	79	80	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	50	51	52	53	54	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
Rata-Rata Kenaikan Persentase Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan	%	1,00	1,50	2	2,50	3	PD Pengampu Urusan Pertanian
Persentase kenaikan populasi ternak kecil	%	2	2,50	3	3,50	4	PD Pengampu Urusan Pertanian
Persentase peningkatan luas panen komoditas tanaman pangan	%	1,5	2	2,3	2,7	3	PD Pengampu Urusan Pertanian
Persentase penambahan luas panen hortikultura	%	1,5	2	2,5	2,7	3	PD Pengampu Urusan Pertanian



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase luas lahan terdampak bencana pertanian yang tertangani	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pertanian
Cakupan bina kelompok tani		Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 7%, L > M : 7%, M > U : 2%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 35%, penyuluhan : 35%	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 8%, L > M : 8%, M > U : 2%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 40%, penyuluhan : 40%	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 9%, L > M : 9%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 45%, penyuluhan : 45%	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 50%, penyuluhan : 50%	Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 55%, penyuluhan : 55%	PD Pengampu Urusan Pertanian
Persentase cakupan vaknisasi hewan terhadap target populasi rentan	%	68	71	74	77	80	PD Pengampu Urusan Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		0	0	0	0	0	
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	20	20	20	20	20	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Persentase pelaku usaha perdagangan yang terbina	%	0,26	0,36	0,46	0,51	0,62	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Persentase fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	%	<5	<5	<5	<5	<5	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Peningkatan komoditas potensial ekspor	%	2	2	2	2	2	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	71	72	73	75	76	PD Pengampu Urusan Perdagangan



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi /dilaksanakan	%	5	5	5	5	5	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan perijinan berusaha sektor industri dengan jumlah ijin usaha yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi							
Persentase transmigran yang diberangkatkan	%	5	5	5	5	5	PD Pengampu Urusan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
Sekretariat Daerah							
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Efektivitas kerja sama daerah	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Persentase fasilitasi kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian serta Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tingkat Kematangan UKPBJ	%	9/9	9/9	1/9	2/9	3/9	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD							
Persentase raperda yang ditetapkan sesuai Propemperda	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Ketepatan penetapan perda APBD tahun N		tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Perencanaan							
Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	90	90	90	90	90	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA	%	90	90	90	90	90	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	90	90	90	90	PD Pengampu Urusan Perencanaan



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90	90	90	90	90	PD Pengampu Urusan Perencanaan
Keuangan							
Persentase penetapan APBD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase kesesuaian program dalam APBD dengan RKPD	%	97	97	97	97	97	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase serapan belanja daerah	%	97	97	97	97	97	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase serapan dana transfer	%	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase OPD yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD sesuai standar	%	35	37	39	41	43	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase pemanfaatan BMD	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase luas tanah pemerintah kabupaten yang bersertifikat	%	76	81	86	91	96	PD Pengampu Urusan Keuangan
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	6,55	6,65	6,77	6,90	7,00	PD Pengampu Urusan Keuangan
Kepegawaian							
Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN	%	5,90	6,00	6,10	6,20	6,30	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Persentase jabatan struktural yang terisi secara definitif	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan							
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan							
Persentase riset yang mendukung perekonomian daerah	%	50	50	50	50	50	PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
Inspektorat Daerah							
Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT	%	75	77	79	81	83	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Cakupan OPD yang mendapatkan layanan konsulting	NA	40	45	50	55	60	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
UNSUR KEWILAYAHAN							
Kecamatan							
Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	%	100	100	100	100	100	Kecamatan
Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Kecamatan
Persentase penanganan konflik di wilayah	%	100	100	100	100	100	Kecamatan
Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	100	100	100	100	Kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							



Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Kesatuan Bangsa dan Politik							
Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	%	1	2	3	4	5	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	5	5	5	5	5	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase cakupan Ormas yang diberdayakan dan diawasi	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	1	2	3	4	5	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Konflik Sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							Semua Perangkat Daerah
Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Semua Perangkat Daerah
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Semua Perangkat Daerah
NDR	%	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	RSUD Hj. Anna Lasmanah

Indikator	Satuan	TARGET TAHUN					PD Penanggun g Jawab
		2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase pemenuhan SPM layanan umum dan administrasi	%	91	92	93	94	94	RSUD Hj. Anna Lasmanah
Persentase kemampuan pendapatan membiayai seluruh belanja	%	78,15	78,20	78,25	78,30	78,30	RSUD Hj. Anna Lasmanah
Persentase pemenuhan SPM layanan klinis dan penunjang	%	91	92	93	94	94	RSUD Hj. Anna Lasmanah
Peningkatan pendapatan asli retribusi pasar	%	2	2	2	2	2	Disperindagko p UKM
Nilai penataan organisasi	Nilai	54,5	55	55,5	56	56,5	Sekretariat Daerah

Sumber: Tim Penyusun, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, RPD Tahun 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra PD, yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 akan dijabarkan menjadi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama RPJMD periode selanjutnya belum tersusun. Program prioritas daerah tahun transisi mengacu pada tujuan, sasaran, maupun program prioritas tahun terakhir pada RPJMD ini yaitu pada tahun 2030, dengan penyesuaian target capaian sesuai capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Bupati yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkada dalam menyusun RKPD maupun APBD.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berkewajiban untuk menyusun Renstra PD dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD.
3. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Banjarnegara.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sampai tahun 2030.
5. Guna meningkatkan inklusivitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
6. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD, pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan berbasis risiko melalui manajemen risiko.
7. Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH